

Transnasional

Jurnal Ilmu Hubungan Internasional

- **Strategi Singapura Mengatasi *Low Total Fertility Rate (TFR)* sebagai Dampak dari Pertumbuhan Ekonomi periode 2008 - 2013**
Jeanie Annissa, Nathania Dea Myrilla
- **Dromologi Krida Yudha: Sebuah Analisis Percepatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi dalam Target Pemenuhan *Minimum Essential Force* Indonesia 2024**
Semmy Tyar Armanda
- **Kebijakan Australia dalam Menangani Masalah *Asylum Seeker* dan *Refugees* pada Tahun 2001 - 2010**
Arin Fithriana, Muhammad Fauzi Regianto
- **Peredaran *Illegal Small Arms and Light Weapons (SALW)* di Kawasan Amerika**
Studi Kasus: Kolombia
Denik Iswardani Witarti, Agi Noorman Hafidz
- **Keberhasilan Korea Selatan Mempertahankan Posisinya Sebagai "Macan Asia"**
Ani Khoirunnisa, Tuswoyo, Ahmad Hidayat
- **Membentuk Rezim Tata Perubahan Iklim Global**
Ica Wulansari



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Budi Luhur

Transnasiona

Jurnal Ilmu Hubungan Internasional

**Pemimpin Redaksi:
Dekan FISIP**

**Redaktur Pelaksana:
Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

**Dewan Redaksi:
Arin Fithriana
Denada Faraswacyen L. Gaol**

**Sekretaris Redaksi
Samsinar**

**Pemasaran
Anggun Puspitasari**

**Alamat Redaksi:
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur
Jln. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260
Telp. (021) 5853753 Ext. 252**

**Email
Transnasiona_bl@yahoo.co.id**

PENGANTAR REDAKSI

Pembaca yang budiman,

Sebelumnya, kami sangat menyesal dengan keter;ambatan penerbitan jurnal ini. Ada beberapa kendala yang harus kami hadapi sehingga kami akhirnya bisa menerbitkan kembali jurnal ini. Banyak hal yang harus kami perbaiki berkaitan penyuntingan dan manajemen serta sirkulasinya. Kami sangat menyadari masih banyak kekurangan dalam jurnal ini. Kritik dan saran untuk perbaikan sangan kami harapkan.

Semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat bagi para pembaca.

Kemanfaatan ini sangat tergantung pada kontribusi tulisan-tulisan yang masuk pada redaksi. Selamat membaca

Jakarta, Juni 2014

Salam kami,

Dewan Redaksi

DAFTAR ISI

<i>Jeanie Annissa</i> <i>Nathania Dea Myrilla</i>	Strategi Singapura Mengatasi <i>Low Total Fertility Rate (TFR)</i> sebagai Dampak dari Pertumbuhan Ekonomi periode 2008 – 2013	1 – 14
<i>Semmy Tyar Armanda</i>	Dromologi Krida Yudha: Sebuah Analisis Percepatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi dalam Target Pemenuhan <i>Minimum Essential Force</i> Indonesia 2024	15 – 35
<i>Arin Fithriana</i> <i>Muhamad Fauzi Regianto</i>	Kebijakan Australia dalam Menangani Masalah <i>Asylum Seeker</i> dan <i>Refugees</i> pada Tahun 2001 – 2010	36 – 53
<i>Denik Iswardani Witarti</i> <i>Agi Noorman Hafidz</i>	Peredaran <i>Illegal Small Arms and Light Weapons (SALW)</i> di Kawasan Amerika Studi Kasus: Kolombia	54 – 65
<i>Ani Khoirunnisa</i> <i>Tuswoyo</i> <i>Ahmad Hidayat</i>	Keberhasilan Korea Selatan Mempertahankan Posisinya sebagai “Macan Asia”	66 – 89
<i>Ica Wulansari</i>	Membentuk Rezim Tata Perubahan Iklim Global	90 –103

STRATEGI SINGAPURA MENGATASI *LOW TOTAL FERTILITY RATE (TFR)* SEBAGAI DAMPAK DARI PERTUMBUHAN EKONOMI PERIODE 2008 – 2013

Jeanie Annissa¹, Nathania Dea Myrilla²
jeanieannissa@gmail.com, nathdeam@hotmail.com

Abstract

This paper discussed about a variety of Singapore government strategies to addressing their low total fertility rate. The phenomenon that happens is a product of engagement between the national economic growth against fertility and also how women's role take a part in this issue. Singapore has a rapid economic growth and it's connected until the problem turns into a paradox which is complicated to resolved, the government itself need to struggle to hit their target. The pro-natalist strategies done by Singapore government from more than decades, it is works but still far from their expectation. Worries about the impact of decreasing TFR, government is aiming to keep sustainable development steady and clean out the national security threaten from internal factors. Another thing that can be seen is how the link between the because of TFR with government policies established.

Keywords: *total fertility rate, economic erowth, Singapore government strategies.*

Pendahuluan

Ekonomi Singapura mengalami percepatan pertumbuhan selama beberapa dekade terakhir sehingga berhasil menjadi salah satu negara yang memiliki GNI (*Gross National Income*) per kapita terbesar di Asia Tenggara. Data World Bank mencatat GNI Singapura pada tahun 2008 per kapita sebesar \$USD 60,390 dan di tahun 2013 telah mencapai \$USD 76, 850³, meskipun di tahun 2009 mengalami penurunan terlebih dahulu, tetapi hal tersebut dapat diatasi Singapura di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2012, pendapatan perkapita GDP (PPP) Singapura menempati peringkat kelima setelah Luksemburg, Makau, Qatar, dan Norwegia⁴. Singapura memiliki kekuatan dalam bisnis dan mengandalkan sektor-sektor seperti manufaktur, *trading*, niaga, bioteknologi, perbankan, *service*, dan sejenisnya sebagai penggerak ekonomi mereka.

Produktivitas ekonomi Singapura menunjukkan keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai indikator dari pembangunan berkelanjutan. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak selalu menghasilkan keuntungan positif semata bagi suatu negara melainkan juga menimbulkan sebuah dilema dan tantangan tersendiri yang dapat

¹ Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta

² Alumnus Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta

³ "World Development Indicators". World Bank Data. (<http://databank.worldbank.org/data/home.aspx>). Diakses pada 1 July 2014.

⁴ "GDP per capita, PPP (current international \$)". World Bank. *World Development Indicators database*. (<http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators>). Diakses 25 Maret 2014.

menjadi bumerang. Bahwasanya, dalam arah meningkatkan pembangunan negara juga berpengaruh terhadap aspek-aspek lain seperti sosial, pendidikan, industrialisasi, modernisasi, dan sebagainya. Hal-hal tersebutlah yang dapat menjadi tantangan bagi Singapura sebagai negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Salah satu aspek yang mempengaruhi Singapura adalah persoalan demografi, lebih jelasnya lagi yaitu dalam hal *total fertility rate*. *Total fertility rate (TFR)* juga memiliki peran yang dibutuhkan negara untuk menjaga *sustainable development* dalam jangka waktu panjang sehingga proses pembangunan dapat terus berjalan. Populasi atau penduduk merupakan salah satu unsur terbentuknya sebuah negara. Jika negara mengalami pengurangan populasi sebagai salah satu komponen terpenting, maka secara *de jure* negara dalam kondisi *low power* secara hukum internasional. Negara yang memiliki penduduk sedikit sering lebih lemah kedudukannya daripada negara yang memiliki banyak penduduknya⁵. Dilema yang dihadapi oleh Singapura adalah saat ekonomi dan industri tengah maju dan menciptakan kenyamanan hidup oleh seluruh masyarakat, tetapi dapat juga menimbulkan konsekuensi-konsekuensi tersendiri terhadap keinginan warga negara mereka untuk menambah jumlah anak yang dilahirkan.

Dikutip dari *The Quality of Growth* yang ditulis oleh Vinod Thomas, sebuah studi belakangan ini yang dilakukan oleh *Voices of the Poor: Can Anyone Hear Us?* (Narayan et.al, 2000) menunjukkan bahwa meningkatnya pendapatan merupakan salah satu bagian dari pengurangan kemiskinan. Rasa aman yang lebih besar dalam kehidupan dan lingkungan yang lebih lestari⁶. Pendapatan masyarakat Singapura yang bertambah membuat individu-individu menjadi lebih nyaman dalam ruang lingkup kerja mereka. Dengan demikian cara berpikir dan perilaku turut mengalami perubahan seiring dengan tingkat kemandirian yang semakin tinggi (khususnya untuk wanita yang berkarir).

“As one of the fastest aging populations in Asia, Singapore faces the challenge of developing public policies to accommodate this changing age structure. Currently 7% of Singapore’s population is over the age of 65, however, by 2030 this will increase to 19%”. (Inter Ministerial Committee on Aging Report 1999).⁷

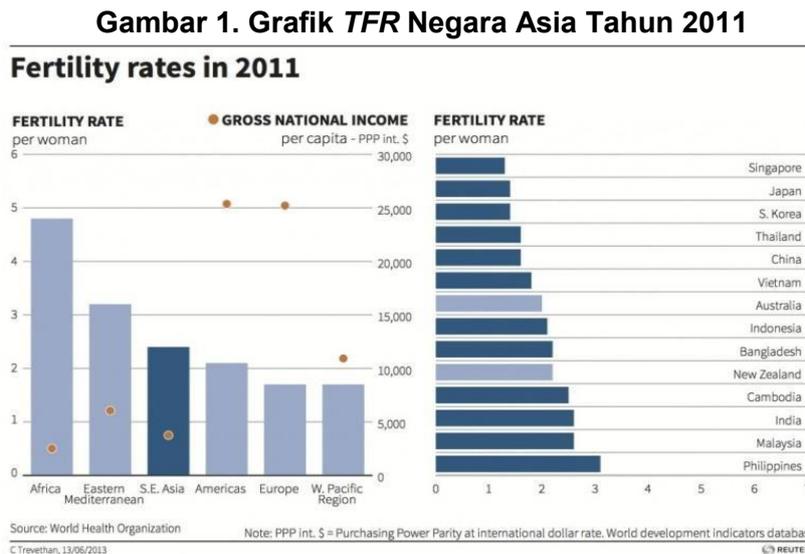
Kutipan di atas dapat diartikan, bahwa sebagai salah satu penuaan populasi tercepat di Asia, Singapura menghadapi tantangan dalam mengembangkan kebijakan publik untuk mengakomodasi perubahan struktur usia. Di tahun 2030 diramalkan usia di

⁵ Budiardjo, Miriam. (1978). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hal.43

⁶ Thomas, Vinod. Et al. (2000). *The quality of growth*. The International Bank of Reconstruction. hlm 29

⁷ Chan, Angelique. “Singapore’s Changing Age Structure and the Policy Implications for Financial Security, Employment, Living Arrangements, and Health Care”. *Asian Meta Centre Research Paper Series* no.3 hal.1
Transnasional Vol.9 No.1 Juni 2014

atas 65 tahun meningkat hingga 19%. Berdasarkan data WHO, pada tahun 2011 Singapura menjadi negara dengan angka fertilitas terendah mengalahkan Jepang dan Korea Selatan, dengan demikian hal ini menjadi acuan sebagai fokus pemerintah untuk meningkatkan fertilitas negara mereka sehingga berdampak pada kenaikan-kenaikan *total fertility rate (TFR)* di masa mendatang. Data tersebut bisa dilihat pada gambar grafik yang ada di halaman selanjutnya.



Pemerintah Singapura dihadapi oleh perubahan perilaku sosial dan budaya dari penduduk asli (*Singapore citizen*) yang kini mengubah pola hidup mereka menjadi lebih modern dan mandiri terutama wanita. Perilaku sosial wanita Singapura saat ini mempengaruhi bagaimana status *total fertility rate (TFR)* tahun demi tahun. Berdasarkan data statistik yang diambil dari situs resmi pemerintah Singapura (singstat.gov.sg)⁸ pada tahun 2013, *total fertility rate (TFR)* Singapura tercatat hanya 1.29 saja, sedangkan angka ini jauh dari harapan pemerintah yang menargetkan angka di poin 1.4 hingga 1.5⁹. Wanita Singapura telah memberikan kontribusi sendiri terhadap negara dan juga keluarga akibat dari meningkatnya pendidikan dan tingkat partisipasi wanita dalam bekerja. Kathleen Campbell dan Audrey Chia dalam bukunya *The Three Paradoxes Working Woman in Singapore* menyebutkan bahwa dalam perkembangannya, keberhasilan kontribusi wanita karir di Singapura justru harus menghadapi dilema ditingkat nasional, sosial, dan juga dalam organisasi.

⁸ Singapore Statistic Website. <http://www.singstat.gov.sg/statistics/browse-by-theme/births-and-deaths>. Births and Deaths. Total Fertility Rate Statistic. Diakses 25 Maret 2014

⁹ "Singapore's total fertility rate slips again in 2013" http://news.xinhuanet.com/english/health/2014-01/30/c_133085388.htm. Diakses 19 Maret 2014

Wanita Singapura diharapkan untuk bisa lebih produktif di dua 'kehidupan', kehidupan dunia kerja dan kehidupan rumah tangga. Dikarenakan terbatasnya pekerja maka ada kebijakan yang mendorong wanita berperan dalam karir dan juga mendorong para wanita untuk mempunyai anak lebih banyak akibat merosotnya jumlah angka kelahiran¹⁰. Pertumbuhan ekonomi Singapura yang cepat memicu bertambah besarnya biaya dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier setiap individunya. Sehingga para wanita karir yang disibukkan dengan maksud untuk *survive* memenuhi kebutuhan itu semua, tidak memikirkan bahkan cenderung melupakan keinginan mereka untuk menikah dan memiliki anak. Sedangkan untuk para wanita yang sudah memiliki satu anak dan memiliki karir, banyak yang tidak ingin menambah keturunan mereka karena berbagai alasan diantaranya, kesibukan dan tanggung jawab yang akan semakin besar untuk ditanggung.

Pemerintah Singapura sendiri dari masa pemerintahan PM Lee Kuan Yew sudah menaruh perhatian yang cukup untuk masalah ini. Kekhawatiran pemerintah Singapura akan rendahnya *total fertility rate (TFR)* ini diawali pada masa jabatan Lee Kuan Yew hingga Lee Hsien Loong. Singapura khawatir dengan jumlah citizen asli mereka yang lebih sedikit dari *permanent resident* (penduduk tetap) tidak mampu menghasilkan generasi penerus, maka identitas bangsa akan perlahan menghilang. Akibat kebijakan Singapura dalam menambah tenaga kerja asing mereka, berdampak terhadap ledakan jumlah imigran dan *expatriate* dari seluruh dunia yang bermukim namun tidak menjadi warga negara Singapura.

Dalam beberapa tahun terakhir ini isu *total fertility rate (TFR)* Singapura kembali menjadi perhatian setelah angka kelahiran sekarang mencapai titik terendah sepanjang sejarah pada 2005, misalnya angka ini adalah 1,24 sama dengan tahun sebelumnya.¹¹ Hal ini menyiratkan bahwa setiap tahunnya ada kekurangan 14.000 bayi bila dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan hanya untuk menstabilkan populasi Singapura¹². Pemerintah Singapura sudah mulai membuat kebijakan terkait peningkatan *TFR* mereka dengan cara memberikan pendidikan kepada wanita Singapura dan memberikan potongan pajak yang cukup banyak untuk mendorong mereka mempunyai anak lebih banyak selain itu juga didorong melalui penyediaan biro jodoh berlisensi dari pemerintah sejak masa pemerintahan Lee Kuan Yew. Namun hasil yang dicapai masih

¹⁰ Campbell, K. & Chia, A. (1999). The Three Paradoxes: Working Women in Singapore, Singapore: Association of Women for Action and Research. Mehraj Jahan (reviewed). Research And Practice in Human Resource Management (Curtin University of Technology) <http://rphrm.curtin.edu.au/1999/issue1/jahan.html>. Diakses 25 Maret 2014

¹¹ Backman, Michael. (2008). Asia Future Shock. Jakarta: UFUK PRESS. Hal. 16 (dapat juga dilihat pada AFP, "Singapore aims to attract migrants as birthrate at all time low")

¹² Ibid. hal 16

belum maksimal, kini Singapura masuk ke dalam daftar *TFR* negara Asia yang paling rendah.

Strategi pro-Natalis Singapura

Strategi merupakan rangkaian cara untuk menuju tercapainya suatu tujuan sedangkan pronatalis merupakan sebuah perspektif yang mendukung upaya peningkatan jumlah kelahiran. Strategi pro-natalis merupakan bentuk dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah Singapura, untuk meningkatkan jumlah kelahiran bayi per wanita di masa suburnya (masa produktif). Bahwasanya kebijakan pro-natalis suatu negara dibuat berdasarkan adanya 2 alasan; **pertama**, karena biasanya negara tersebut mengalami atau memiliki penuaan populasi, artinya jumlah usia produktif negara tersebut jauh lebih sedikit penduduk dengan usia di atas 60 tahun/ generasi *baby boomer* yang berusia 65 tahun ke atas.

Akibat yang ditimbulkan bisa berupa pembengkakan anggaran negara. Pemerintah harus lebih banyak menanggung beban dalam *eldery budget* (pembiayaan hidup dan sebagainya). **Kedua**, akibat dari perekonomian yang aktif dan mobilitas yang tinggi dan berujung pada modernitas individu. Sebelumnya Singapura memang menganut perspektif *anti-natalist* seperti Cina yang memiliki pertumbuhan penduduk tertinggi di dunia pada zaman itu. Singapura pernah memiliki jumlah total anak yang dilahirkan per wanita atau *total fertility rate (TFR)* yang cukup tinggi yaitu sekitar 6 bayi per wanita.

Dengan kekhawatiran akan banyaknya pengangguran dan ketidakmampuan negara dalam memfasilitasi padatnya penduduk maka pemerintah Singapura mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi keinginan masyarakat memiliki anak lebih banyak lagi. Konsep dari *anti-natalist* tersebut berujung pada aturan dengan program KB (Keluarga Berencana), pelegalan alat kontrasepsi dan aborsi, kampanye-kampanye dengan slogan-slogan yang ditaruh di tempat-tempat seperti rumah sakit dan klinik. Selain itu pemerintah tidak memberikan prioritas terhadap keluarga dengan jumlah anggota banyak yang hendak memiliki HDB. Keberhasilan pun dicapai oleh pemerintah dengan menurunnya jumlah bayi yang dilahirkan pada tahun 1970. Seiring dengan kemajuan ekonomi, setelah tahun 1970an masa *anti natalist* hilang dan digantikan dengan konsep *pro natalist*. Untuk mengatasi jatuhnya tingkat kelahiran akibat kebijakan sebelumnya dan restruksi ekonomi negara, pemerintah memfokuskan kepada strategi yang mempromosikan perkawinan dan kelahiran anak sejak tahun 1980an. Menanggapi kondisi tersebut, *New Population Policy (NPP)* diluncurkan pada Maret 1987, yang slogan utama berbunyi "*Have Three or More Children If You Can Afford It*".

Pendekatan kebijakan yang baru mencoba untuk menghindari nada-nada elitis, dengan mengganti kata 'kriteria' dengan 'keterjangkauan', sehingga mengesampingkan penekanan pada kualifikasi pendidikan (Perry et al, 1997)¹³. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa orang-orang tanpa pendidikan menengah bisa menebus kurangnya pendidikan mereka dengan "ketekunan, kerja keras, bakat khusus, keterampilan", dan "mungkin bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari mereka yang mencapai di tingkat universitas" dan karena itu "dapat mendukung anak-anak mereka "(Deputi Pertama Perdana Menteri Goh Chok Tong, kemudian yang dikutip dalam *The Straits Times*, 2 Maret 1987)¹⁴.

Pemerintah Singapura dianggap terlalu dalam melakukan intervensi kepada warga negara mereka dan masyarakat. Intervensi yang dilakukan tidak dilakukan secara langsung, memaksakan setiap warga negaranya untuk memiliki anak secara langsung, maka dengan kata lain mereka harus menawarkan insentif-insentif (pendorong atau pemicu) berupa bonus atau bantuan Dana agar seseorang tidak lagi terbebani dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka jika memiliki anak atau berkeluarga.

Social Development Network

Strategi Pemerintah Singapura yang pertama yaitu berupa pendekatan-pendekatan secara halus dengan membentuk program-program melalui badan seperti seperti *Social Development Network* (SDN) atau yang sebelumnya dikenal dengan nama *Social Development Unit* (SDU) merupakan badan atau lembaga di bawah Departemen Pengembangan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga Singapura (sekarang Kementerian Sosial dan Pembangunan Keluarga)¹⁵, yang bekerja sama dengan elemen masyarakat dan komersial untuk mendorong dan membuka peluang bagi para lajang untuk bisa berinteraksi dalam pengaturan sosial di Singapura.

Selain mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan kencan yang ditawarkan oleh sektor swasta, *Social Development Network* (SDN) berfungsi untuk mendidik masyarakat tentang isu-isu gaya hidup seperti melajang atau *singlehood*. Tanggung jawab lain dari *social development network* (SDN) yaitu dengan menyediakan infrastruktur yang diperlukan dan dukungan untuk industri kencan, serta untuk menjamin legitimasi lembaga kencan melalui dewan akreditasi yang dibentuk pada tahun 2007. Ketika pertama kali didirikan pada tahun 1984 sebagai *social development unit* (SDU), berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan bagi para anggotanya tanpa bantuan lembaga komersial.

¹³ Theresa Wong & Brenda Yeoh. Op, cit hal 12

¹⁴ Op, cit

¹⁵ "Social Development Network. Ministry of Social and Family Development"

<http://app.msf.gov.sg/AboutMSF/OurPeople/DivisionsatMSF/FamilyDevelopmentandSupport/SocialDevelopmentNetwork.aspx> diakses pada 9 Juli 2014

Upayanya melalui mempromosikan pernikahan dengan target para kaum muda yang berstatus *undergraduate*. Melalui unit ini dipersiapkan sejumlah program-program untuk mempermudah individu-individu yang sudah siap untuk menikah atau memiliki pasangan.

Sebagai bentuk upaya pemerintah meningkatkan jumlah pernikahan, pada tahun 2006 kemudian *social development unit* (SDU) memutuskan adanya perubahan besar dalam pendekatan yaitu dengan membiarkan sektor swasta menjadi penyedia utama jasa perjodohan dan kencan (*Dating Industry* atau *Services*), bukan fokus pada akreditasi dan pendanaan lembaga kencan pribadi dan proyek. Hal ini dilakukan dengan harapan untuk bisa menciptakan suasana kencan yang tidak seperti biasa dan memungkinkan kaum *single* untuk memiliki lebih banyak pilihan dalam berinteraksi dengan orang lain dari tingkat pendidikan yang berbeda. Peran dari penyediaan *dating agency* seperti ini adalah sebagai penghubung atau wadah untuk konsultasi diri sendiri atau dengan pasangannya, selain itu berperan dalam mempertemukan individu-individu yang tidak memiliki kesempatan menemukan pasangan dengan cara sendiri sehingga membutuhkan jasa dari agensi tersebut.

Hasil yang di terima pada mulanya memang sangat lambat yang kemudian membuat efektivitas *social development unit* (SDU) dipertanyakan oleh publik dan anggota parlemen, karena tentunya juga pemerintah memberikan dana dalam anggaran tahunan. Lebih lanjut, kekecewaan terlihat berdasarkan pada ketidakseimbangan jumlah anggaran dengan sasaran yang diharapkan masih sangat jauh dari target pemerintah. Barulah akhir dekade pertama di tahun 2003, SDU melaporkan peningkatan yang signifikan dalam angka pernikahan bagi para anggotanya selama bertahun-tahun, dari 2.789 pada tahun 1999 menjadi 4.050 pada tahun 2003. Selama 2 dekade pertama sejak *social development unit* (SDU) pertama kali didirikan, lebih dari 33.000 anggota yang menikah¹⁶. Manfaat dari *social development unit* (SDU) tidak hanya untuk menambah *TFR* saja, namun juga bagaimana membuat wanita yang telah menikah kemudian ingin untuk menambah jumlah anak yang dimiliki. Melalui *social development unit* (SDU) banyak sekali program-program berupa *pro family measure*.

Marriage and Parenting Package

Strategi pemerintah tidak hanya berhenti dalam pembentukan badan seperti *social development unit* (SDU) atau *social development network* (SDN) saja namun juga memberikan banyak anggaran dalam insentif-insentif bagi pasangan yang sudah menikah dan memiliki anak. Kinerja pemerintah Singapura dalam memelihara, menjaga

¹⁶ SDU Annual Report, <http://app.msf.gov.sg/portals/0/Summary/research/FMS-Annual-Report-2001-2002.pdf> diakses pada 6 Juni 2014.

dan melayani masyarakatnya secara bijaksana tercermin dalam banyaknya perangkat-perangkat tambahan guna mengajak warga Singapura untuk mau memiliki anak lebih banyak. *Marriage and Parenting Package* ini sebagian besar berisi bantuan-bantuan langsung dan perangkat-perangkat tambahan dari pemerintah untuk seluruh warga negara Singapura tanpa terkecuali, sehingga keluarga tidak diberatkan dengan kewajiban-kewajiban finansial yang cukup besar. Perangkat tambahan tersebut bertujuan untuk:

- a) Membuat lebih cepat dan lebih mudah bagi pasangan yang sudah menikah untuk mendapatkan perumahan sehingga mendukung pernikahan dini dan kelahiran;
- b) Memberikan dukungan untuk biaya medis berkaitan dengan konsepsi dan biaya pengiriman;
- c) Membiayai lebih jauh biaya membesarkan anak, termasuk biaya kesehatan;
- d) Membantu pasangan meningkatkan langkah-langkah bagi pasangan bekerja untuk menyeimbangkan pekerjaan dan komitmen keluarga; dan
- e) Sinyal untuk ayah agar memainkan peran lebih besar dalam membesarkan anak.¹⁷

Untuk memelihara keseimbangan harmoni antara bekerja dan rumah tangga, pemerintah mengeluarkan anggaran untuk *Government-Paid Maternity Benefit Scheme* yang menawarkan bantuan mulai dari biaya melahirkan hingga 'gaji' saat cuti hamil dengan melewati beberapa ketentuan terlebih dahulu. Untuk mendukung paket ini pemerintah Singapura menyediakan tabungan medis yang bernama *Medisave*. Menurut *website* resmi Singapura,¹⁸ *Medisave* merupakan paket bersalin berupa biaya yang dapat digunakan pasangan hingga berjumlah \$450 dari *Medisave* untuk membayar biaya pramelahirkan seperti konsultasi, *ultrasound scan*, tes, dan obat-obatan.

Untuk anak-anak kelima dan selanjutnya, pasangan akan perlu untuk memiliki keseimbangan *saldo Medisave* setidaknya \$15,000 pada saat kelahiran sebelum mereka dapat menggunakan *Medisave* mereka untuk membayar biaya sehingga orang tua mungkin memiliki perlindungan untuk kebutuhan masa depan mereka sendiri (khususnya masa pascapensiun)¹⁶. Selain akibat peran dalam ketenagakerjaan yang memiliki pendidikan tinggi sehingga mengabaikan rasa untuk berkeluarga selain ada faktor lain yang turut terlibat. Dalam perspektif kesehatan, wanita yang tidak memiliki anak atau tidak bisa memiliki anak setelah menikah dikarenakan adanya masalah pada sistem reproduksi mereka. Hal ini kemudian yang dimanfaatkan *Medisave* untuk membantu permasalahan tersebut melalui *Assisted Conception Procedures (ACP)*.

¹⁷ Press Release. Enhance Marriage and Parenthood Package Support 21 Jan 2013. <http://www.nptd.gov.sg/> Diakses pada 6 Juni 2014. Dapat dilihat juga *Medisave Package*. http://heybaby.sg/havingchildren/maternity_package.html Diakses pada 6 Juli 2014

¹⁸ www.heybaby.sg, diakses tanggal 30 Desember 2014 jam 11.45

Tidak semua wanita mudah untuk mencapai proses kehamilan di masa muda terlebih lagi ketika sudah beranjak tua. *Assisted Conception Procedures* (ACP) merupakan teknologi seperti *Assisted Reproduction Technology* (ART) yaitu teknologi bantuan reproduksi. Dengan melakukan pengobatan, maka dapat membantu pasangan yang memiliki kesulitan dalam kehamilan. Untuk membantu pasangan membiayai perawatan *Assisted Conception Procedures* (ACP) yang lebih baik, mereka dapat menarik dari *Medisave* mereka, sebesar \$6.000, \$5.000 dan \$4.000 untuk yang pertama, kedua dan ketiga atas masing-masing penarikan. Mereka dapat menggunakannya untuk perawatan seperti pembuahan fertilisasi in-vitro (IVF) dan inseminasi intra-uterus (IUI). Tingkat keberhasilan prosedur konsepsi cenderung dibantu dengan usia. Pasangan disarankan tidak menunda memiliki anak dan untuk mencari pengobatan lebih awal apabila mereka memiliki kesulitan kehamilan.

Baby Bonus

Pendekatan ini lebih halus dari pendekatan sebelumnya yang terkesan kurang mendekati masyarakat. Kebijakan *baby bonus* ini dibuat oleh PM Lee Kuan yew pada tahun 2001 hingga saat ini masih digunakan untuk membantu keluarga dalam membiayai biaya membesarkan anak. Ini terdiri dari hadiah uang tunai dan *Child Development Account* (CDA), skema *co-tabungan* khusus untuk anak-anak, jadi dalam hal ini orang tua yang mengatur tabungan tersebut untuk keperluan anak mendatang.

Pemerintah memberikan secara langsung dengan ketentuan-ketentuan misalnya kelahiran anak pertama dan anak kedua akan mendapat 4,000/6,000 dollar sesuai dengan tanggal lahir yang ditetapkan, begitu pula dengan anak ketiga dan keempat. Dengan demikian semakin banyak jumlah anak yang dilahirkan, otomatis semakin besar jumlah bonus uang yang diberikan.

Tabel 2. Ketentuan dan Jumlah *Baby Bonus*

Enhanced Baby Bonus Cash Gift

Child Order	Born between 17 Aug 2008 and 25 Aug 2012 (for each child)	Born on or after 26 Aug 2012 (for each child)
1st & 2nd Child	\$4,000	\$6,000
3rd & 4th Child	\$6,000	\$8,000

Sumber: http://www.heybaby.sg/havingchildren/baby_bonus.html. Diakses 18 Juni 2014

Baby bonus CDA dikeluarkan bersamaan dengan *baby bonus scheme* namun memiliki ketentuan dan jumlah yang berbeda. *Baby bonus* CDA adalah skema *co-tabungan* untuk anak-anak, bahwa tabungan disimpan oleh orang tua ke dalam rekening

tabungan khusus yang disebut CDA¹⁹. Sama seperti *baby bonus*, CDA *Government Co-Savings Caps* memberikan bonus berupa tabungan dari 6,000 dollar hingga 18,000 dollar berdasarkan urutan anak yang telah dilahirkan.

Tabel 3. Ketentuan dan Jumlah CDA

CDA Government Co-Savings Caps

Child Order	From 17 Aug 2008 onwards (for each child)
1 st & 2 nd Child	\$6,000
3 rd & 4 th Child	\$12,000
5 th Child & beyond	\$18,000

Sumber: http://www.heybaby.sg/havingchildren/baby_bonus.html. Diakses 18 Juni 2014

Foreign Worker Talent

Kebijakan lain yang memiliki kontroversi adalah dimana pemerintah harus memanfaatkan tenaga kerja asing yang datang untuk menambah populasi negara mereka. Akibat penurunan *TFR* yang semakin jatuh, pemerintah membuka kesempatan bagi para pekerja profesional yang ingin tinggal dan bekerja di Singapura. Di satu sisi kebijakan ini membantu peningkatan populasi karena Singapura merupakan daya tarik yang besar bagi para pekerja asing yang datang dikarenakan pendapatan yang diterima terbilang besar, sehingga semakin banyak pendatang-pendatang yang bekerja atau pun memiliki serangkaian kepentingan yang mengharuskan mereka untuk menetap di negara itu.

Memanfaatkan hal itu, tujuan dari Singapura menerima pekerja-pekerja profesional dari luar adalah selain membantu tingkat produktivitas ekonomi, juga menawarkan kepada sejumlah penduduk asing yang menetap lebih dari 5 tahun untuk menerima kewarganegaraan Singapura, dengan begitu pemerintah Singapura secara tidak langsung merekayasa jumlah populasi warga negara mereka. Kekurangan dari cara ini adalah timbulnya rasa iri atau kesinisan warga negara yang benar-benar asli dengan warga asing.

Ada hal-hal yang menjadi landasan seperti kuota dalam lapangan kerja yang seharusnya untuk warga negara Singapura menjadi berkurang karena *skill* atau kompetensi yang dimiliki mereka masih kurang dibandingkan tenaga kerja asing, terlebih lagi pemerintah tidak memprioritaskan hak warga negara mereka untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dibandingkan tenaga asing yang mungkin jauh lebih berkualitas.

¹⁹ Baby Bonus Scheme. http://www.heybaby.sg/havingchildren/baby_bonus.html Diakses pada 6 Juni 2014
Transnasional Vol.9 No.1 Juni 2014

Akibatnya selain bisa dilihat dari padatnya penduduk asing yang bermukim di Singapura juga akan membuat warga negara mereka untuk mencari peruntungan di negara lain.

Usaha dari pemerintah yang menyediakan anggaran besar dalam memberikan bonus-bonus ataupun bantuan biaya melahirkan dan proses kelahiran ditanggapi secara positif oleh warga Singapura, namun tidak jarang yang masih beranggapan bahwa bantuan pemerintah ini masih tidak dapat membantu mereka meringankan beban biaya hidup yang tinggi. Dalam sebuah wawancara *survey*, terdapat wanita yang masih tidak ingin memiliki anak karena faktor stress yang tinggi dan kesibukan yang dia lakukan akan berdampak buruk jika ia tidak memberikan waktu lebih kepada anaknya.

Selain itu ada satu dari wanita yang menyebutkan bahwa seandainya pemerintah menambahkan jumlah bonus atau tabungan dan biaya melahirkan atau kehamilan, dia berkeinginan untuk menambah 1 atau 2 anak di kemudian hari. Strategi pemerintah menggunakan skema-skema bantuan seperti ini tidaklah sedikit, strategi pemerintah Singapura dalam menjaga kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan angka kelahiran terbagi-bagi dalam suatu pola. Seperti dalam melakukan pendekatan untuk menambah jumlah pernikahan dapat melalui SDN yang menyediakan konsultasi serta biro jodoh berlisensi sebagai upaya untuk memfasilitasi individu yang membutuhkan, kemudian memberikan kemudahan dan prioritas dalam mendapatkan rumah atau HDB bagi pengantin baru atau pasangan yang akan menikah dengan menyediakan pengajuan CPF (*Central Provident Fund*) yang bisa digunakan untuk membayar HDB.

Sedangkan pendekatan agar seluruh masyarakat memiliki anak atau bayi, pemerintah memberikan penawaran berupa *Medisave Maternity Package* seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kemudian membantu penanganan dalam masalah reproduksi melalui ART, terakhir dengan *Medisave ACP*. Hal tersebut cukup membantu dilihat dari kenaikan *TFR* Singapura di tahun 2013. Yang tidak kalah penting dan menjadi kendala bagi wanita-wanita Singapura untuk memiliki anak adalah biaya perawatan dalam membesarkan banyak anak. Disini pemerintah kembali memberikan sejumlah pilihan yang paling populer yaitu, pertama dengan memberikan *baby bonus*, kemudian *tax rebates* yang digunakan oleh para orang tua untuk mendapatkan pajak rabat yaitu para orang tua dapat mengklaim sebesar \$5,000 untuk anak pertama, \$10,000 anak kedua dan \$20,000 untuk semua anak yang berikutnya²⁰. Dengan demikian pemerintah

²⁰ Pro-Family Measures <http://www.population.sg/resources/summary-marriage-parenthood-measures/#.U7scPZSSzng> diakses pada 6 Juli 2014

berasumsi masyarakat tidak lagi harus dibebani dengan biaya perawatan dalam membesarkan anak.

Kemudian yang tidak kalah penting adalah pemerintah membuat skema dalam *work-life support*. *Work-life support* diperuntukkan bagi para orang tua yang bekerja, dengan memberikan pendekatan melalui *maternity leave* atau yang disebut cuti hamil selama setidaknya 16 minggu, lalu *child care leave* dimana orang tua yang memiliki anak berusia di bawah 7 tahun diberikan jatah cuti selama 6 hari per tahun dengan tetap diberikan gaji, serupa dengan *child care leave* ada yang disebut dengan *infant care leave* bahwa para orang tua yang memiliki anak di bawah 2 tahun akan diberikan jatah cuti 6 hari per tahun tanpa digaji.

Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, dan pembahasan, maka dapat dijelaskan strategi Pemerintah Singapura mengatasi *low total fertility rate (TFR)* sebagai dampak pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tahun 2008 hingga 2013 berupa strategi pronatalis yang meliputi pembuatan kebijakan-kebijakan yang bertujuan memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan kembali *TFR* di Singapura sebagai salah satu indikator berlangsungnya pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development*. Bentuk-bentuk kebijakan yang paling populer adalah pembentukan SDN, kemudian *baby bonus*, *Medisave package*, *Maternity Leave*, perekrutan pekerja profesional asing, dan lain sebagainya. Strategi-strategi tersebut merupakan bentuk dari pendekatan pemerintah Singapura untuk menarik minat masyarakatnya untuk memenuhi permintaan mereka yaitu menambah populasi.

Pemerintah Singapura berjuang keras selama beberapa dekade terakhir dan isu ini kembali menjadi sorotan pemerintah dalam beberapa tahun belakangan. Pemerintah berupaya keras mengatasi masalah tersebut, karena akan menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional dan menurunnya angkatan kerja, meningkatnya anggaran dana untuk lansia, populasi yang menua, kurangnya angkatan bersenjata, produktifitas ekonomi dan industri yang menurun sehingga berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, berkurangnya jumlah pasar sehingga tidak ada investasi asing masuk.

Hal-hal inilah yang kemudian menjadi landasan mengapa pemerintah Singapura selalu memberikan insentif-insentif pada masyarakat mereka terutama warga negara Singapura untuk memberikan efek tenang supaya tidak memikirkan biaya yang terkait dengan kelahiran bayi, biaya perawatan, dan sebagainya. Namun, ternyata tidak semua kebijakan yang dilakukan memiliki dampak yang signifikan bahkan kebijakan tersebut

harus dicabut karena tidak mendapatkan respon positif bahkan cenderung tidak adil terhadap beberapa kelompok masyarakat.

Semua kebijakan pemerintah yang telah diterapkan saat ini pada dasarnya memberikan keuntungan-keuntungan bagi masyarakatnya namun dengan tingginya gaya hidup dan daya beli masyarakat yang bertambah, sehingga mempengaruhi cara berpikir masyarakat (lebih individualis) untuk berkeluarga. Hal ini yang menjadi hambatan atau kendala pemerintah meskipun banyak anggaran dana yang diberikan untuk departemen sosial melalui sejumlah bonus-bonus seperti yang telah disebutkan. Masyarakat sendiri terbagi ke dalam kelompok pro dan kontra dengan pemerintah, karena pemerintah terlalu dianggap mengintervensi masalah yang menyangkut kehidupan pribadi warganya.

Saran

Melihat dari serangkaian strategi yang dilakukan pemerintah dalam bentuk permasalahan terletak pada begitu tingginya biaya hidup dan biaya untuk perawatan bayi, sehingga para wanita merasa terbebani dengan keadaan tersebut dengan menjadi tenaga kerja untuk memenuhi itu semua. Pemerintah seharusnya mengurangi tingginya biaya-biaya kehidupan seperti sekolah, penitipan anak, harga rumah, dan sebagainya. Bahwasanya *TFR* adalah permasalahan jangka panjang yang harus diatasi dengan kebijakan-kebijakan jangka panjang pula.

Referensi

- World Development Indicators*". World Bank Data. (<http://databank.worldbank.org/data/home.aspx>). Diakses pada 1 July 2014
- GDP per capita, PPP (*current international \$*)". World Bank. *World Development Indicators database*. (<http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators>). Diakses 25 Maret 2014.
- Budiardjo, Miriam. 1978. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Thomas, Vinod. Et al. 2000. *The Quality of Growth*. The International Bank of Reconstruct
- Chan, Angelique. *Singapore's Changing Age Structure and the Policy Implications for Financial*.
- Security, Employment, Living Arrangements, and Health Care. Asian Meta Centre Research Paper Series no.3.
- Department of Statistic Singapore. 2014. *Births and Deaths. Total Fertility Rate Statistic*. <http://www.singstat.gov.sg/statistics/browse-by-theme/births-and-deaths>.

Xinhua News. (30 Januari 2014). "Singapore's total fertility rate slips again in 2013"
http://news.xinhuanet.com/english/health/2014-01/30/c_133085388.htm. Diakses
19 Maret 2014

Campbell, K. & Chia, A. 1999. *The Three Paradoxes: Working Women in Singapore, Singapore: Association of Women for Action and Research*. Mehraj Jahan (reviewed). Research And Practice in Human Resource Management (Curtin University of Technology) <http://rphrm.curtin.edu.au/1999/issue1/jahan.html>. Diakses 25 Maret 2014

Backman, Michael. 2008. *Asia Future Shock*. Jakarta: UFUK PRESS. Pada AFP, Singapore aims to attract migrants as birthrate at all time low.

Social Development Network. Ministry of Social and Family Development"
<http://app.msf.gov.sg/AboutMSF/OurPeople/DivisionsatMSF/FamilyDevelopmentandSupport/SocialDevelopmentNetwork.aspx>. Diakses pada 9 Juli 2014.

SDU Annual Report, <http://app.msf.gov.sg/portals/0/Summary/research/FMS-Annual-Report-2001-2002.pdf>. diakses pada 6 Juni 2014.

Press Release. Enhance Marriage and Parenthood Package Support,
<http://www.nptd.gov.sg/portals/0/news/Press%20Release%202013%20MP%20Package%20v2.pdf> diakses pada 21 Januari 2013.

<http://www.nptd.gov.sg>. Diakses pada 6 Juni 2014.

http://heybaby.sg/havingchildren/maternity_package.html. Diakses pada 6 Juni 2014.

www.heybaby.sg. Diakses pada 30 Desember 2014.

http://www.heybaby.sg/havingchildren/baby_bonus.html. Diakses pada 18 Juni 2014.

<http://www.population.sg/resources/summary-marriage-parenthoodmeasures>. Diakses pada 6 Juli 2014.

**DROMOLOGI KRIDA YUDHA: SEBUAH ANALISIS PERCEPATAN TEKNOLOGI,
INFORMASI, DAN KOMUNIKASI DALAM TARGET PEMENUHAN *MINIMUM
ESSENTIAL FORCE* INDONESIA 2024**

Semmy Tyar Armandha¹
semmytyar@gmail.com

Abstract

Dromologi Krida Yudha, is a term and the science of acceleration, that see in the present era of globalization and openness which has replaced the conflictual international system, war is still continues to be one of the potential interaction occurred which has been transformed its shape becomes more civilized, bloodless and bodyless; and therefore required a fundamental change in the increasingly need in technologised base defense and advanced elements of information and communication technology (ICT) in addition to fulfilling traditional weaponry. This paper will discuss how should Indonesia faces the strategic environment based dromology/acceleration is, in its military power standards (Minimum Essential Force). Thus, the revolution in technology, doctrine, and the organization of armies become the indicators needed in order to fulfill these targets.

Keywords: *dromology, Revolution in Military Affairs, Indonesia, Minimum Essential Force 2024*

“...a war that seeks only to destroy the enemy is unable today to support a new form of command; it must not only destroy life but also create it.”

-Michael Hardt dan Antonio Negri, *Multitude* (2004)

Pendahuluan

Berakhirnya Perang Dingin mengubah dan menggeser hampir sebagian besar pola interaksi dan hubungan antar negara yang oleh karenanya mengubah dan menggeser pula tatanan dan sistem internasional, yang memungkinkan banyaknya perubahan paradigmatik mengenai konsepsi ancaman. Perubahan dan pergeseran tersebut terutama ditemukan dalam paradigma interaksi peperangan yang menjadi keawatiran dan ketakutan utama negara-negara di dunia, dimana krisis nuklir yang terjadi pada era Perang Dingin menjadi landasan utamanya. Perang menjadi isu utama yang hampir diperbincangkan di seluruh dunia dan yang paling tidak diinginkan terjadi lagi.

Berubahnya paradigma peperangan yang semakin dihindari dan dijauhi oleh negara-negara tersebut, oleh karenanya melandasi pula kepentingan negara-negara untuk semakin menggiatkan perdamaian guna mendukung adanya globalisasi yang

¹ Alumnus Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur Jakarta. Penulis pada saat ini bekerja sebagai peneliti di Purusha *Research Cooperative* dan merupakan kandidat Magister Sains Pertahanan Program Studi Ekonomi Pertahanan, Universitas Pertahanan, Sentul, Jawa Barat.

mengutamakan kerjasama ekonomi agar tercapai pembangunan dan kesejahteraan. Hal ini yang memunculkan adanya gagasan mengenai *revolution in military affairs* atau revolusi persenjataan. Revolusi ini dimaksudkan pertama kali oleh Amerika Serikat setelah berakhirnya Uni Soviet pada 1990. Menangnya demokrasi liberal atas komunisme, memunculkan gagasan bahwa angkatan bersenjata harus semakin diminimalisir penggunaannya guna menghindari korban jiwa, dan menghindari perang itu sendiri. Donald Rumsfeld sebagai sekretaris pertahanan Amerika Serikat pada 2003 memiliki pemikiran agar dalam peperangan di masa depan tidak ada lagi pertumpahan darah yang mengerikan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara (Hardt & Negri, 2004). Revolusi persenjataan adalah jawabannya. Menggunakan peralatan tempur yang semakin canggih tidak memerlukan lagi banyaknya pasukan di lapangan selama ada koordinasi yang mumpuni dengan markas pusat. Peperangan generasi kelima ini, semakin tidak membutuhkan manusia dalam medan pertempuran.

Tidak hanya berhenti pada ketiadaan manusia dalam pertempuran, revolusi persenjataan juga semakin berkembang lagi ke arah dimana tidak ada korban jiwa ataupun korba luka sekalipun yang akan jatuh! Peperangan jenis ini memanfaatkan ruang bersama yang tidak bisa dimiliki (*to possess*) kedaulatan negara manapun (*the global commons*), yakni ruang *cyber*. Keberadaan ruang *cyber* yang mana menjadi ruang bagi mengalirnya informasi di dunia, menempatkan peperangan modern ke level yang lebih tinggi dan lebih elegan serta tersistematisasi dengan sangat canggih, dan yang pasti semakin *bodyless* (Hardt & Negri, 2004).

Dikaitkan dengan konteks Indonesia, terungkapnya aksi penyadapan pemerintah Australia terhadap pejabat-pejabat tinggi Negara Indonesia yang terungkap pada tahun 2013 oleh Edward Snowden, menjadi salah satu peringatan bahwa serangan *cyber* dapat sewaktu-waktu terjadi karena serangan tersebut berada pada area yang sama sekali virtual dan sulit dideteksi. Penyadapan yang dilakukan sejak 2009 ini disikapi oleh Indonesia sebagai pelanggaran norma-norma dan etika dalam hubungan internasional, dengan menarik duta besar dari Canberra. Namun sikap seperti ini tentu tidak mungkin dilakukan terus menerus mengingat praktik penyadapan oleh negara terhadap negara lain sejatinya punya sifat standar ganda. Hal ini dikarenakan praktik penyadapan dapat saja dijustifikasi sebagai salah satu doktrin pertahanan dan keamanan negara tersebut. Dalam hal ini, Australia menganggap praktiknya tersebut tidak lain hanya prosedur intelejen yang bertujuan mendeteksi ancaman terhadap keamanan nasional Australia.

Hal ini tentu harus disikapi secara lebih elegan dan tidak cenderung sereaktif sikap penarikan duta besar di negara yang diduga melakukan penyadapan. Karena dapat

dibayangkan jika sebagian besar negara-negara melakukan penyadapan di Indonesia karena Indonesia dianggap mengancam, apakah Indonesia harus memutuskan hubungan diplomatik ke negara-negara tersebut? Dengan kata lain, perlu strategi dalam menghadapi ancaman-ancaman tersebut dan tidak mengutamakan sikap yang reaktif, yakni dengan meningkatkan kewaspadaan dan menghimpun kekuatan agar dimungkinkan kewaspadaan tersebut sehingga ancaman dalam bentuk se-virtual apapun dapat ditangkal.

Dengan demikian, Indonesia dalam hal ini semakin dituntut untuk melangkah ke ranah pengembangan perang dengan jenis seperti ini dan dibutuhkan perhatian dalam hal anggaran dan kebijakan yang mendukung. Ancaman baik eksternal maupun internal, baik tradisional maupun non-tradisional, konvensional maupun non-konvensional, dan militer maupun nirmiliter; dapat mampu ditangani jika sistem komando dan kendali (siskodal) semakin mengadakan teknologi dan informasi. Meski manusia masih harus menjadi aktor utama dalam mempersiapkan kekuatan nasional, namun lingkungan strategis yang semakin gencar terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi pertimbangan yang kuat bagi adanya revolusi ke arah tersebut. Oleh karenanya, memfokuskan anggaran sebagai pengarah hasil pertumbuhan ekonomi kepada investasi modernisasi persenjataan, adalah hal yang sangat penting bagi Indonesia.

Anggaran Pertahanan dalam hal ini dapat dikatakan memiliki sisi yang berbeda: di satu sisi penting untuk pembiayaan alutsista, namun karena terbatas, banyak dihubungkan dengan faktor pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi secara garis besar adalah mengenai keterkaitan antara upaya pemenuhan kebutuhan hidup dan penanggulangan kelangkaan oleh suatu negara, dengan upaya membangun infrastruktur pertahanan dan keamanan guna menanggulangi ancaman yang bersifat dari luar maupun dari dalam. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang tumbuh perkonomiannya, mengalami dilema yang disebut dengan perdebatan *guns vs butter*. Perdebatan tersebut berputar seputar apakah pemerintah harus memprioritaskan pembangunan –yang mana bertujuan mendukung kesejahteraan ekonomi rakyatnya-, dan apakah pemerintah justru harus berfokus kepada pembangunan angkatan bersenjata beserta aparat-aparat keamanan lain guna menanggulangi ancaman terhadap kedaulatan yang dapat saja berasal dari negara lain ataupun kelompok-kelompok insurgensi, yang pada akhirnya juga mengancam kesejahteraan dan keamanan rakyat.

Dalam isu-isu *military expenditure* (belanja militer), terdapat apa yang disebut *Minimum Essential Force (MEF)* yang merupakan istilah untuk menggambarkan proyeksi dan target kebutuhan pemenuhan alutsista dan infrastruktur pertahanan suatu negara.

MEF, menurut Purnomo Yusgiantoro mantan Menteri Pertahanan RI 2009 – 2014, merupakan kebutuhan mendesak yang jika tidak dipenuhi maka taruhannya adalah kedaulatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa di satu sisi pemenuhan kebutuhan kesejahteraan rakyat adalah penting, namun di sisi lain terdapat kebutuhan pula untuk keamanan dan pertahanan yang jika tidak dipenuhi, akan berujung pada semakin besarnya ancaman terhadap kedaulatan suatu negara.

Rumusan Masalah

Lalu bagaimanakah pemerintah Indonesia seyogyanya menghadapi perdebatan-perdebatan tersebut yang justru cenderung memperlambat proses pemenuhan target *MEF*? Dengan strategi apa seharusnya Indonesia menjalankan proses pemenuhan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut dalam makalah ini, akan dibahas apa yang disebut dromologi ala Krida Yudha. Dromologi sendiri berasal dari terminologi yang diajukan oleh Paul Virilio untuk menggambarkan pentingnya sebuah ‘percepatan’ dalam era kapitalisme kontemporer saat ini, yakni kapitalisme fordis (pasca-revolusi industri) dan pasca-fordis (pasca krisis 1970-an) yang modus produksinya mengandalkan kecepatan produksi dan teknologi. Dromologi berasal dari kata *dromos* yang berarti berpacu dan *logos* yang berarti ilmu; dromologi berarti ilmu berpacu. Virilio menggunakan terminologi ini untuk menggambarkan perkembangan perang dan mesin perang (*war-machine*), dari perang berhadapan-hadapan, perang nuklir, sampai perang lewat kontrol komputer (Piliang, 2004) Sedangkan Krida Yudha adalah terminologi ala Indonesia yang diserap dari istilah *Revolution in Military Affairs*, dimana angkatan bersenjata suatu negara diharapkan dapat mengalami modernisasi dari yang tadinya fokus ke alat-alat berat dan pertempuran tradisional, kini menjadi fokus ke teknologi dan informasi sebagai medan pertempuran baru.

Dalam konteks ini, *dromologi Krida Yudha* mengacu pada percepatan pembangunan pertahanan yang mengacu pada tatanan dan pola-pola interaksi kapitalisme kontemporer yang berfiturkan percepatan dalam produksi. Pemenuhan target *MEF*, dengan demikian menjadi *locus* dan *focus* yang harus dilihat percepatan macam apa yang dapat mendukungnya. Argumennya sederhana, *bahwa untuk mencapai target pemenuhan tersebut, perlu difokuskan ke arah investasi teknologi yang bersemangatkan revolusi krida yudha, dimana revolusi tersebut sesuai dengan dromologi atau percepatan yang dibutuhkan untuk menghadapi ancaman-ancaman dan lingkungan strategis yang semakin berbasis teknologi informasi dan komunikasi*. Adapun indikator suatu negara melakukan revolusi terhadap persenjataannya, adalah ketika **teknologi, doktrin, dan**

organisasi militer negara tersebut mengalami perubahan signifikan pula. Oleh karenanya tulisan ini akan melihat pada ketiga aspek tersebut. Dari sisi teknologi militer, dilihat peran KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan) yang dapat dikatakan menjadi faktor penting guna menunjang perkembangan teknologi karena industri yang notabene menjadi motor penggerak utamanya. Dari sisi doktrin, KKIP berkontribusi dalam mengubah paradigma pertahanan ke arah pertahanan yang *technologised base* guna mencapai *war making capabilities* yang baru. Sedangkan dari sisi organisasi, adanya pembentukan kogabwilhan (komando gabungan wilayah pertahanan) adalah revolusi dalam hal manajerial organisasi, ditambah dengan pola hubungan sipil-militer yang berguna dalam menentukan koordinasi sipil-militer yang baik.

Pembahasan

MEF disusun berdasarkan tiga tahap pembangunan: Rencana Strategis tahap II (2010 – 2014), Rencana Strategis tahap III (2015 – 2019) dan Rencana Strategis tahap IV (2020 – 2024). Konsep *MEF* dianut oleh Indonesia sebagai bentuk partisipasi dalam perdamaian dunia, yakni hanya memenuhi kekuatan secara minimum di saat masa damai dan hanya dimaksimalkan ketika masa perang, yakni dengan menghimpun armada pasukan. *MEF* menitikberatkan pada modernisasi alutsista dan mewujudkan militer yang *technologised base*, dengan Kementerian Pertahanan yang mengemban tugas pokok dalam memimpin perwujudan hal tersebut dengan berbagai program kerja dan anggarannya (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kementerian Pertahanan RI tahun 2013, diakses dari <http://www.kemhan.go.id/kemhan/files/5a79d2011bccd166f7b7598e8a942c8f.pdf>, pada 23 Desember 2014)

1. *MEF* tahap I: tercapainya angkatan bersenjata yang mampu melaksanakan operasi gabungan, peningkatan kemampuan mobilitas TNI sehingga memiliki efek penggetar,
2. *MEF* tahap II: terwujudnya postur pertahanan dengan kesiapan alutsistas sebesar 80% dengan kemampuan terselenggaranya latihan dan operasi gabungan trimatra terpadu,
3. *MEF* tahap III: indikator kesiapan alutsista sebesar 100%, mampu melaksanakan operasi gabungan trimatra dan meningkatnya efek deteren (<http://ranahan.kemhan.go.id/detail.php?rid=12>, diakses pada 3 Januari 2015).

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Kemhan dan TNI menetapkan 17 indikator kinerja utama (IKU) sebagai alat untuk mengukur tingkat keberhasilan maupun

kegagalan dalam sasaran pencapaian yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pencapaian tersebut melibatkan sinergi antara: Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

Namun, dalam pemenuhan target yang memanfaatkan anggaran negara tersebut, yang terwujud dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang memang pada dasarnya adalah anggaran rakyat bukan anggaran pemerintah; seringkali mengalami polemik dalam penggunaannya. Dalam debat tarik-menarik antara pengeluaran sipil dan militer, anggaran dalam hal ini menjadi sesuatu yang didebatkan maknanya. Karena anggaran adalah pada dasarnya kebutuhan rakyat, maka seyogyanya kepentingan penganggaran harus berdasarkan pengabdian kepada rakyat. Oleh karenanya pengeluaran kepada TNI dianggap harus melandaskan pada kepentingan memenuhi pertahanan dan keamanan rakyat.

Perdebatan perebutan anggaran ini sering di-*over generalized* kepada oknum-oknum TNI yang berbisnis di Indonesia, karena terdapat larangan berbisnis kepada tentara di Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 1974. Adanya tentara yang berbisnis oleh karenanya melahirkan kecurigaan bahwa anggaran pertahanan digunakan untuk menopang bisnis (oknum) tentara. Padahal menurut Panglima TNI, tentara melakukan bisnis karena kesejahteraan belum terpenuhi, dan jika sudah terpenuhi tentara tidak akan melakukan bisnis (Kompas Cyber Media (www.kompas.com), 21/8/2002).

Namun, kebutuhan untuk mengembangkan pertahanan negara tetap harus dilakukan agar tercipta lingkungan bisnis dan ekonomi yang aman dan stabil serta bebas dari ancaman tradisional maupun non-tradisional baik secara militer maupun nirmiliter. Hal ini karena sebelum menentukan anggaran pertahanan, secara makro dirumuskan berdasarkan dua faktor utama: faktor keamanan dan faktor pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, meski persepsi ancaman telah berkembang hingga ranah ancaman non-tradisional dan nirmiliter, justru anggaran pertahanan dibutuhkan dalam konteks Revolusi Krida Yudha (*Revolution in Military Affairs*) yang mana mensyaratkan majunya teknologi untuk mengatasi ancaman-ancaman baru seperti terorisme, penyadapan, aksi intelijen dan insurgensi, penjualan manusia, hingga serangan cyber. Jika faktor keamanan ini tidak didukung, pertumbuhan ekonomi memang akan tidak terpengaruh besar kecilnya, namun kestabilan dan keamanan akan terganggu.

Hal ini karena pada hakekatnya, organisasi militer dibentuk untuk memberikan jaminan keselamatan dan keamanan rakyat. Dalam pembukaan UUD 1945 secara jelas juga dinyatakan bahwa salah satu tugas negara adalah untuk menjamin keselamatan rakyat. Oleh karenanya, keamanan dan keselamatan adalah barang publik yang harus disediakan oleh negara. sedangkan publik di sini adalah rakyat yang membayar pajak

dalam berbagai bentuknya. Sehingga dipandang dari sisi anggaran, keberadaan TNI bukan semata-mata untuk mempertahankan keutuhan negara. Lebih dari pada itu, keberadaan TNI adalah untuk memberikan jaminan keselamatan kepada seluruh rakyat.

Tinjauan Literatur

Untuk melihat dinamika anggaran pertahanan dan pertumbuhan ekonomi sebagai dua hal yang cenderung polemis dan dilematis, maka akan dijabarkan perdebatan teoritis seputar hal tersebut untuk melihat bagaimana dinamika anggaran pertahanan. Dalam debat ini, sejatinya dapat dilihat secara politis seperti yang bisa dilihat dalam debat *minimal state vs maximal state*, yakni ketika negara dihadapkan pada pilihan apakah mengedepankan intervensinya dalam kehidupan negara (lewat peningkatan kekuatan) atau meminimalisir pengaruhnya dengan memberi jalan pada pihak swasta untuk berkarya dan oleh karenanya mengedepankan ekonomi.

Dalam salah satu artikel yang membahas model ekonometri dalam menjawab persoalan apakah ekonomi atau pertahanan yang lebih determinan, Paul Dunne dan Ron Smit (Dunne, Smith, dan Willenbockel, 2005) berpendapat bahwa belanja pertahanan (*military expenditure*) sangat menguntungkan pertumbuhan ekonomi dengan menunjukkan mengenai adanya *lack* dari penggunaan model Feder-RAM dalam ekonometri, dalam melihat hubungan antara belanja pertahanan dan pertumbuhan ekonomi. Mereka memfokuskan tulisan pada penggunaan model Solow dan Barro sebagai alternatif menggantikan model Feder-RAM yang dianggap kurang bisa menjembatani antara studi ekonomi pertahanan dan studi pertumbuhan ekonomi pada umumnya.

Model Feder-RAM, pada dasarnya berupaya menjelaskan pertumbuhan ekonomi dari sisi pertahanan, berlandaskan pada teori-teori ekonomi neoklasik. Dengan kata lain, pendekatan Feder-RAM berasumsi mengenai dampak pembangunan infrastruktur pertahanan terhadap ekonomi dengan menggunakan paradigma yang percaya bahwa *invisible hand* lebih berperan ketimbang peran pemerintah. Hal ini menjadi bias karena pembangunan pertahanan selalu membutuhkan apa yang disebut Keynes sebagai *Big Government* yang sangat berkepentingan membangun infrastruktur pertahanan.

Anggaran pertahanan merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan ukuran tangguhness suatu negara, yang mana memiliki kekuatan penggetar bagi negara lain. Oleh karenanya, membangun pertahanan adalah prioritas utama suatu negara agar tujuan-tujuan dan kepentingan nasionalnya dapat terpenuhi. Membangun pertahanan tidak hanya dapat menunjukkan kekuatan negara, melainkan dapat memungkinkan

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, di antaranya mengurangi pengangguran dengan adanya produksi industri pertahanan dan perputaran investasi. Mengintervensi teori-teori ekonomi *mainstream* adalah penting sejak teori-teori tersebut hampir sebagian besar (jika bukan sama sekali) tidak mendukung pengadaan dan anggaran pertahanan.

Model Feder-RAM yang selama ini digunakan pada studi ekonomi pertahanan mengalami *gap* dan bias yang besar dengan teori-teori ekonomi *mainstream*, sehingga sampai kapanpun pendekatan pertahanan dalam ekonomi tidak akan diterima dalam wacana epistemik ekonomi yang lebih luas. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, bahwa belanja pertahanan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari permintaan-permintaan terhadap produksi alutsista, efek terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dari produksi alat-alat pertahanan.

Teori yang digunakan Paul Dunne, Ron Smith dan Dirk Wilenbockel untuk menjawab permasalahan belanja pertahanan ini diinsiprasi terutama dari pemikiran John Maynard Keynes yang melihat bahwa belanja negara akan mendongkrak stimulus terhadap ekonomi sehingga ekonomi secara otomatis dapat mendukung belanja negara apapun itu. Dalam hal ini, pengaruh pemikirannya pada pendekatan-pendekatan ekonomi pertahanan yang melihat industri pertahanan, sebagai penghasil efek pengganda (*multiplier effect*) berdasarkan teori *supply effect*, dapat mempengaruhi bahkan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Efek pertama dapat dilihat dari konsep *supply effect*, yakni dimana penawaran (produksi barang dan jasa) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini penulis menggunakan pemikiran Keynes mengenai efek pengganda yang akan datang dengan sendirinya ketika negara terus menerus memproduksi barang dan jasa yang alhasil akan meningkatkan lapangan pekerjaan dan perputaran investasi yang tak berhenti.

Efek kedua adalah *security effects*, yakni pemikiran Adam Smith yang melihat bahwa peran negara adalah menjaga keamanan dan ketenteraman warga negaranya yang menjalankan kegiatan pasar. Dengan terjaminnya keamanan dan ketenteraman, maka dengan sendirinya kegiatan ekonomi akan berjalan bebas dan bertumbuh. Model Solow dan Barro adalah pendekatan metodologi yang digunakan dalam ekonometri, yang direformulasikan oleh Knight, Aizenman, dan Glick untuk melihat dampak pembangunan pertahanan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan ini, diargumentasikan bahwa belanja pertahanan menjadi signifikan dimana ancaman meningkat, sedangkan sebaliknya akan tidak signifikan jika ancaman menurun.

Namun apa yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya. Studi dari P.C. Frederiksen menunjukkan bahwa ada pengaruh timbal balik di antara keduanya (Frederiksen,1989).

**Tabel 1 . Indonesia: Defence as
(a) a Percentage of GNP and (b) a Percentage of State Budget**

	<i>Defence as a % of</i>	
	<i>GNP</i>	<i>State Budget</i>
Repelita I		
1969/79	3.45	28.66
1970/71	3.52	26.73
1971/72	3.66	25.98
1972/73	3.62	23.15
1973/74	3.11	18.34
Repelita II		
1974/75	2.88	15.07
1975/76	3.81	17.57
1976/77	3.49	17.52
1977/78	3.42	17.14
1978/79	3.36	15.98
Repelita III		
1979/80	3.01	12.23
1980/81	3.03	11.95
1981/82	3.42	12.94
1982/83	3.15	12.61
1983/84	3.14	10.51
Repelita IV		
1984/85		11.22
1985/86		9.65

a Estimated

Sumber: Dorodjatun Kuntjoro-Jakti and T.A.M. Simatupang, "Indonesia: Defence Expenditures in the Period of the New Order, 1967-85", in *Defence Spending in Southeast Asia*, edited by Chm Kin Wah (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1987), Tables 1 and 2.

Sumber:

P.C. FREDERIKSEN. "The Relationship between Defence Spending and Economic Growth: Some Evidence for Indonesia, 1964-85" (Contemporary Southeast Asia, Vol. 10, No. 4 (March 1989), pp. 375-384)

Data di atas merupakan relasi antara *defense spending* dengan *economic growth* di Indonesia pada rentang waktu 1964 hingga 1985, pada saat Repelita mencapai tahap IV. Data tersebut menunjukkan bahwa ada relasi kuat baik dari sisi ekonomi maupun pertahanan di Indonesia.

Pandangan tersebut didukung oleh beberapa pendapat di antaranya, anggaran pertahanan negara yang terlalu tinggi dapat menyebabkan ketegangan investasi baik publik maupun swasta. pengeluaran pertahanan negara juga dapat menyebabkan masalah pada neraca pembayaran. Selain itu pengeluaran pertahanan negara dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan pengalihan sumberdaya dari sektor ekspor yang merupakan *'booster'* dari pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Hal ini juga dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 yang mencapai 5,78 persen (Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (No.16/02/Th. XVII, 5 Februari 2014). Pertumbuhan tersebut rata-rata dihasilkan dari produk barang dan jasa yang sangat sedikit dipengaruhi dari pertahanan. Hal ini semakin menunjukkan bahwa industri pertahanan masih menjadi industri minor ketimbang negara lain seperti Tiongkok, Rusia, maupun Amerika Serikat yang cukup maju pengembangannya dan menyumbang pemasukan kepada negara. Indonesia masih mengandalkan *offset pertahanan* sebagai cara dalam membangun pertahanan, dengan mengandalkan transfer teknologi dari program tersebut (Tippe, 2010).

Dinamika antara peningkatan anggaran kebutuhan konsumtif dan anggaran pertumbuhan anggaran tersebut, merupakan suatu hal yang lumrah terjadi dalam suatu negara dalam rangka memperkuat ketahanan nasionalnya. Keterkaitan antara ekonomi dan hankam (pertahanan dan keamanan) dan linearitas ekonomi pertahanan merupakan bagian di dalamnya. Martin C. MacGuire memberikan salah satu contoh aplikasi ekonomi dalam studi keamanan, yakni dalam analisis mengenai perlombaan senjata (*arms races*) (Harthley & Sandler, 2004) yang menunjukkan bahwa dalam perlombaan senjata, ekonomi menjadi semakin hidup karena adanya permintaan yang terus menerus kepada industri pertahanan. Hal ini sejalan dengan teori John M. Keynes menenai efek pengganda yang ia ilustrasikan dalam kurva IS-LM, dimana permintaan akan terus mendorong penawaran dan akan berimplikasi ada produktifitas baik di sektor negara maupun swasta. Perlombaan senjata, dengan kata lain mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memungkinkan industri pertahanan tetap berproduksi.

Pemindaian Lingkungan Strategis

Gambaran mengenai *scanning strategic environment* (pemindaian lingkungan strategis) penting untuk melihat dinamika ancaman yang menjadi pola saat ini. Paradoks keberlimpahan (*Paradox of plenty*) akan menjadi fenomena utama global yang mempengaruhi hampir di segala sisi kehidupan masyarakat global kontemporer situasi konflikual di Asia Pasifik terjadi dimungkinkan dari kondisi tersebut. Amerika Serikat akan

terus melakukan ekspansi korporasinya di segala bidang ekonomi dengan politik *carbon trading*-nya. Sedangkan Tiongkok dan Rusia akan menjadi penantang yang akan terus menerus melakukan industrialisasi negara-nya masing-masing sehingga mekanisme *carbon trading* akan terus meningkat dan merugikan negara-negara berkembang. *Resource war* akan menjadi hal yang niscaya tatkala semua negara terutama penghasil sumber daya alam yang kaya, akan berjuang mati-matian agar sumber dayanya tidak lari ke negara lain. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi *resource curse* yang saat ini menimpa negara-negara di benua Afrika yang notabene kaya sumber daya alam namun penduduknya didera kemiskinan.

Sementara itu Rusia, Jepang, dan Tiongkok akan memainkan peranan sub-hegemoni dengan intensitas perimbangan kekuatan yang tinggi. Pada 2030 hal ini menjadi mungkin dikarenakan pola ketiga negara sudah terbentuk sejak Rusia dan Tiongkok membangun pakta kekuatan SCO (*Shanghai Cooperation Organization*) yang melingkupi negara-negara Asia Tengah, sementara Jepang merasa terancam dengan pembentukan pakta tersebut.

Heikki Patomaki melihat hal tersebut sebagai bentuk dari konstelasi negara yang tetap akan menghabiskan begitu banyak dana untuk melancarkan kekerasan dan perusakan guna mengamankan diri mereka sendiri dari kekerasan negara lain. Negara cenderung tetap akan mengedepankan efek penggetar dari kekuatan militer, di samping juga karena adanya ancaman dari aktor non-negara berupa terorisme dan radikalisme. Baik Eropa dan Atlantik Utara, tempat sistem demokrasi liberal sangat berkembang pesat, akan terjadi pembentukan komunitas-komunitas keamanan untuk mengelola hal tersebut. Setelah perang dunia ke dua terjadi, tatanan dunia dibentuk dan direpresentasikan oleh dua negara, yakni Amerika Serikat dan Inggris. Hasil dari negosiasi multilateral juga dibentuk oleh Uni Soviet dengan Stalin-nya. Piagam PBB lebih demokratis dari hubungan internasional manapun sepanjang sejarah. Demokrasi liberal dikembangkan secara lebih baik oleh dunia barat, khususnya Jepang dan Eropa Barat, sama baiknya di tangan negara-negara netral (Patomaki, 2008, 124 – 127).

Makna perang berubah sedemikian rupa dari yang tadinya berjenis perang konvensional menjadi perang-perang yang bahkan tidak memerlukan ruang nyata. Sebagaimana jejaring informasi mendorong insiden-insiden lokal ke dalam krisis internasional, perang image menggantikan image perang. Maksudnya, perang tidak lagi digambarkan sebagai konflik berdarah yang mensyaratkan benturan antar dua negara atau lebih dengan persenjataan alutsista militer, melainkan perang harga diri negara yang sifatnya diplomatis, *soft*, bahkan memasuki ranah dunia maya (*cyberwar*). Perang image

(*war of image*) merupakan bentuk dari perang versi 2.0 menurut James Der Derian, dimana perang versi 1.0 dianggap telah berlalu (Derian, 2013). Perang versi 1.0 adalah jenis peperangan yang banyak diteorikan oleh filsuf perang Carl Von Clausewitz, dimana perang diartikan sebagai aktifitas negara dalam rangka mewujudkan kepentingannya terhadap negara lain

Dalam hal ini, perang tidak lagi melulu merupakan kelanjutan dari politik (Clausewitz) juga bukan lagi politik adalah kelanjutan dari perang (Michel Foucault). Melainkan perang menjadi katalitastor dalam perubahan sistem internasional, dan juga perang sendiri selalu berevolusi menurut perubahan sistem internasional tersebut.

Revolution in Military Affairs (Revolusi Krida Yudha) dalam modernisasi militer dunia juga turut mempengaruhi konstelasi pertahanan dan keamanan dunia dan mendorong terciptanya kondisi ini. Pembangunan industri pertahanan beserta mekanisme offset pertahanan yang memungkinkan negara-negara maju memberikan sedikit transfer teknologinya kepada negara berkembang, memungkinkan perang tidak lagi berbasiskan pada alutsita tradisional semata, melainkan berbasiskan teknologi canggih yang sarat dengan komputerisasi. Hal ini menyebabkan peperangan semakin merambah ke arah peperangan informasi (*information warfare*) dimana peperangan ini lebih banyak terjadi di dunia maya (*cyber*) (Halpin, 2006).

Dalam konteks *tragedy of the commons* yang notabene terjadi dengan dimungkinkan oleh adanya interaksi konfliktual antar-negara, dapat dilihat dari prediksi lingkungan strategis yang dikemukakan Colin S. Gray mengenai lingkungan strategis abad ke-21. Menurut Gray, abad ke-21 akan menjadi abad berdarah, dimana peperangan dan strategi akan berlanjut dalam aktor baru, karakter peperangan baru, dan strategi-strategi yang unik, serta terbuktinya thesis Thucydides mengenai "*fear, honor, dan interest.*"

(<http://strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/parameters/Articles/08winter/gray.pdf>, diakses pada 15 Desember 2014).

Dalam prediksinya, hegemoni Amerika Serikat akan tetap berperan dan eksis di tatanan internasional. Tiongkok tidak akan sibuk dan cukup kuat untuk meladeni kekuatan besar Amerika Serikat dalam memimpin dunia, namun tetap tidak akan menerima dan selalu dalam posisi menyeimbangkan pengaruh Amerika Serikat dalam hal "polisi dunia". Hal ini mengakibatkan akan adanya selalu ketegangan antara Washington dan Beijing.

Aspek-aspek Penting yang menjadi Fokus dalam Revolusi Krida Yudha

Pembentukan Kogabwilhan (Organisasi Militer)

Indonesia merupakan negara yang paling berkepentingan di laut, sekaligus negara kepulauan terbesar yang paling disegani karena semua negara yang berbatasan dengan Indonesia sangat berkepentingan dengan Alur Laut Kepulauan yang menjadi salah satu jalur perdagangan terpadat di dunia. Sepuluh negara sedikitnya berbatasan dengan Indonesia, dan sangat berkepentingan menjaga stabilitas di Indonesia dari segala sektor (ipoleksosbudhankam). Wilayah Indonesia yang berbatasan darat dengan Malaysia (1.782 km), Timor Leste (228 km), dan Papua Niugini (820 km). Indonesia juga berbatasan laut dengan India, Thailand, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, dan Australia. Menjaga stabilitas Indonesia dengan demikian juga merupakan menjaga kepentingan negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia.

Rencana untuk memperkuat sektor pertahanan oleh karenanya menjadi esensial dan signifikan dalam mendukung segala kegiatan (terutama ekonomi) di ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) tersebut, karena notabene banyak pihak yang berkepentingan di dalamnya. Pembangunan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) ditujukan untuk mendukung hal tersebut dan juga mendukung Badan koordinasi keamanan laut (Bakorkamla) dalam kebijakan Poros Maritik Presiden Joko Widodo. Dengan kondisi ini, diharapkan terjadi sinergitas antara Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Achmad Soetjipto. *Visi Baru Pertahanan Indonesia* dari <http://nasional.kompas.com/read/2014/06/03/0720588/Visi.Baru.Pertahanan.Indonesia>, diakses pada 23 Desember 2014)

Hal ini tentu penting mengingat lingkungan strategis Indonesia dikelilingi oleh kekuatan-kekuatan besar seperti kerja sama pertahanan yang melibatkan Australia, Selandia Baru, Malaysia, Singapura, dan Inggris dalam *Five Power Defense Arrangements*. Amerika Serikat juga terus mempererat persekutuannya dengan Jepang, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, dan Singapura dalam rangka mengimplementasikan kebijakan *Sustaining US Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense*. Amerika Serikat juga menempatkan sekitar 60 persen kekuatan armadanya di Asia Pasifik, di antaranya 2.500 marinir di Darwin, Australia, dan pangkalan sementara bagi kapal-kapal Littoral Combat Ships Armada Ketujuh di Singapura. Atas alasan ini pula Kogabwilhan menurut Menhan akan diposisikan di flashpoint seperti Aceh, Natuna, perbatasan Kalimantan berikut perairan Ambalat, Papua, dan Atambua.

Pertahanan merupakan kepentingan nasional yang vital karena menyangkut kedaulatan negara. Karena itu, pertahanan harus menjadi bagian utuh dari politik dan

kebijakan negara. Seluruh strategi pertahanan harus mampu menggambarkan visi dan sikap negara, baik ke dalam maupun keluar. Pasal 30 UUD 1945 dan juga UU No 3/2002 menggariskan bahwa sistem pertahanan semesta merupakan kebijakan pertahanan negara. Karakter sistem ini memang masih diwarnai kebijakan inward looking dengan ciri doktrin mendasarkan pada pertahanan di dalam (teritorial). Namun, Kementerian Pertahanan dan TNI semakin sadar bahwa karakter, jenis, dan tingkatan ancaman terhadap kedaulatan negara saat ini sudah sangat berbeda dan tentunya tidak bisa dihadapi dengan cara-cara lama.

Kogabwilhan oleh karenanya tidak boleh mengulang ketidakefektifan dan ketidakefisienan yang tidak mencerminkan sistem komando terpadu yang dicita-citakan dalam pembentukan Kowilhan yang hanya jadi komando di atas kertas, serta jangan sampai pembentukan Kogabwilhan justru mendistorsi proses modernisasi alutsista TNI pada program *MEF*. Karena tanpa penuntasan program *MEF* sementara pembentukan Kogabwilhan terus berjalan, ini hanya akan menjadikannya macan ompong. Pembentukan Kogabwilhan harus didukung sebagai pintu restrukturisasi organisasi TNI dan media pembaruan doktrin pertahanan dari inward looking ke outward looking. Tak kalah penting adalah bagaimana membangun kesiapan politik luar negeri, karena sudah pasti perubahan strategi pertahanan Indonesia akan mendapat respons dari negara-negara tetangga (Achmad Soetjipto. *Visi Baru Pertahanan Indonesia* dari <http://nasional.kompas.com/read/2014/06/03/0720588/Visi.Baru.Pertahanan.Indonesia>, diakses pada 23 Desember 2014).

Revolusi Krida Yudha dan Hubungan Sipil-Militer

RKY sebagai bentuk dari revolusi urusan persenjataan (*Revolution in Military Affairs*), memiliki andil dalam menentukan adanya dinamika hubungan sipil-militer terkait dengan sistem demokrasi sebagai sistem yang mengharuskan adanya proporsionalitas dalam pengambilan keputusan antara kaum sipil dan militer. Adanya perkembangan teknologi memungkinkan bahkan membutuhkan adanya kerjasama antara swasta dan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri pertahanan dalam negeri, sehingga revolusi persenjataan dapat terwujud guna mencapai kapabilitas berperang (*war making capabilities*).

Mark Beeson melakukan penelitian terhadap dampak domino dari kudeta di Thailand terhadap stabilitas politik hukum dan keamanan di Filipina dan Indonesia (Beeson, 2008) Hasilnya, secara kualitatif Indonesia yang notabene masih menyisakan kenangan buruk kala dipimpin secara otoritarian oleh Presiden Soeharto yang bertradisi

militer, justru lebih stabil kondisi politiknya ketimbang Filipina yang memiliki sejarah demokrasi lebih panjang. Hal ini ternyata ada kaitannya dengan ekonomi politik militer yang dipraktikkan oleh militer di Indonesia. Hal ini bukan untuk menyebut adanya bisnis militer, melainkan adanya kebijakan ofset dan pembaharuan terus menerus di industri pertahanan jauh lebih pesat ketimbang Filipina. *Revolution in Military Affairs* dapat dikatakan memperkuat stabilitas keamanan di Indonesia, terutama karena pembiayaan pertahanan dilakukan dengan banyak pihak yang terlibat termasuk swasta. Hal ini menghilangkan sama sekali citra buruk hubungan-sipil militer Indonesia pada masa orde baru, dan juga secara fundamental menghidupkan pasar industri pertahanan dari titik jenuh.

RKY dengan demikian merupakan bagian penting yang seharusnya tak terpisahkan dalam upaya KKIP untuk mendukung pencapaian *MEF 2024*. Modernisasi yang dilakukan haruslah berbasis pada perkembangan lingkungan strategis global, sehingga teknologi yang dilahirkan dari modernisasi tersebut menjadi tepat guna.

Pembentukan KKIP (Industri dan Teknologi Militer)

Dibentuknya Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) sebagai salah satu komite yang bertugas membina industri pertahanan di Indonesia, memiliki dampak bagi pembangunan kekuatan TNI menuju *MEF 2024* dilihat dari aspek politik, ekonomi, dan doktrin pertahanan; dan punya relasi kuat dengan permasalahan dinamika anggaran pertahanan dan pertumbuhan ekonomi tersebut. Sejak dibentuknya KKIP melalui Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010, KKIP telah menghasilkan beberapa kebijakan yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan industri pertahanan. KKIP juga telah beberapa kali menggelar Sidang Pleno. Adapun Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 59 tahun 2013 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan, pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1, menjelaskan bahwa :

“Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah NKRI.”

Sedangkan KKIP adalah komite yang mewakili pemerintah untuk mengoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi industri pertahanan.

Purnomo Yusgiantoro sebagai Menteri Pertahanan pada waktu itu menjelaskan bahwa KKIP dibentuk untuk menghidupkan kembali industri pertahanan yang telah bangkrut akibat krisis ekonomi pada 1998 di Indonesia, dan juga sekaligus mendorong pemenuhan standar minimum kekuatan militer (*Minimum Essential Force*) yang dicanangkan hingga tahun 2024 (<http://nasional.kompas.com/read/2010/04/16/21580988/Pemerintah.Bentuk.KKIP>, diakses pada 10 Desember 2014) Lebih rinci, tugas pokok dan fungsi yang diembankan ke KKIP adalah merumuskan kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang industri pertahanan, mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian kebijakan nasional industri pertahanan, mengoordinasikan kerja sama luar negeri dalam rangka memajukan dan mengembangkan industri pertahanan, dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan industri pertahanan. Giat dalam tugas pokok dan fungsi tersebut meliputi: kebijakan dalam penelitian, pengembangan dan perekayasaan, pendanaan, strategi pemasaran, pembinaan, pemberdayaan, peningkatan sumber daya manusia dan kerja sama luar negeri dalam industri pertahanan (http://hukum.unsrat.ac.id/pres/perpres2010_42.pdf , diakses pada 10 Desember 2014).

Hal ini dilanjutkan pada ditandatanganinya undang-undang nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang menetapkan bahwa pembelian alutsista hanya boleh dilakukan oleh pemerintah. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa untuk menjadi maju, kuat, mandiri, dan berdaya saing, industri pertahanan bertanggung jawab untuk membangun kemampuan dalam menghasilkan alat pertahanan dan keamanan.

Industri pertahanan meliputi: a. Industri alat utama; b. Industri komponen utama dan/atau penunjang; c. Industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan); dan d. Industri bahan baku. Industri alat utama merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pemandu utama (*lead integrator*) yang menghasilkan alt utama sistem senjata dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen dan bahan baku menjadi alat utama. Sedangkan industri komponen utama dan /atau penunjang dapat merupakan BUMN dan/atau badan usaha milik swasta, yang memproduksi komponen utama dan/atau mengintegrasikan komponen atau suku cadang dengan bahan baku menjadi komponen utama, dan/atau yang menghasilkan perbekalan; dan memproduksi bahan baku yang akan digunakan oleh industri alat utama, industri komponen utama dan/atau penunjang, dan industri komponen dan /atau

pendukung (perbekalan) (<http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=38891-Import-Alat-Pertahanan-Hanya-Boleh-Dilakukan-Pemerintah>, diakses pada 22 Desember 2014).

Dalam UU ini juga disebutkan bahwa penggunaan alat peralatan pertahanan dan keamanan produk luar negeri harus memenuhi persyaratan: a. Alat peralatan pertahanan dan keamanan belum atau tidak bisa dibuat dalam negeri; b. Mengikutsertakan partisipasi Industri Pertahanan; c. Kewajiban alih teknologi; d. Jaminan tidak adanya potensi embargo, kondisionalitas politik dan hambatan penggunaan; e. Adanya imbal dagang, kandungan lokal dan/atau ofset paling rendah 85 persen; f. Kandungan lokal dan /atau ofset sebagaimana dimaksud paling rendah 35 persen dengan peningkatan 10 persen setiap 5 tahun; dan g. Pemberlakuan ofset paling lama 18 bulan sejak UU ini diundangkan.

Peran KKIP dalam Mendukung Revolusi Krida Yudha (Doktrin Milliter)

Dibentuknya KKIP sebagai koordinator dan pembina industri pertahanan di Indonesia, seharusnya berpotensi dalam mendukung dan mendorong Revolusi Krida Yudha (*Revolution in Military Affairs* dalam istilah pertahanan Amerika Serikat). Tujuan dicanangkannya Revolusi Krida Yudha (RKY) hingga tahun 2050, adalah membangun kekuatan militer Indonesia yang mampu berperang (*war making capabilities*) yang mana membutuhkan pula pencapaian *MEF*. Hal ini mensyaratkan kebutuhan akan pengembangan teknologi di tubuh militer (*technologised base*).

Pemenuhan terhadap cita-cita RKY, menurut Andi Wijayanto dapat ditinjau dari beberapa faktor utama yaitu: pertama, kemampuan untuk memperoleh informasi dan intelijen strategis untuk mendukung rencana strategi. Kedua, Kemampuan gelar pasukan yang terkoordinasi dan dilengkapi dengan sarana prasarana mobilitas dan logistik. Ketiga, kapabilitas dukungan tempur yang ditentukan oleh penggunaan teknologi digital untuk mempercepat dan mengintegrasikan sistem logistik di daerah pertempuran. Keempat, kapabilitas manuver, sebagai kemampuan untuk meningkatkan kemampuan menyerang, penggelaran pasukan dan penerobosan. Kelima, kapabilitas mobilitas pasukan, yang didukung oleh kesamaptaaan prajurit dan dukungan alat angkut baik darat, air dan udara. Keenam, kapabilitas tempur pasukan.

Upaya untuk mewujudkan pertahanan yang *technologised base* sebenarnya dapat dikatakan sebagai upaya untuk memenuhi target *MEF*, bukan hanya sebaliknya yakni capaian *MEF* untuk memungkinkan pertahanan yang *technologised base*. Mengapa? Karena ketika militer berbasis teknologi dapat tercapai, berarti mekanisme ofset yang dicanangkan sejak era orde baru dapat dikatakan berhasil pula dan hal ini mendukung

suburnya industri pertahanan di Indonesia. Selain itu, tercapainya pertahanan berbasis teknologi, dapat secepat mungkin menghantarkan Indonesia ke dalam apa yang disebut sebagai ekspertisme di bidang perang Informasi (*information warfare*). Perang ini adalah yang disebut-sebut sebagai perang terbaru abad ke-21 bahwa ranah *cyber* menjadi teater perangnya.

Ancaman perang *cyber* kini telah menjadi semakin nyata terutama setelah adanya serangan virus *stuxnet* Amerika Serikat terhadap sistem pengembangan uranium Iran pada 2012 lalu. Virus tersebut sengaja dibuat untuk melumpuhkan sistem informasi Iran yang dicurigai tengah mengembangkan senjata nuklir di bawah kebijakan Mahmoud Ahmadinejad. Di Amerika Serikat sendiri telah terbentuk badan yang khusus mengurus permasalahan yang ditimbulkan dari ancaman *cyber*. Presiden Barack Obama membentuk *Executive Branch Comprehensive Coordinator* (Koordinator Eksekutif Urusan Keamanan *cyber*) yang merupakan kelanjutan dan mandat dari *Comprehensive National Cybersecurity Initiative* (Inisiasi Keamanan *Cyber* Nasional yang Komprehensif) yang dibentuk oleh mantan presiden George W. Bush (Fitria, 2014). Negara-negara lain seperti Tiongkok, Malaysia, dan Jepang juga memperlakukan ancaman *cyber* sebagai fokus dalam keamanan nasional (Fitria, 2014).

Berkaitan dengan hal tersebut mantan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro juga menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan revitalisasi industri pertahanan guna melahirkan teknologi-teknologi baru yang dapat menangkal ancaman-ancaman yang sifatnya *technologised base* yang sangat sarat dengan ancaman terhadap *cyberspace*. Pergeseran ancaman dari *hard power* menjadi *soft power*, merupakan landasan yang memungkinkan ancaman terhadap *cyberspace* terjadi bahwa peperangan tidak lagi berdarah-darah. Hal tersebut juga menjadi penekanan Yusgiantoro dalam mengatasi serangan-serangan yang semakin *intangible*.

Kesimpulan

Lingkungan strategis global yang semakin menggambarkan peningkatan ancaman nirmiliter dan non-konvensional yakni dengan semakin gencarnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, mengharuskan Indonesia semakin berfokus pada revolusi persenjataannya. Dalam pemenuhan *MEF*, Indonesia harus berfokus pada modernisasi yang tidak hanya mengutamakan peremajaan, melainkan juga meningkatkan unsur-unsur teknologi informasi dan komunikasi. Revolusi Krida Yudha dalam hal ini adalah salah satu cara untuk mencapai modernisasi tersebut dengan menjadikannya paradigma pembangunan matra pertahanan dan dromologi bagi pemenuhan target *MEF*. Oleh

karenanya teknologi, doktrin, dan organisasi militer harus direvolusi sedemikian rupa sesuai dengan dromologi perkembangan lingkungan strategis yang *technologised base*.

Dari sisi anggaran, target pemenuhan *MEF*, jika dilihat dari model Feder-RAM dan pendekatan-pendekatan *maximalist state* lainnya, maka dapat dikatakan harus mulai dengan membangun industri pertahanan yang kuat dan berdikari agar ada sumbangan terhadap perekonomian, dan sebaliknya akan berdampak pada pemenuhan *MEF* itu sendiri. Dengan kata lain, mencapai *MEF* adalah dengan membangun industri pertahanan secara serius dan mencurahkan anggaran belanja untuk menstimulus industri pertahanan agar efek *dual use* dapat muncul dan berdampak terhadap perekonomian. Hal ini tentu mensyaratkan dana yang besar dan kerja sama pertahanan yang kuat dengan negara-negara produsen alutsista besar.

Namun jika dilihat dari kondisi spesifik Indonesia yang berbeda dari negara-negara lain, dimana pertumbuhan ekonomi belum secara signifikan dipengaruhi oleh industri pertahanan, maka jalannya adalah dengan meningkatkan penerimaan negara dari berbagai sektor serta memperkuat industri hilir energi-energi alternatif yang dapat digunakan untuk mendanai produksi alutsista serta juga dapat menghidupi alutsista-alutsista itu sendiri. Indonesia sebagai negara ke-19 di dunia dengan kekuatan militer terbesar (<http://www.businessinsider.co.id/the-worlds-most-powerful-militaries-2014-12/#.VJo8ksgC>, diakses pada 24 Desember 2014) seharusnya memiliki kemampuan untuk menumbuhkan industri pertahanannya, apalagi dengan adanya Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang bertugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan industri pertahanan di seluruh Indonesia guna mencapai *MEF* 2024.

Dari sisi organisasi, pengadaan Kogabwilhan merupakan hal yang esensial dalam mewujudkan sinergi antara ketiga angkatan bersenjata Indonesia (AD, AL, AU) yang dapat membantu secara manajerial dalam mengurangi dampak pemborosan yang dapat mengganggu pencapaian *MEF* 2024. Sinergi di antara ketiganya, dapat membantu mewujudkan sinergi antara pemenuhan anggaran kebutuhan negara dengan pemenuhan anggaran kebutuhan pertahanan.

Dari sisi teknologi dan industri, peran KKIP dalam mendorong realisasi *MEF* 2024 dapat tercermin dari upaya-upaya untuk memodernisasi militer Indonesia ke arah yang lebih *technologised base* di era keterbukaan informasi dan globalisasi yang kini semakin minim ancaman tradisional, dan sebaliknya banyak ancaman non-tradisional dan bersifat nirmiliter. Mewujudkan militer yang *technologised base* mendorong suatu negara memaksimalkan *smart power*-nya guna meminimalisir anggaran belanja. Dukungan dan kerja sama industri pertahanan yang kuat antara pemerintah dan swasta serta luar negeri

oleh karenanya dapat tercipta serta merta, karena *smart power* tersebut notabene adalah gabungan antara *soft power* dan *hard power* yang melingkupi kekuatan diplomasi, kebudayaan, dan militer.

Lingkungan strategis yang penuh dengan permainan kekuatan global mengharuskan hal tersebut berjalan. Keterlibatan teknologi menjadi ciri khas dari permainan kekuatan global tersebut yang kini semakin merambah ke dunia *cyber* yang aktornya bukan lagi militer, melainkan sipil dengan keahlian khusus. Dengan demikian, perhatian ke arah teater peperangan dunia maya sangatlah mendesak dan signifikan jika ingin Indonesia mencapai *MEF 2024* dan mendukung cita-cita Revolusi Kridha pada 2050, yakni ketika Indonesia diperkirakan telah sanggup menjadi negara dengan *war making capabilities* yang besar.

Referensi

Buku

- Fitria, Rachma. 2014. *Membangun Model Kebijakan Nasional Keamanan Siber dalam Sistem Pertahanan Negara*. (Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia)
- Hardt, Michael dan Antonio Negri. 2004. *Multitude: War and Democracy in the Age of Empire*. (New York: The Penguin Press)
- Harthley, Keith & Tod Sandler. 2007. *Handbook of defense economics (vol. 2)* (New York: Elsevier Science)
- Piliang, Yasraf Amir. 2004 *Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui batas-batas kebudayaan*. (Yogyakarta: Jala Sutra)
- Patomaki, Heikki. 2008. *The Political Economy of Global Security: War, Future, Crisis, and Changes in the global economy*. (UK: Routledge)
- Widjajanto, Andi. 2010. *Revolusi krida yudha; peran komunitas pertahanan Indonesia dalam buku Universitas Pertahanan Indonesia, menuju konsep pertahanan modern* (Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia)

Jurnal

- Derian, James Der. 2013. *From War 2.0 to quantum war: the superpositionality of global violence*, (Australian Journal of International Affairs, 67:5, 570-585)
- Halpin, Edward, et.al. 2006. *Cyberwar, Netwar, and the Revolution in Military Affairs*. New York: Palgrave Macmillan, hlm. 1-10
- Beeson, Mark. 2008. *Civil Military Relations in Indonesia and the Philippines: Will the Thai Coup prove contagious?* (Armed & Forces Society, Volume 34 No.3), hlm. 2-4

Dunne, J. Paul , Ron P. Smith & Dirk Willenbockel. 2005. *Models Of Military Expenditure And Growth: A Critical Review*, Defence and Peace Economics

Frederiksen, P.C. 1989. "The Relationship between Defence Spending and Economic Growth: Some Evidence for Indonesia", 1964–85 Author(s): Contemporary Southeast Asia, Vol. 10, No. 4 (March 1989), pp. 375-384

Berita Resmi Statistik. 2014. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (No.16/02/Th. XVII, 5 Februari 2014)

Tippe, Syarifudin. 2010. *Deffense Offset Policy in Indonesia* (International Journal of Administrative Science & Organization, May 2013, Volume 20, Number 2)

Internet

<http://strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/parameters/Articles/08winter/gray.pdf>, diakses pada 15 Desember 2014

Achmad Soetjipto. *Visi Baru Pertahanan Indonesia* dari <http://nasional.kompas.com/read/2014/06/03/0720588/Visi.Baru.Pertahanan.Indonesia>, diakses pada 23 Desember 2014

<http://nasional.kompas.com/read/2010/04/16/21580988/Pemerintah.Bentuk.KKIP>, diakses pada 10 Desember 2014

http://hukum.unsrat.ac.id/pres/perpres2010_42.pdf, diakses pada 10 Desember 2014

<http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=38891-Impor-Alat-Pertahanan-Hanya-Boleh-Dilakukan-Pemerintah>, diakses pada 22 Desember 2014

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kementerian Pertahanan RI tahun 2013, diakses dari <http://www.kemhan.go.id/kemhan/files/5a79d2011bccd166f7b7598e8a942c8f.pdf>, pada 23 Desember 2014

<http://ranahan.kemhan.go.id/detail.php?rid=12>, diakses pada 3 Januari 2015

Kompas Cyber Media (www.kompas.com), 21/8/2002

<http://www.businessinsider.co.id/the-worlds-most-powerful-militaries-2014-12/#.VJo8ksgC>, diakses pada 24 Desember 2014

KEBIJAKAN AUSTRALIA DALAM MENANGANI MASALAH ASYLUM SEEKER DAN REFUGEES PADA TAHUN 2001 – 2010

Arin Fithriana¹, Muhamad Fauzi Regianto²
arin_030302@yahoo.com.au, regifauzi@gmail.com

Abstract

The influx of refugees and asylum seekers that enters illegally to Australia is Australia's immigration significant issues, in addition to harming the country, the presence of refugees and asylum seekers in Australian society regarded as a burden, although there are few refugees who have been recognized to contribute to the advancement of Australia, the policies found in this study were analyzed with public policy and international migration theory to analyze policies implemented by the Australian government in 2001-2010 with early research indicated that Australia does not want asylum seekers, especially from illegal channels to get into Australia though they may actually qualify as a refugee proved by the policies like pacific solution, border protection bill or the amendment of the migration act, and at the time Kevin Rudd took power in 2008-2010, he promised to show a more humane policy toward refugees and facilitate those who seek protection for entry into Australia, which in this study was found that the policy of abolishing the pacific solution and temporary protection visas lead to increase in demand for refugees in Australia, pushes Kevin Rudd to eventually return to the pacific solution in the form of Indonesian solution, and because of that, the writer sees Australia's policy toward the asylum seekers are trying to deny the asylum seekers, despite that Australia itself has signed and ratified the convention of refugee status in 1951.

Keywords: *policy, Australia, asylum seeker, refugees.*

Latar Belakang

Australia, sebuah negara yang terletak di belahan bumi bagian selatan yang dekat dengan Indonesia, Selandia Baru, *Papua New Guinea*, dikenal sebagai salah satu negara yang menerima *asylum seeker* atau Pencari Suaka sejak Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945. Australia telah menerima lebih dari 700.000 pengungsi dan orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan dengan kelompok terbesar adalah pengungsi yang berasal dari Eropa, antara tahun 1947 dan 1954, 170.000 pengungsi, terutama dari Polandia, menetap di Australia³. Australia menandatangani Konvensi PBB pada tahun 1951 yang berkaitan dengan status pengungsi⁴ menyebabkan pencari suaka dan pengungsi mulai datang ke Australia. Hal tersebut mempersulit pengendalian arus

¹ Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta.

² Alumnus Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta

³ Museum of Australian Democracy, *Australia's Refugee Policy*, diunduh dari <http://static.moadoph.gov.au/ophgovau/media/images/apmc/docs/81-Refugees.pdf> pada 13 April 2014, pukul 17:37 WIB

⁴ UNHCR, http://unhcr.org.au/unhcr/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=58 diakses pada 13 April 2014, pukul 18:16 WIB

masuk para pencari suaka dan pengungsi karena Australia terikat dengan perjanjian sebagai negara yang telah menandatangani konvensi PBB tentang status pengungsi.

Australia mempunyai proses penahanan (*detention*) terhadap para pencari suaka dan pengungsi yang bertentangan dengan konvensi tersebut. Kebijakan Penahanan tersebut dipandang oleh *United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR* (Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi) sebagai upaya terakhir yang akan digunakan hanya ketika kepentingan nasional terancam⁵:

Selain itu Australia melakukan kebijakan *turn-boat*, kebijakan yang mengembalikan perahu berisi pengungsi yang ingin mendapatkan perlindungan kembali ke laut Sementara pemerintah Australia mengakui mereka mencari perlindungan Australia di bawah kewajibannya sebagai penandatangan konvensi pengungsi⁶ dan bertentangan dengan konvensi di artikel 33, banyak yang percaya Australia telah terlibat dalam pelanggaran langsung dari konvensi tersebut^{7,8}. Hal-hal tersebut membuat penulis mulai memiliki pertanyaan mengenai apa sebenarnya motivasi dan mengapa pengungsi dan pencari suaka masih mau untuk menjalani perjalanan ke Australia.

Kebijakan yang berkontradiksi terhadap konvensi PBB yang telah ditandatangani Australia membuat penulis bertanya bagaimana sebenarnya kebijakan Australia bagi para pencari suaka dan pengungsi sehingga pertanyaan yang menjadi prioritas pada penelitian penulis: *Bagaimana Kebijakan Australia dalam Menangani Masalah Asylum Seeker dan Refugees Pada Tahun 2001 – 2010?*

Kerangka Pemikiran

Penulis menggunakan konsep **Migrasi Internasional** atau perpindahan penduduk antarnegara. Selain karena kemajuan teknologi dan informasi yang meningkatkan interaksi antar aktor-aktor HI, hal ini terjadi karena batas-batas tradisional atau geografis antar negara menjadi semakin tidak jelas. Migrasi internasional terbagi dalam dua bentuk, yaitu imigrasi dan emigrasi. Imigrasi adalah proses perpindahan penduduk masuk dan tinggal di suatu negara yang baru, sedangkan emigrasi adalah keluarnya penduduk dari suatu negara untuk pindah dan tinggal di negara lain.⁹

Pada migrasi internasional, dikenal adanya faktor-faktor pendorong (*push factors*) dan faktor-faktor penarik (*pull factors*) yang menyebabkan seseorang atau kelompok

⁵ UNHCR, *The Refugee Convention, 1951*, hal.230

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Tempo, (19 Februari 2014), <http://www.tempo.co/read/news/2014/02/19/078555778/Soal-Imigran-Gelap-Australia-Langgar-Konvensi-PBB> diakses pada 19 Mei 2014, pukul 12:14 WIB

⁹ Visa Putri Marzela, (2014). Kebijakan Pemerintah Perancis dalam Menangani Isu Imigran (Periode Kepresidenan Nicolas Sarkozy). Skripsi (tidak diterbitkan). Jakarta: Universitas Budi Luhur

melakukan migrasi. Faktor pendorong (*push factors*) adalah alasan yang menyebabkan perginya atau keluarnya penduduk dari suatu negara¹⁰.

Secara umum permasalahan migrasi internasional bertumpu pada para imigran atau pelaku yang melakukan perpindahan dari satu negara ke negara lainnya. Para imigran dapat dibedakan ke dalam beberapa kelompok, yaitu:¹¹

1. *Settlers*, yaitu imigran yang ingin tinggal secara permanen di negara yang dituju.
2. *Contract workers*, yaitu imigran yang tinggal di negara tertentu sesuai jangka waktu kontrak kerjanya.
3. *Professionals*, yaitu para pekerja imigran yang berasal dari perusahaan-perusahaan yang sudah mapan yang berpindah dari satu negara ke negara lain.
4. *Undocumented workers*, yaitu para imigran yang bekerja secara ilegal di negara yang dituju. Biasanya para imigran ini sudah kadaluwarsa izin tinggalnya dan masuk melalui penyelundupan.
5. **Asylum seekers dan refugees**, yaitu para pencari perlindungan yang telah meninggalkan negara asal mereka untuk lari dari ancaman bahaya. Apabila klaim perlindungan telah dipenuhi oleh negara yang dituju, maka status mereka berubah menjadi pengungsi (*refugees*).

Migrasi internasional dapat terjadi karena terpaksa, seperti adanya perang, bencana alam, dan keadaan negara yang tidak stabil, dan juga keinginan sendiri dari para imigran karena ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Migrasi internasional sebenarnya bukanlah isu yang baru karena sudah terjadi sejak dahulu pasca Perang Dunia I. Faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan migrasi internasional yaitu:¹² Meningkatnya jumlah negara sejak Perang Dunia I berakhir, Pertumbuhan populasi dunia yang sangat pesat dan terus berlangsung sampai saat ini, Adanya revolusi di bidang komunikasi dan transportasi yang menyadarkan masyarakat akan keadaan dan kesempatan yang ada di daerah lain, dan Adanya kekacauan dan pergolakan dunia yang penuh ketidakpastian yang mendorong masyarakat untuk mencari hidup yang lebih baik.

Kebijakan Publik, menurut Anderson, adalah tindakan-tindakan yang dilakukan atau dikembangkan oleh badan resmi pemerintah yang memiliki tujuan untuk memecahkan masalah atau kekhawatiran.¹³ Definisi lain dikemukakan oleh Lemieux,

¹⁰ Levin Institute, *Migration and Globalization*, hal. 9, <http://www.globalization101.org/uploads/File/Migration/migration.pdf> diakses pada tanggal 22 Maret 2014, pukul 18:50 WIB.

¹¹ Anak Agung Banyu Perwita & Y. M. Yani, (2005), *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, hal. 150

¹² *Ibid.*

¹³ Michael Hill & Peter Hupe, (2002), *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice*, London: SAGE, hal. 5.

bahwa kebijakan publik adalah hasil dari aktifitas aktor-aktor politik yang berstruktur yang bertujuan sebagai resolusi suatu masalah di lingkungan publik dan prosesnya berkembang dari waktu ke waktu.¹⁴ Maka dapat disimpulkan pengertian dari kebijakan publik berdasarkan definisi-definisi di atas adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi masalah- masalah yang ada di publik, perlu dipahami bahwa setiap kebijakan publik memiliki proses atau tahap-tahap dalam pembuatannya, dari bagaimana diputuskannya suatu kebijakan sampai dengan pengimplementasiannya dan evaluasinya¹⁵. Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji, maka dibagilah proses pembuatan kebijakan tersebut ke dalam tahap-tahap.¹⁶ Tahap-tahap kebijakan publik adalah:¹⁷

1. Penyusunan Agenda: masalah-masalah yang ada dipilah untuk lalu dipilih yang mana yang akan masuk dalam agenda kebijakan para perumus kebijakan.
2. Formulasi Kebijakan: masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Pada tahap ini masalah-masalah yang masuk didefinisikan dan dicari pemecahan masalah terbaiknya melalui berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy options*) yang ada.
3. Adopsi Kebijakan: dari banyaknya alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, dipilihlah salah satu kebijakan yang akan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
4. Implementasi Kebijakan: keputusan program kebijakan yang telah diambil harus diimplementasikan atau dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Unit-unit administrasi melaksanakan kebijakan dengan memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi, sering terjadi pro kontra, bahwa para pelaksana ada yang setuju dan ada juga menentang kebijakan yang sudah diputuskan.
5. Evaluasi Kebijakan: kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar keberhasilan suatu kebijakan.

¹⁴ Peter Knoepfel, *et.al.*, (2007), *Public Policy Analysis*, Bristol: The Policy Press, hal. 23.

¹⁵ Visa Putri Marzela, (2014). *Kebijakan Pemerintah Perancis dalam Menangani Isu Imigran* (Periode Kepresidenan Nicolas Sarkozy). Skripsi (tidak diterbitkan). Jakarta: Universitas Budi Luhur

¹⁶ Budi Winarno, (2012), *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*, Yogyakarta: CAPS, hal. 35.

¹⁷ *Ibid.* hal. 36-37.

Dinamika Pencari suaka (*push factor*)

Sejarah manusia yang menjadi pengungsi diperkirakan muncul sejak tahun 740 sebelum masehi, yaitu ketika penguasa Assyria menguasai tanah Israel yang menyebabkan 10 dari 12 suku yang ada di sana harus mengungsi dari rumah dan tanah mereka, jumlah pengungsi dan akhirnya mereka menetap masih diperdebatkan oleh sejarawan dan para peneliti agama.¹⁸

Pengungsi adalah orang-orang yang melintasi perbatasan internasional untuk melarikan diri dari pelanggaran hak asasi dan konflik. Orang yang merasa ketakutan akan dianiaya sering terpaksa melarikan diri melintasi perbatasan negara asal mereka dan mencari keselamatan¹⁹. Definisi Pengungsi menurut UNHCR yang tertulis dalam Pasal 1 Konvensi tahun 1951 yang telah di amandemen dalam Protokol tahun 1967 adalah Seseorang yang karena ketakutan dan beralasan kuat akan mengalami penganiayaan karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, dan berada di luar negara kewarganegaraannya; atau siapa saja yang tidak memiliki kewarganegaraan dan berada di luar negara tempat asalnya sebagai akibat dari peristiwa tersebut dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke negaranya.²⁰

Status *refugee* atau pengungsi adalah keputusan resmi yang dibuat oleh negara atau badan internasional yang memberikan suaka. Seseorang yang mencari suaka tetapi belum menerima status pengungsi disebut sebagai *asylum seeker* atau pencari suaka. Negara-negara yang telah menandatangani Konvensi untuk status pengungsi pada tahun 1951 telah sepakat untuk tidak mendeportasi pencari suaka ke tempat-tempat dimana kehidupan mereka atau kebebasan mereka mungkin dalam bahaya. Setelah pencari suaka telah disetujui untuk diubah statusnya menjadi pengungsi, negara tuan rumah diharapkan dapat memberikan hak-hak sipil, hak untuk bekerja, dan akses ke pelayanan sosial. Menurut Anak Agung Banyu Perwita, *asylum seekers* dan *refugees*, adalah para pencari perlindungan yang telah meninggalkan negara asal mereka untuk lari dari ancaman bahaya. Apabila klaim perlindungan telah dipenuhi oleh negara yang dituju, maka status mereka berubah menjadi pengungsi (*refugees*)²¹

Susan Zimmerman dalam penelitiannya melakukan wawancara dengan pengungsi dan pencari suaka yang berasal dari Somalia, ada sejumlah alasan yang diberikan tentang mengapa mereka meninggalkan Somalia dan alasan mereka memilih untuk

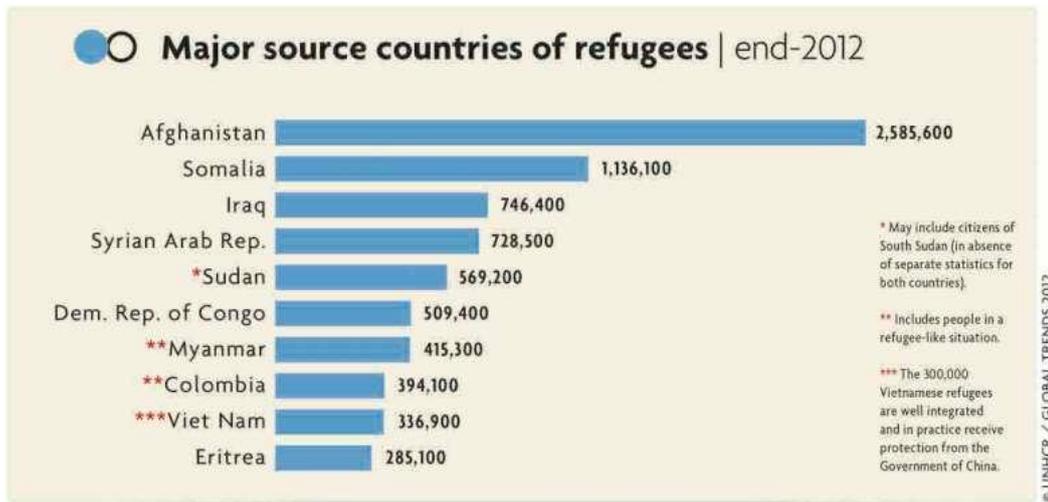
¹⁸<http://www.theguardian.com/news/datablog/interactive/2013/jul/25/what-happened-history-refugees> diakses pada 20 April 2014, pukul 12:05 WIB

¹⁹*Ibid.*, hal.1

²⁰ UNHCR, (9 Maret 2007), <http://www.unhcr.org/45efe7852.html> diakses pada 20 April 2014, pukul 19:16

²¹Anak Agung Banyu Perwita & Y. M. Yani, (2005), *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, hal. 150
Transnasional Vol.9 No.1 Juni 2014

mengungsi.²² Beberapa wawancara yang dilakukannya dapat menggambarkan faktor-faktor yang memicu munculnya pengungsi dan pencari suaka antara lain faktor keamanan dan keselamatan, perang dan ketidakstabilan politik, dan sebagainya.

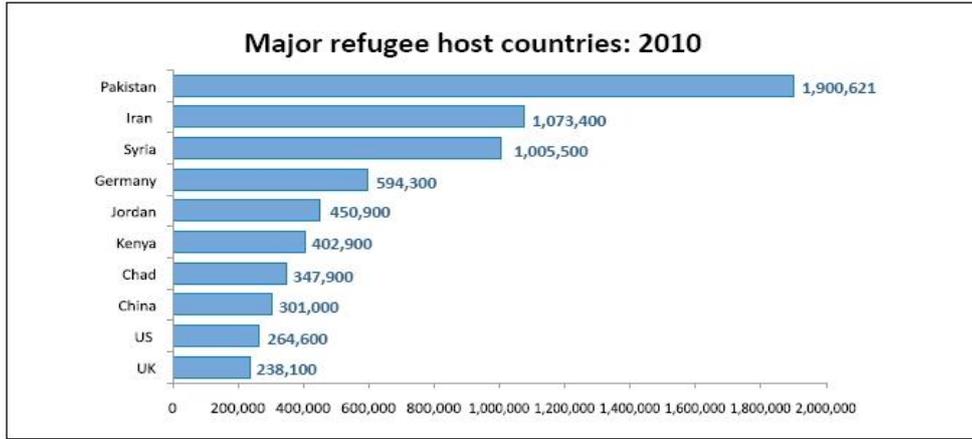


Grafik 1. Negara-negara Penghasil Pengungsi hingga akhir tahun 2012

Sumber: <http://www.globalpost.com/dispatch/news/war/130619/refugees-worldwide-numbers-stats-displaced-people-afghanistan-somalia-sudan-syria-iraq>

Seperti yang terlihat di grafik 2.1 dan grafik 2.2, Afghanistan merupakan negara yang menghasilkan pengungsi terbanyak hingga tahun 2010 dan 2012 dan pengungsi yang signifikan tersebut merupakan masalah bagi negara-negara sekitar negara yang menghasilkan pengungsi seperti Afghanistan. Grafik berikut menunjukkan negara-negara mana saja yang menerima pengungsi terbanyak pada tahun 2010:

²²Susan Zimmerman, (2009), *Irregular Secondary Movements to Europe*, dalam *Journal of Refugee Studies*. Vol. 22. No. 1. hal. 80



Grafik 2. Negara-negara Utama Penerima Pengungsi Tahun 2010

Sumber: UNHCR *Asylum Levels and Trends in Industrialised Countries 2010*, hal. 13 diolah oleh John Menadue dan Arja Keski-Nummidalam *A New Approach Breaking the Stalemate on Refugees and Asylum Seekers*
http://www.johnmenadue.com/population/html_files/CPD_Refugee_report_A%20New%20Approach%20Web.html

Daya Tarik Australia (Pull Factor)

Australia adalah sebuah benua dan negara di belahan bumi selatan, terletak di bagian sebelah selatan Asia Tenggara, terletak di wilayah Oceania dan merupakan benua yang ada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik Selatan. Luas wilayah Australia adalah 7.686.850 kilometer persegi dan membentang dari garis lintang 10° 41'LS sampai garis lintang 43° 39'LS dan dari garis bujur 113° 09'BT sampai 153° 39'BT²³



Gambar 3. Peta Geografis Australia

Sumber: <http://www.worldatlas.com/webimage/country/oceania/au.htm>

²³ Lembaga Australia-Indonesia, <http://www.dfat.gov.au/All/publications/pengantar/index.html> diakses pada 11 Mei 2014 pukul 13:21 WIB
Transnasional Vol.9 No.1 Juni 2014

Australia saling berbagi lautan dengan negara tetangga-tetangganya yang terdekat, yakni Indonesia dan Papua Nugini. Australia terletak di sebelah tenggara Indonesia. Pada titik batasnya yang terdekat, Australia dan Indonesia hanya terpisah beberapa kilometer saja, sehingga Indonesia menjadi lokasi yang cocok untuk para penyelundup manusia atau sebagai negara transit para pengungsi yang melewati jalur laut menuju wilayah Australia.

Untuk mengetahui daya tarik Australia bagi para pengungsi, tentunya harus memahami keuntungan maupun kerugian yang akan dihadapi baik Australia maupun para pengungsi dan pencari suaka terutama setelah kebijakan *Mandatory Detention* pada masa Paul Keating dan *Pacific Solution* pada masa John Howard. Bagi pencari suaka, tentunya biaya perjalanan, kondisi keuangan, meninggalkan harta benda, menjadi sebuah pengorbanan dan merupakan kerugian yang diderita mereka, namun dengan memilih menjadi pengungsi, maka mereka mempunyai harapan untuk hidup dan terutama keamanan. Sementara bagi Australia, masuknya pengungsi dapat meningkatkan pengeluaran belanja negara dan membebani ekonomi negara secara keseluruhan, namun itu sendiri adalah konsekuensi bagi Australia karena telah sejak menandatangani Konvensi Status Pengungsi. Sementara itu, masuknya pengungsi dapat meningkatkan keragaman budaya dan penghargaan dari masyarakat internasional terutama mereka yang bergerak dibidang hak asasi manusia.

Para pengungsi yang datang ke Australia tanpa visa dan mencari suaka semenjak tahun 1992 pada pemerintahan Paul Keating diwajibkan untuk tinggal dalam tahanan sementara untuk mengumpulkan informasi dasar tentang klaim suaka, kesehatan, identitas atau masalah keamanan dan proses tersebut cukup lama. Baik orang dewasa dan anak-anak harus tetap dalam tahanan sampai klaim suaka mereka telah selesai atau mendapat *bridging visa* yang telah diterbitkan pemerintah Australia.^{24,25} Konsekuensinya adalah para pencari suaka sering ditahan selama berbulan-bulan dan kadang-kadang selama bertahun-tahun. Kebijakan tahanan sementara tidak memberikan banyak keuntungan bagi para pengungsi dan pencari suaka seperti berikut:²⁶

Pencari suaka selama dalam tahanan sementara (*detention*) untuk menjalani proses klaim mereka, tidak berhak untuk mendapat jaminan sosial sama sekali.

²⁴ Australian Human Rights Commission, (2002), <https://www.humanrights.gov.au/publications/last-resort-national-inquiry-children-immigration-detention/6-australias-immigration> diakses pada 25 Mei 2014, pukul 19:46 WIB

²⁵ Sebuah *bridging visa* adalah visa sementara yang memungkinkan warga negara asing untuk tetap sah berada di Australia meskipun mereka tidak memegang visa substantif, seperti visa turis atau visa pelajar

²⁶<http://theconversation.com/factcheck-are-newly-arrived-asylum-seekers-paid-more-than-pensioners-17501> diakses pada 18 Mei 2014, pukul 15:08 WIB

Sementara dalam masa tahanan dan proses visa sedang berlangsung, maka pencari suaka mendapatkan *bridging visa*, jika pencari suaka mungkin memenuhi persyaratan untuk mendapat visa, selama masa itu, pemerintah Australia memberikan dana yang lebih sedikit dari dana pensiun yang diterima masyarakat Australia, dan bahkan lebih rendah dari dana untuk orang yang menganggur.

Jika pencari suaka akhirnya diakui dan berubah statusnya menjadi pengungsi dan diberikan visa, mereka kemudian menjadi penduduk tetap dan memiliki akses ke hak-hak yang persis sama seperti warga lain atau warga Australia biasa.

Pada pemerintahan Kevin Rudd pada tahun 2007 – 2010 telah berusaha menghapus kebijakan penahanan tersebut terutama sistem pemrosesan dan penahanan di luar pulau utama (*offshore processing*) Australia (seperti di Christmas Island atau Nauru) dengan alasan "tidak efektif dan boros".²⁷ Setelah pemerintahan Kevin Rudd menghapus kebijakan tersebut (yang disebut *pacific solution*) Kedatangan perahu ke Australia meningkat dari 161 orang pada tahun 2008 menjadi hampir 3.000 orang pada tahun 2009.²⁸ Rute untuk menuju Australia sendiri merupakan salah satu jalur imigrasi paling panjang dan paling berbahaya di dunia namun menariknya masih banyak pencari suaka yang menginginkan untuk datang ke Australia. Pengungsi dari negara-negara miskin di Asia, banyak yang berharap untuk mencari penghidupan yang lebih baik di Australia yang dipandang menawarkan kebebasan dan kemakmuran.²⁹

Cost and Benefit bagi Australia

Pada dasarnya, lebih mahal untuk memukimkan pengungsi daripada imigran legal karena pengungsi memutuskan pindah dengan terpaksa dan meskipun mereka mempunyai keterampilan, hukum di negara tuan rumah biasanya tidak memperbolehkan mereka bekerja³⁰. Di Australia sendiri biasanya pengungsi mengalami pengangguran yang lebih tinggi dan partisipasi tenaga kerja yang lebih rendah dari pekerja migran lain. O'Dwyer mengidentifikasi beberapa hambatan yang dihadapi pengungsi dalam mendapatkan pekerjaan³¹:

²⁷ Alexander J. Wood, (2002), *The "Pacific Solution": Refugees Unwelcome in Australia*, Volume 9 Issue 3, <http://www.wcl.american.edu/hrbrief/09/3australia.cfm> diakses pada 25 Mei 2014, pukul 19:58 WIB

²⁸ Paul Maley, (22 Desember 2012) <http://www.theaustralian.com.au/news/viking-deal-to-sway-others-sri-lanka/story-e6frg6n6-1225812592012> diakses pada 25 Mei 2014, pukul 20:07 WIB

²⁹ Rachel Pannett, (4 september 2013), *Menantang Maut Menuju Suaka*, *The Wall Street Journal*, <http://indo.wsj.com/posts/2013/09/04/menantang-maut-menuju-suaka-bagian-dua/> diakses pada 19 Mei 2014, pukul 12:18 WIB

³⁰ Richard Parsons, (2013), *Assessing the Economic Contribution of Refugees In Australia*, hal. 6

³¹ *Ibid.*

- a. Kurangnya pengetahuan lokal dan pengalaman kerja
- b. Kurang pemahaman dengan proses perekrutan (misalnya, menulis resume, menjawab kriteria seleksi, wawancara, presentasi)
- c. Tidak memiliki kualifikasi yang diakui
- d. Harus belajar bahasa baru
- e. Rendahnya tingkat *melek* huruf
- f. Rendahnya tingkat pendidikan.

Hal tersebut menunjukkan kehadiran pengungsi di Australia lebih bersifat merugikan dibandingkan dengan keuntungan yang didapat Australia jika memperbolehkan para pengungsi dan pencari suaka untuk tinggal di Australia. Kontribusi yang biasanya dilihat dari pengungsi di Australia biasanya dalam hal peningkatan multikulturalisme dan keragaman budaya. Pengungsi di Australia sendiri berkontribusi terhadap perekonomian Australia melalui pekerjaan, bisnis, dan kegiatan lainnya.³²

Negara penerima pengungsi akan menghadapi biaya tahunan dalam memberikan bantuan sosial dan kesejahteraan bagi para pengungsi misalnya peningkatan penyediaan medis dan pendidikan, meningkatnya permintaan untuk kebutuhan dasar seperti air dan biaya jangka panjang seperti infrastruktur. Dalam jangka pendek, dampak dari peningkatan permintaan pengungsi untuk masuk ke suatu negara cenderung negatif bagi masyarakat tuan rumah yang dalam kasus ini adalah Australia, misalnya saja masyarakat setempat dapat menghadapi peningkatan pajak untuk membayar biaya para pengungsi³³

Biaya Australia untuk pencari suaka yang tiba dengan perahu telah membebani Australia hampir 2.4 Miliar USD sejak tahun 2000 sampai 2010³⁴ dengan rincian pengeluaran untuk mencegah, memproses dan menahan sementara hampir semua pencari suaka yang tiba dengan perahu. Kebijakan *detention* bagi pencari suaka sendiri pertama kali diperkenalkan oleh pemerintahan Paul Keating dan dilanjutkan dan diperluas di bawah pemerintahan John Howard, dengan sistem tahanan sementara di luar pulau utama Australia dan dirancang untuk menghukum pencari suaka dan mencegah yang lainnya untuk datang. Dengan biaya untuk pencari suaka tersebut berarti wajib pajak di Australia telah menghabiskan sekitar 113.000 USD hanya untuk menahan setiap pencari suaka.³⁵ Dari hal tersebut, terlihat negara tuan rumah lebih banyak mengeluarkan biaya untuk melakukan penahanan sementara, biaya yang muncul akibat usaha mengusir

³²*Ibid.* hal. 1

³³Roger Zetter, (2010), *Are refugees an economic burden or benefit?* <http://www.fmreview.org/preventing/zetter> diakses pada 18 Mei 2014 pukul 14:57 WIB

³⁴ Bernard Keane, (17 Agustus 2011), *Cost of detention? \$113,000 per asylum seeker*, <http://www.crikey.com.au/2011/08/17/detention-centre-cost-of-asylum-seekers/> diakses pada 18 Mei 2014 pukul 15:20 WIB

³⁵*Ibid.*

pengungsi tersebut dapat menjadi jawaban mengapa Australia 'terbuka' kembali pada pemerintahan Kevin Rudd.

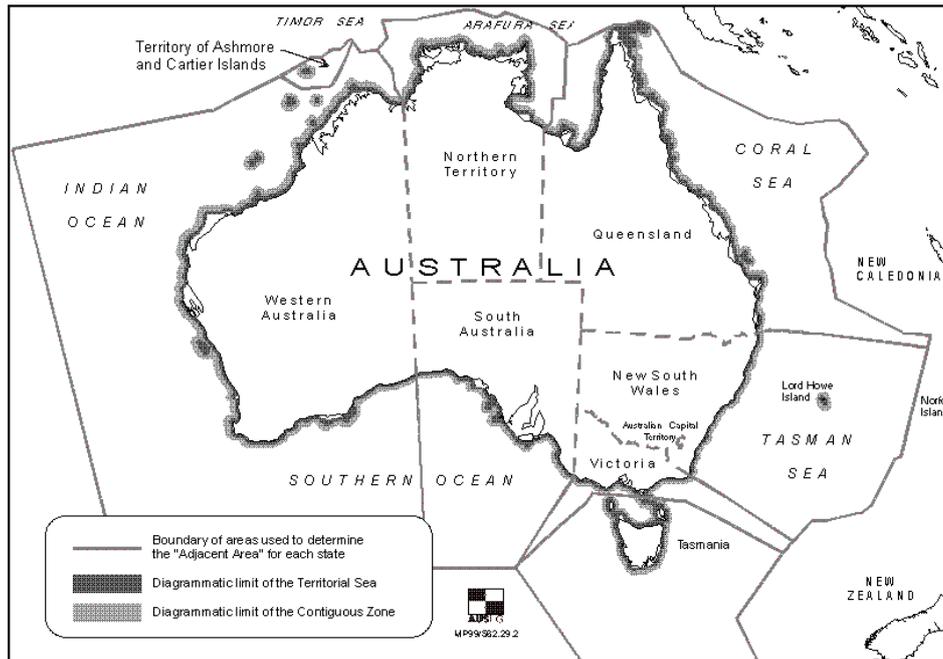
Dinamika Pencari Suaka dan Pengungsi di Australia

Pada 2001 – 2010, terdapat dua masa kepemimpinan dan kekuasaan partai yang berbeda di Australia, dimulai dari masa kepemimpinan John Howard yang berasal dari partai koalisi liberal dan memenangkan 4 kali pemilu berturut-turut di Australia pada tahun 1996, 1998, 2001, dan 2004 hingga ia dikalahkan pada pemilu tahun 2007 yang dimenangkan Kevin Rudd yang berasal dari partai buruh Australia sebagai perdana menteri baru di Australia. Kedua perdana menteri tersebut mempunyai kebijakan yang sangat erat kaitannya dengan kebijakan imigrasi Australia, terutama kebijakan mengenai masalah pencari suaka dan pengungsi yang berusaha mencari perlindungan ke Australia yang tentunya seringkali menuju Australia lewat jalur laut dengan perahu secara illegal (*boat people* atau *Illegal Maritime Arrival*).

Sebelum masa kepemimpinan John Howard dimulai, pendahulunya Paul Keating yang menjabat dari tahun 1991 hingga 1996 membuat kebijakan yang mulai mempersulit masuknya pencari suaka ke Australia seperti kebijakan penahanan sementara (*mandatory detention system*) yang tetap dipertahankan pada masa John Howard, dan kebijakan tersebut menjadi dasar bagi John Howard dalam mengembangkan kebijakan-kebijakannya. Sementara itu masyarakat Australia sendiri terbagi menjadi dua opini mengenai kehadiran pengungsi di tengah komunitas masyarakat Australia, mereka yang tidak mendukung menganggap pengungsi membebani ekonomi Australia seperti yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya serta pengungsi dianggap menciptakan isu rasisme di tengah masyarakat Australia.³⁶ Pencari suaka yang berasal dari timur tengah yang semakin banyak memasuki wilayah Australia pasca-*Global War on Terror (GWOT)* pada tahun 2001 membuat John Howard, perdana menteri Australia pada masa itu, semakin mempersulit para pencari suaka yang menginginkan untuk masuk ke Australia. John Howard sepertinya menjawab masalah pencari suaka yang masuk secara illegal lewat jalur laut dengan solusi menerapkan kebijakan-kebijakan yang cukup bertolak belakang dengan perjanjian internasional yang ditandatangani Australia pada tahun 1951 tentang status pengungsi, namun parlemen Australia menyetujui beberapa solusi yang ditawarkan John Howard, yaitu *Border Protection Bill* dan *Pacific Solution*.

³⁶ Cristos Tsiolkas, (2013), <http://www.themonthly.com.au/issue/2013/september/1377957600/christos-tsiolkas/why-australia-hates-asylum-seekers> diakses pada 29 Mei 2014, pukul 22:00 WIB
Transnasional Vol.9 No.1 Juni 2014

Kebijakan *Border Protection Bill* dilegalkan parlemen Australia dibawah pemerintahan John Howard pada 29 Agustus 2001 dan dengan kebijakan tersebut pemerintah Australia mendapat kekuasaan untuk menghadang kapal apapun yang masuk dalam wilayah perairan Australia, selain itu angkatan laut Australia diperbolehkan menggunakan kekerasan untuk mengeluarkan kapal ilegal dari wilayah Australia. Kebijakan tersebut juga menetapkan bahwa tidak ada aplikasi (permohonan) suaka yang dapat dilakukan oleh orang-orang di atas kapal.



Gambar 4. Wilayah Perbatasan dalam *Border Protection Bill*

Sumber: *Parliament of Australia*

http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/bd/bd0102/02bd004

Dalam gambar tersebut terlihat perbatasan laut Australia dan dua zona maritim Australia, yaitu zona laut teritori dan zona *Contiguous*, yaitu laut teritorial Australia (12 Mil dari pantai) dan zona *Contiguous* (24 Mil) bahwa Australia mempunyai kekuasaan untuk melakukan kontrol terhadap pelanggar hukum perairan seperti imigrasi atau bea cukai.³⁷

Kebijakan ini juga dianggap sebagai solusi terhadap ancaman keamanan perbatasan akibat adanya serangan teror 11 September di Amerika Serikat yang menurut partai koalisi pendukung John Howard sebagai salah satu dari dua isu yang paling penting yang dihadapi Australia dan hal tersebut ditunjukkan pada pidato John Howard yang mengatakan bahwa serangan 11 September sebagai "*an attack on Australia as much as it was an attack on the United States*" dan juga mengatakan "*We will decide who*

³⁷ Geoscience of Australia, *Maritime Boundary Definitions*, <http://www.ga.gov.au/marine/jurisdiction/maritime-boundary-definitions.html>, diakses pada 22 Juni 2014, pukul 15:37 WIB

*comes to this country and the circumstances in which they come.*³⁸ sehingga kebijakan *Border Protection Bill* dan kebijakan *Pacific Solution* tidak menerima protes yang berlangsung lama dari masyarakat Australia karena dianggap kebijakan-kebijakan John Howard mempunyai alasan yang kuat untuk melindungi masyarakat Australia.

Pacific Solution adalah kebijakan pemerintah Australia yang terkait dalam mengangkut pencari suaka ilegal dari laut ke pusat-pusat penahanan di negara-negara pulau di Samudera Pasifik, dan tidak membiarkan mereka untuk mendarat di pulau utama Australia. Kebijakan ini dimulai setelah negosiasi Australia dengan berbagai negara seperti, Timor Timur, Kiribati, Fiji, Palau, Tuvalu, Tonga dan Perancis (dalam kaitannya dengan Polynesia) dan pada September dan Oktober 2001 Pemerintah Australia menyelesaikan negosiasi dan menandatangani perjanjian administrasi dengan pemerintah Nauru dan Papua New Guinea untuk menampung pencari suaka untuk diproses dan mendirikan pusat pengolahan untuk menampung dan memproses klaim pencari suaka di Pulau Manus di Papua New Guinea.³⁹ Mayoritas orang-orang yang ditampung di Nauru dan Pulau Manus adalah mereka yang tiba pada akhir tahun 2001 dan awal tahun 2002 dan hanya 3 orang yang tiba pada awal tahun 2003 dan 90 orang pada 2006 – 2007.⁴⁰ 2001 – 2003 merupakan puncak dari *Pacific Solution* dengan total 1.544 pencari suaka (sebagian besar dari Afghanistan dan Irak) yang ditampung, dengan populasi puncak 1515 pada Februari 2002 di Pulau Manus dan Nauru saja.

Selain itu John Howard juga mengamandemen *Migration Act* tahun 2006 berusaha untuk mengamandemen *Migration Act* dalam *The Migration Amendment (Designated Unauthorised Arrivals) Bill 2006* yang diimplementasikan pada 11 Mei 2006, dalam upaya untuk memperluas *Pacific Solution* dan untuk menanggapi kemarahan dari Pemerintah Indonesia atas pemberian status pengungsi kepada 42 pengungsi Papua Barat. Amandemen undang-undang ini menyatakan bahwa semua pencari suaka yang tiba dengan perahu tanpa otorisasi harus diproses di tempat-tempat seperti Nauru atau Pulau Christmas. Perubahan tersebut membuat pencari suaka menjalani proses baru dan mereka yang telah dinilai sebagai seorang pengungsi yang sah tidak secara otomatis mendapat hak perlindungan pengungsi di Australia. Proses penentuan status pengungsi juga akan berbeda antara pencari suaka yang diproses darat (misalnya, pencari suaka

³⁸ Australian Federal, (2001), <http://electionspeeches.moadoph.gov.au/speeches/2001-john-howard> diakses pada 9 Juni 2014, pukul 22:29 WIB

³⁹Parliament of Australia,(4 September 2012), *A Statistical Guide To The Asylum Seeker Caseloads On Nauru And Manus Island*.http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BN/2012-2013/PacificSolution#_ftn17 diakses pada 7 Juni 2014, pukul 14:46 WIB

⁴⁰*Ibid.*

memohon visa perlindungan setelah secara legal tiba dengan visa jenis lain) dengan pencari suaka yang tiba secara ilegal melalui laut. Hal tersebut menimbulkan ketidaksetujuan seperti yang berasal dari Amnesty Internasional yang menganggap amandemen *The Migration Amendment (Designated Unauthorised Arrivals) Bill 2006* tersebut berpotensi menghukum pencari suaka asli dan menempatkan Australia untuk melanggar kewajiban hukum internasional.⁴¹ Pada 14 Agustus 2006, *The Migration Amendment (Designated Unauthorised Arrivals) Bill 2006*, akhirnya dicabut karena mendapat penolakan dari berbagai pihak⁴²

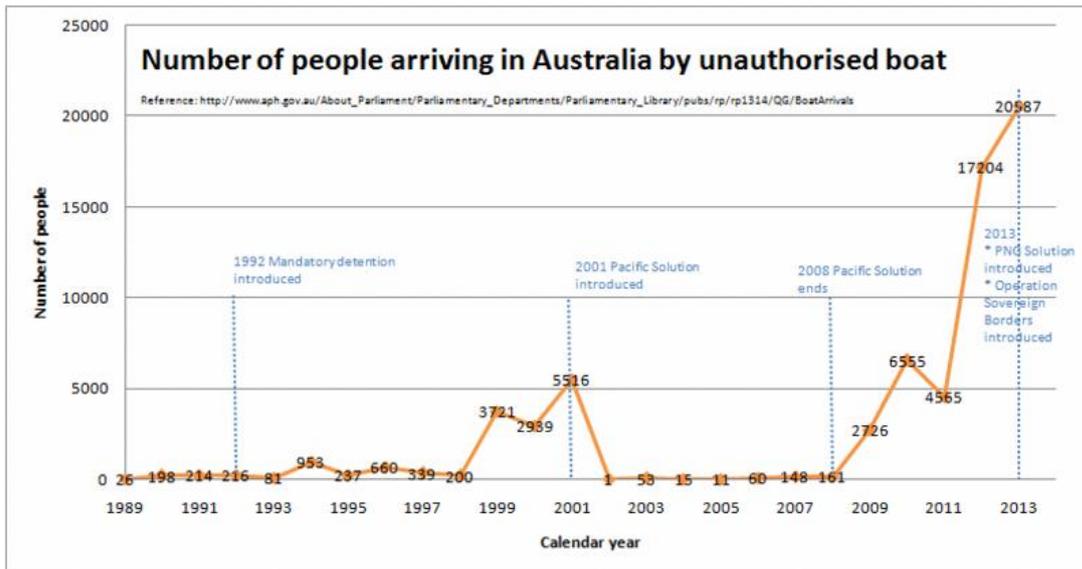
Kevin Rudd memenangkan pemilihan federal Australia pada November 2007 dan menjadi Perdana Menteri Australia ke 26 yang dimulai pada 3 Desember 2007. Pemerintahan Kevin Rudd menghapus kebijakan *Pacific Solution* pada Februari 2008 dengan data kementerian imigrasi Australia yang mencatat total 1.637 orang telah ditahan di fasilitas Nauru dan Manus antara tahun 2001 dan 2008, termasuk 786 warga Afghanistan, 684 warga Irak dan 88 warga Sri Lanka.⁴³ Penghapusan kebijakan ini juga ditandai dengan menerbangkan 21 pencari suaka asal Sri Lanka dari Nauru ke Brisbane dan disetujui statusnya sebagai pengungsi mereka merupakan penghuni terakhir dari pusat penahanan di Nauru. Penghapusan ini juga merupakan janji sebelum pemilihan oleh Kevin Rudd dalam memenuhi komitmen untuk mengakhiri kebijakan yang kontroversial dari John Howard yang disebutnya sebagai *anti-refugees policy*.⁴⁴ Kevin Rudd masih menerapkan beberapa kebijakan pemerintahan John Howard seperti *border protection bill*, dan *mandatory detention*, meskipun tidak lagi dengan *Pacific Solution* di Manus dan Nauru, sehingga Partai Buruh lewat Parlemen Australia tetap memberi hukuman bagi pencari suaka yang berusaha untuk tiba secara ilegal untuk dibawa ke dan diproses di Pulau Christmas.

⁴¹ Amnesty International Australia, (23 Mei 2006), *Migration Amendment (Designated Unauthorised Arrivals) Bill 2006*, <http://www.amnesty.org.au/refugees/comments/2245/> diakses 9 Juni 2014, pukul 22:04 WIB

⁴² <http://www.refugeecouncil.org.au/f/rhp-time.php> diakses 9 Juni 2014, diakses 9 Juni 2014, pukul 22:23 WIB

⁴³ Parliament of Australia, (4 September 2012), *A Statistical Guide To The Asylum Seeker Caseloads On Nauru And Manus Island*

⁴⁴ Amnesty International, (15 Februari 2008), *Australia winds up the Pacific Solution*, <http://www.amnesty.org.au/refugees/comments/9152/> diakses 15 Juni 2014, pukul 11:35 WIB



Grafik 4.1 : Jumlah Pencari Suaka Ilegal Yang Masuk Melalui Jalur Laut

Sumber:

http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1314/QG/BoatArrivals

Kesimpulan

Penulis berkesimpulan, kebijakan Australia terhadap pencari suaka tidak banyak berubah, pendekatan kebijakan terkait masalah pengungsi meskipun ada dua kepemimpinan yang berbeda dalam rentang waktu 2001 – 2010 tidak memperlihatkan perubahan signifikan, John Howard telah jelas tidak menginginkan adanya pencari suaka yang masuk ke Australia yang terlihat dari kebijakan-kebijakannya yang menurut penulis sangat menutup Australia untuk para pencari suaka dengan mengambil risiko untuk bertentangan dengan konvensi yang telah di tanda-tangani oleh Australia pada tahun 1951 silam. *Pacific Solution*, *Border Protection Bill*, dan mengamandemen *Migration Act* merupakan contoh nyata kebijakan yang anti-pencari suaka dan pengungsi, selain itu isu yang berkembang pada tahun 2001; *Global War on Terror* menjadi justifikasi John Howard untuk terus mempertahankan kebijakannya meskipun menerima kritik.

Sementara itu, kebijakan pada Kevin Rudd yang pada awal pemerintahannya sempat menghapus *Pacific Solution* dan *Temporary Protection Visa* namun tetap saja mempertahankan beberapa kebijakan yang ada pada pemerintahan sebelumnya seperti *Mandatory Detention* dan *Border Protection Bill*, menurut penulis meskipun Kevin Rudd dalam pemerintahannya lebih 'lembut' dari pemerintahan sebelumnya, pada intinya sama saja, pencari suaka tidak diinginkan di Australia, kebijakan Kevin Rudd dengan *Indonesian Solution* tidak ada bedanya dengan *Pacific Solution*, dan perlakuan berbeda

masih diterima bagi mereka yang datang dari perahu atau jalur laut dibandingkan dengan mereka yang tiba lewat jalur udara.

Kebijakan-kebijakan pemerintah Australia pada masa 2001-2010 menurut penulis, bukanlah kebijakan yang *pro* terhadap mereka yang mencari perlindungan terhadap ancaman sehingga sudah seharusnya pemerintah Australia melihat kembali konvensi yang ditandatangani pada tahun 1951, meskipun demikian, penulis menganggap kebijakan Kevin Rudd untuk menghapus TPV merupakan langkah yang cukup signifikan terhadap pencari suaka untuk mendapatkan perlindungan.

Sebagai penutup, penulis menyimpulkan bahwa pada 2001 – 2010, Australia telah jelas melanggar konvensi status pengungsi dengan kebijakan-kebijakannya yang telah dibahas sebelumnya, perbedaan kepemimpinan meskipun memberi harapan tidak menjamin akan adanya perubahan positif terhadap pencari suaka yang menginginkan perlindungan di Australia dan hal tersebut sangat jelas diperlihatkan pada masa John Howard maupun pada akhir masa kepemimpinan Kevin Rudd, penulis tidaklah mendukung aktivitas pencari suaka yang masuk secara ilegal ke Australia, namun penulis tidak setuju dengan kebijakan yang dilakukan Australia terhadap para pencari suaka terutama mereka yang benar-benar terbukti sebagai seorang pengungsi.

Daftar Pustaka

- Alexander J. Wood. 2002. *The "Pacific Solution": Refugees Unwelcome in Australia*, Volume 9 Issue 3, <http://www.wcl.american.edu/hrbrief/09/3australia.cfm> diakses pada 25 Mei 2014, pukul 19:58 WIB.
- Amnesty International Australia. 23 Mei 2006. *Migration Amendment (Designated Unauthorised Arrivals) Bill 2006*, <http://www.amnesty.org.au/refugees/comments/2245/> diakses 9 Juni 2014, pukul 22:04 WIB
- Australian Federal. 2001. <http://electionspeeches.moadoph.gov.au/speeches/2001-john-howard> diakses pada 9 Juni 2014, pukul 22:29 WIB.
- Banyu Perwita, Anak Agung & Y. M. Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*
- Bernard Keane. 17 Agustus 2011. *Cost of detention? \$113,000 per asylum seeker*, <http://www.crikey.com.au/2011/08/17/detention-centre-cost-of-asylum-seekers/> diakses pada 18 Mei 2014 pukul 15:20 WIB.
- Cristos Tsiolkas, (2013), <http://www.themonthly.com.au/issue/2013/september/1377957600/christos-tsiolkas/why-australia-hates-asylum-seekers> diakses pada 29 Mei 2014, pukul 22:00 WIB

Geoscience of Australia, *Maritime Boundary Definitions*,
<http://www.ga.gov.au/marine/jurisdiction/maritime-boundary-definitions.html>, diakses
pada 22 Juni 2014, pukul 15:37 WIB

Hill, Michael & Peter Hupe. 2002. *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice*, London: SAGE.

Journal of Refugee Studies. Vol. 22. No. 1

Knoepfel, Peter, *et.al.*. 2007 *Public Policy Analysis*, Bristol: The Policy Press.

Lembaga Australia – Indonesia,
<http://www.dfat.gov.au/All/publications/pengantar/index.html> diakses pada 11 Mei
2014 pukul 13:21 WIB

Levin Institute, *Migration and Globalization*, hal. 9,
<http://www.globalization101.org/uploads/File/Migration/migration.pdf> diakses pada
tanggal 22 Maret 2014, pukul 18:50 WIB.

Museum of Australian Democracy, *Australia's Refugee Policy*, diunduh dari
<http://static.moadoph.gov.au/opfgovau/media/images/apmc/docs/81-Refugees.pdf>
pada 13 April 2014, pukul 17:37 WIB

Parliament of Australia,(4 September 2012), *A Statistical Guide To The Asylum Seeker Caseloads On Nauru And Manus Island*.
http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BN/2012-2013/PacificSolution#_ftn17 diakses pada 7 Juni 2014,
pukul 14:46 WIB

Paul Maley. 22 Desember 2012. <http://www.theaustralian.com.au/news/viking-deal-to-sway-others-sri-lanka/story-e6frg6n6-1225812592012> diakses pada 25 Mei 2014,
pukul 20:07 WIB

Putri Marzela, Visa. 2014. *Kebijakan Pemerintah Perancis dalam Menangani Isu Imigran (Periode Kepresidenan Nicolas Sarkozy)*. Skripsi (tidak diterbitkan). Jakarta: Universitas Budi Luhur

Rachel Pannett, (4 september 2013), *Menantang Maut Menuju Suaka, The Wall Street Journal*,
<http://indo.wsj.com/posts/2013/09/04/menantang-maut-menuju-suaka-bagian-dua/> diakses pada 19 Mei 2014, pukul 12:18 WIB

Roger Zetter, (2010), *Are refugees an economic burden or benefit?*
<http://www.fmreview.org/preventing/zetter> diakses pada 18 Mei 2014 pukul 14:57
WIB

Tempo, (19 Februari 2014), <http://www.tempo.co/read/news/2014/02/19/078555778/Soal-Imigran-Gelap-Australia-Langgar-Konvensi-PBB> diakses pada 19 Mei 2014, pukul 12:14 WIB

UNHCR, *The Refugee Convention, 1951*

UNHCR.

http://unhcr.org.au/unhcr/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=58 diakses pada 13 April 2014, pukul 18:16 WIB

UNHCR. 9 Maret 2007. <http://www.unhcr.org/45efe7852.html> diakses pada 20 April 2014, pukul 19:16

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.

<http://www.unhcr.org/45efe7852.html> diakses pada 20 April 2014, pukul 19:16

<http://www.theguardian.com/news/datablog/interactive/2013/jul/25/what-happened-history-refugees> diakses pada 20 April 2014, pukul 12:05 WIB

<https://www.humanrights.gov.au/publications/last-resort-national-inquiry-children-immigration-detention/6-australias-immigration> diakses pada 25 Mei 2014, pukul 19:46 WIB

<http://theconversation.com/factcheck-are-newly-arrived-asylum-seekers-paid-more-than-pensioners-17501> diakses pada 18 Mei 2014, pukul 15:08 WIB

<http://www.refugeecouncil.org.au/f/rhp-time.php> diakses 9 Juni 2014, diakses 9 Juni 2014, pukul 22:23 WIB

**PEREDARAN ILLEGAL SMALL ARMS AND LIGHT WEAPONS (SALW)
DI KAWASAN AMERIKA
STUDI KASUS: KOLOMBIA**

Denik Iswardani W¹, Agi Noorman Hafidz²
deni_kiss@yahoo.com, ahjarreau@hotmail.com

Abstract

This paper analyzes the circulation and misuse of Small Arms and Light Weapons (SALW) in America. American sub-region, North America, Central America and South America all dealing with the illegal arms trade of SALW. The problem is analyzed as a contemporary threat to regional security. This paper uses secondary data analysis. Based on the results of the data analysis, this paper found that the source of the illegal circulation of weapons in the American region are interrelated. The final conclusion in the paper is that SALW pose a threat to regional security because it is closely related to the crimes and the existence of rebel groups in the Americas.

Keywords: SALW, trafficking, transnational issues

Pendahuluan

Isu pengedaran dan penyalahgunaan *small arms and light weapons* (SALW) pertama kali dibicarakan dalam sidang Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2001. Sejak saat itu, isu SALW semakin mendapat perhatian sebagai salah satu ancaman kontemporer (non-tradisional) yang dihadapi oleh masyarakat dunia.

Penyalahgunaan jenis senjata ini mengakibatkan banyak kematian yang utamanya adalah kelompok masyarakat yang masih berada pada usia yang produktif. SALW ilegal yang beredar telah menjadi akar permasalahan di kawasan atau di negara yang sedang mengalami konflik dengan meningkatkan intensitas ketegangan benturan yang sedang terjadi. Kondisi tersebut semakin parah ketika tingkat instabilitas konflik itu sendiri semakin kabur dan resolusi perdamaian mengenai penyelesaian konflik menjadi tidak efektif dan tidak berguna untuk menanganinya. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal PBB di tahun 2008, kebanyakan konflik yang terjadi di masa kini keberadaannya telah dipenuhi oleh kekerasan bersenjata. Senjata tersebut secara merata digunakan oleh berbagai macam aktor seperti kelompok-kelompok yang sedang mengalami perang sipil, terorisme, kelompok kejahatan terorganisir, kelompok pemberontak dan geng-geng yang berafiliasi dengan kegiatan kriminal lainnya.³

SALW memang memiliki karakteristik bentuk yang mudah diselundupkan karena mereka murah, mudah digunakan dan disembunyikan, tahan lama, mematikan, dan

¹ Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta

² Alumnus Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta

³ Secretary-General's report on small arms (S/2008/258)

tersedia secara luas. Hal tersebutlah yang membuat mengapa SALW ilegal yang telah beredar dapat bergerak bebas melintasi perbatasan seperti melalui *grey market* maupun pasar gelap yang secara substansial menjadi tempat perdagangan antara penjual dan pembeli barang ilegal ini.⁴

Untuk lebih memahami fenomena ancaman kontemporer SALW, tulisan berikut menjelaskan bagaimana senjata-senjata tersebut beredar secara ilegal di kawasan Amerika. Tingkat peredaran SALW di regional Amerika terbilang beragam dan sangat memprihatinkan. Pelaku yang terlibat juga cukup beragam mulai dari individu sampai dengan kelompok kejahatan yang terorganisir. Di kawasan Amerika tengah misalnya, menurut *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, lebih dari 70% tingkat pembunuhan disebabkan oleh penyalahgunaan senjata api dan hal ini membuat kawasan Amerika Tengah sebagai kawasan yang memiliki rating tertinggi dalam isu kekerasan bersenjata.⁵ Sedangkan di kawasan Amerika Selatan, peredaran dan penyalahgunaan senjata api merupakan isu kronis yang harus dihadapi oleh negara-negara yang berada di kawasan ini. Surplus senjata di kawasan ini adalah berjumlah sekitar 1.3 juta senjata api dan tiga perempatnya beredar di Argentina dan Brazil. Secara kuantitas, surplus senjata di Argentina disebabkan oleh jatuhnya rezim keditaktoran militer yang ketika itu sedang mengalami konflik dengan Inggris tentang sengketa wilayah Malvinas/Falklands.

Fenomena peredaran dan penggunaan SALW secara ilegal tersebut menyebabkan keamanan kawasan Amerika menghadapi ancaman serius. Bagian pertama tulisan ini akan membahas bagaimana suplai senjata yang banyak beredar di kawasan Amerika, mulai dari mana senjata itu berasal hingga bagaimana senjata-senjata tersebut dapat di tangan masyarakat luas. Sedangkan bagian selanjutnya akan menjelaskan fenomena penyebarannya.

Sumber: Suplai dan Surplus Senjata

Di sub-kawasan Amerika Utara, ancaman peredaran SALW memiliki keterkaitan yang kuat dengan transfer narkoba dalam lingkup perbatasan seperti yang terjadi di perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko.⁶ Seperti berdasarkan keterangan yang diberikan oleh *U.S. Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF)*, sirkulasi senjata yang terjadi di area perbatasan Texas sering terjadi dan selama 5 tahun terakhir

⁴ Mike Bourne dan Ilhan Berkol. 2006. "Deadly Diversions: Illicit Transfer of Ammunition for Small Arms and Light Weapons", dalam Stephanie Pezard dan Holgar Ander (eds), *Targeting Ammunition: A Primer*, (Geneva: Small Arms Survey), hal. 103.

⁵ Brian Finley. "WMD, Drugs, and Criminal Gangs in Central America: Leveraging Nonproliferation Assistance to Address Security/Development Needs With UN Security Council Resolution 1540", (The Stimson Center and Stanley Foundation), hal. 107.

⁶ Tony Payan. 2006. "The Three U.S.-Mexico Border Wars: Drugs, Immigration, and Homeland Security", (Westport: Praeger Security International), Hal. 39-41.

sebesar 87 persen dari total senjata yang disita oleh otoritas Meksiko merupakan senjata yang berasal dari Amerika Serikat.⁷ Amerika Serikat adalah salah satu negara produsen senjata terbesar bagi pasar global dengan total produksi mencapai \$ 2.7 miliar.⁸ Di samping itu, negara ini memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk dapat membeli dan memiliki senjata api untuk tujuan atas keperluan perlindungan diri dan olahraga. Oleh karena hal tersebut, setiap tahunnya, jutaan senjata api baru dijual secara legal oleh perusahaan yang memiliki izin resmi dari pemerintah. Saat ini, sekitar 250 juta senjata api dimiliki secara pribadi oleh masyarakat Amerika Serikat yang kebanyakan senjata yang ada di dalam sirkulasi peredaran adalah sejenis pistol atau revolver.

Surplus senjata api yang melimpah di Amerika Serikat tadi, membuat kontrol senjata sangat sulit dilakukan oleh otoritas yang ada. Ditambah atas keberadaan pasar gelap membuat akses terhadap senjata tersebut terbuka bagi kelompok kriminal terorganisir seperti halnya kartel narkoba yang banyak berada di Meksiko.⁹ Mereka, para kartel itu, memiliki hubungan yang erat dengan para pedagang senjata ilegal di Amerika Serikat. Signifikansi perdagangan komoditas senjata dengan narkoba mendasari bahwa faktor ekonomi adalah elemen utama yang menyebabkan mengapa jenis perdagangan ilegal tersebut sangat marak terjadi di perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko. Di sana terdapat beberapa jalur penyelundupan yang sering digunakan oleh para penyelundup dalam mengirimkan barang ilegal seperti perbatasan kota Juarez, Mexicali, Laredo dan Tijuana. Mereka menggunakan metode “ant-trafficking” dalam mengirimkan barang ilegal seperti senjata sejenis AK-47 melalui pengiriman secara berkala dan dalam kuota terbatas. Secara statistik, senjata sejenis AK-47 yang diselundupkan dari AS ke Meksiko ditawarkan seharga \$1.200-\$1.600 dan semakin meningkat 2 kali lipatnya ketika senjata tersebut mencapai kawasan selatan Meksiko.¹⁰

Sedangkan, peredaran SALW di sub-kawasan Amerika Tengah memiliki keterkaitan dengan faktor sejarah karena di wilayah ini ketika Perang Dingin termasuk ke dalam wilayah yang mengalami perang sipil yang berkepanjangan.¹¹ Pada masa tersebut, AS dan Uni Soviet adalah 2 negara yang mensuplai SALW secara besar-besaran ke negara

⁷ Daniela Pastrana, 2012. “Mexican and U.S. Activists Join Forces Against Arms Smuggling”. Diakses dari <http://www.ipsnews.net/2012/06/mexican-and-u-s-activists-join-forces-against-arms-smuggling/>, pada tanggal 26 Agustus 2012.

⁸ Tamar Gabelnick, et al. “A Guide to the US Small Arms Market, Industry and Exports, 1998-2004” (Geneva: Small Arms Survey), hal. 32-57.

⁹ Philip J. Cook. et al. 2009. “The Illicit Firearms Trade in North America”, (Graduate Institute of International and Development Studies : Switzerland), hal. 11-15.

¹⁰ Eric L. Olson. 2011. “Challenges and Opportunities for the U.S. and Mexico to Disrupt Firearms Trafficking to Mexico” (Woodrow Wilson International Center for Scholar Latin American Program – Mexico Institute), hal. 5.

¹¹ Brian Finlay. “WMD, Drugs, and Criminal Gangs in Central America: Leveraging Nonproliferation Assistance to Address Security/Development Needs With UN Security Council Resolution 1540”, (The Stimson Center and Stanley Foundation), Hal. 7.

seperti El Salvador dan Honduras. Kedua negara tersebut adalah negara penerima suplai senjata terbesar di tahun 1980-an dan awal 1990-an.¹² Hal tersebut mengakibatkan jutaan SALW beredar di sub-kawasan Amerika Tengah dan membawa rasa yang tidak aman bagi keamanan masyarakat setempat. Sekarang ini, peredaran SALW di sub-kawasan Amerika Tengah lebih banyak dipenuhi oleh produksi senjata yang berasal dari AS. Baik secara legal dan ilegal, transaksi dan pengiriman senjata yang terjadi pada umumnya melibatkan para *middlemen*.¹³ Perihal yang membedakan adalah secara legal kegiatan transfer SALW telah mendapatkan otoritas dari *Department of State and Commerce*. Berbeda dengan kegiatan penyelundupan SALW yang sering terjadi di perbatasan AS. Kegiatan tersebut lebih dikuasai oleh kelompok kejahatan terorganisir yang memiliki afiliasi dengan tindakan kriminal lainnya seperti penyelundupan narkoba.¹⁴

Surplus SALW yang tidak terkontrol juga terjadi di sub-kawasan Amerika Selatan atau lebih dikenal dengan Amerika Latin. Pada tahun 2007, diperkirakan surplus senjata yang berada di sub-kawasan ini adalah sebesar 1,3 juta yang mana 75 persen dari total tersebut lebih banyak berada di 2 negara yaitu Argentina dan Brazil. Di Argentina, sebanyak 552 ribu SALW yang 425 ribu di antaranya adalah jenis senjata modern yang tidak digunakan secara maksimal. Hal ini menjadi ancaman serius karena membuka peluang terjadinya perubahan kepemilikan dan penyalahgunaan senjata seperti jatuhnya jenis senjata tersebut ke tangan masyarakat sipil atau sindikat kejahatan seperti yang terjadi di sub-kawasan Amerika yang lainnya.¹⁵ Surplus senjata yang terjadi di Argentina disebabkan oleh beberapa macam faktor, salah satunya adalah pemotongan jumlah personel keamanan negara pada tahun 1994 ketika Argentina dipimpin oleh Presiden Carlos Saul Menem. Profesionalisasi personel militer dilakukan dengan mengurangi jumlahnya, yaitu dari 485 ribu menjadi hanya 76.112 tentara.¹⁶ Sama halnya dengan fenomena peredaran SALW yang terjadi di negara-negara Amerika Latin lainnya, di Brazil senjata api menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi kehidupan geng-geng lokal yang memiliki hubungan dengan tindakan kriminal lainnya seperti penyelundupan narkoba. Hal itu dapat terjadi karena meningkatnya urbanisasi, krisis sosial dan ekonomi, pergantian demografik penduduk, dan rendahnya level keamanan yang ada di lingkungan masyarakat. Akibatnya, Brazil merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat

¹² William Godnick, et al. 2002. "Stray Bullets: The Impact of Small Arms Misuse in Central America", Occasional Paper No. 5. (Geneva: Small Arms Survey), Hal. 3-5.

¹³ Middlemen didefinisikan sebagai pihak ketiga yang mengatur proses transaksi SALW antara pihak pembeli dan penjual. Mereka biasanya memiliki koneksi yang kuat dengan berbagai agen perbatasan dan juga mereka para middlemen bertugas mengatur bagaimana proses pengiriman sehingga barang yang telah dipesan dapat dengan aman sampai pada para pembeli.

¹⁴ *Op Cit*, Brian Finlay. Hal. 8.

¹⁵ Aaron Karp. 2009. "Surplus Arms in South America; A Survey", Working Paper No. 7 (Geneva: Small Arms Survey). Hal. 15 – 17.

¹⁶ *Ibid*, Hal. 26 – 28.

pembunuhan yang disebabkan oleh penyalahgunaan senjata api tertinggi di dunia dengan angka 29,2 per 100 ribu penduduk.¹⁷

Sebagai salah satu kawasan yang keberadaannya terancam oleh aktivitas peredaran SALW yang tidak terkontrol, kawasan Amerika merupakan salah satu tempat dimana terdapat produsen utama SALW yang tingkat produksinya sangat tinggi. Menurut data yang dirilis oleh *US Census Bureau* di tahun 2004, Amerika Serikat, telah memproduksi hampir USD2,7 miliar dan di tahun 2009 terjadi peningkatan sebesar USD300 juta menjadi USD3 miliar.¹⁸ Ekspor senjata yang dilakukan oleh AS lebih berdasarkan pada kepentingan komersial dan pertimbangan akan kebijakan luar negerinya¹⁹. Semenjak usainya Perang Dunia II, kebijakan luar negeri AS lebih berporos pada pendekatan militer kepada negara aliansi. Pada tahun 2005, AS memiliki hubungan militer dengan 146 negara secara global. Transfer senjata, termasuk SALW merupakan bagian dari rencana AS untuk memodernisasikan perangkat militer negara-negara aliansinya tersebut.²⁰

Di Amerika Latin, negara seperti Argentina dan Brazil adalah 2 negara yang memiliki pengaruh besar dalam proses produksi senjata api yang banyak dihasilkan oleh manufaktur besar dan kecil. Kedua negara tersebut, di sub-kawasan Amerika Latin, lebih banyak menguasai pasar senjata api domestik karena besarnya dorongan negara Amerika Latin lainnya dalam usahanya memenuhi kebutuhan gudang persenjataan. Produksi senjata api di Argentina lebih dikuasai oleh negara, seperti *Fábrica Militar de Armas Portátiles (FMAP)*.²¹ Sedangkan, di Brazil produsen besar SALW terbagi menjadi 2 kategori yaitu *IMBEL* dan *Forjas Taurus*. Setiap produsen SALW ini memproduksi senjata untuk kepentingan militer dan sipil yang berorientasi pada penggunaan domestik dan ekspor.²² *IMBEL* ialah perusahaan milik negara yang memiliki hubungan kerjasama dengan Kementerian Pertahanan Brazil. Ia secara khusus membuat senjata untuk personel militer seperti bahan peledak, amunisi berat, perlengkapan komunikasi dan alat berperangannya lainnya termasuk persenjataan seperti M911 A1, GC MD1, dan senapan otomatis lainnya.²³ Di samping itu, *Forjas Taurus* secara khusus memproduksi senjata

¹⁷ Lydia Richardson & Adele Kirsten. 2005. "Armed Violence and Poverty in Brazil: A Case Study of Rio de Janeiro and Assessment of VivaRio for the Armed Violence and Poverty Initiative", (Centre for International Cooperation and Security). Hal. 13-15.

¹⁸ Tamar Gabelnick, et al. 2006. "A Guide to the US Small Arms Market, Industry and Exports, 2998-2004", (Geneva: Small Arms Survey). Hal. 32.

¹⁹ "Small Arms", diakses dari <http://business.highbeam.com/industry-reports/metal/small-arms>, pada tanggal 29 Agustus 2012.

²⁰ *Op Cit*, Tamar Gabelnick. Hal. 57.

²¹ "Domestic Arms Production" diakses dari <http://www.fas.org/asmp/library/scourge/scourge-ch2.pdf>, pada tanggal 30 Agustus 2012.

²² *Ibid*,

²³ Pablo Dreyfus, et al. 2010. "Small Arms in Brazil: Production, Trade, and Holdings", Special Report. (Geneva: Small Arms Survey). Hal. 40.

berjenis *handguns*. Perusahaan ini lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan konsumen domestik dengan meningkatkan kemampuan perusahaan melalui proses modernisasi tunggal yaitu menjalin hubungan kerja sama strategis dengan perusahaan produsen senjata milik negara lainnya seperti *Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE)* yang berasal dari Chile.²⁴

Kasus SALW di Kolombia

Peredaran senjata yang melimpah ditambah dengan lemahnya sistem keamanan masyarakat domestik membawa kawasan Amerika ke dalam situasi yang memungkinkan terjadinya proses diversifikasi senjata dari legal ke ilegal. Kondisi tersebut membuka peluang kepada kelompok kejahatan terorganisir mendapatkan akses SALW dengan mudah. Pada akhirnya hal tersebut akan semakin mempertinggi tingkat penyalahgunaan jenis senjata ini di kawasan Amerika. Penyebaran SALW dan segala komponennya dapat terjadi mulai dari proses rantai transfer seperti selama pengiriman, masa transit, maupun perubahan status akuisisi kepemilikan senjata tersebut. Namun, penyebaran juga dapat terjadi pada level *end-user* dan hal ini lebih terlihat kompleks. Fenomena ini lebih disebabkan oleh karena diperkirakan 2/3 dari 600 juta SALW yang ada pada sirkulasi global dimiliki oleh masyarakat sipil. Senjata yang mereka miliki tersimpan di tempat yang posisi keamanannya minimal dan kelemahan inilah yang membuat setiap tahunnya jumlah senjata yang berubah status kepemilikan, terus bertambah.²⁵

Fenomena proses diversifikasi yang terjadi di kawasan Amerika dapat dilihat pada sebagian besar wilayah yang sedang mengalami konflik internal. Hal ini juga kelihatan dengan banyaknya kelompok-kelompok kekerasan seperti geng dan kelompok pemberontak yang marak tumbuh di sebagian besar wilayah di kawasan Amerika. Brazil adalah salah satu negara yang kondisi keamanan masyarakatnya terancam oleh sebaran senjata yang berasal dari arsenal aparat keamanan negara dan kepemilikan privat. Contohnya, di Rio de Janeiro secara mayoritas senjata yang telah disita selama 1974 – 2004 oleh pihak yang berwajib kebanyakan merupakan produk domestik. Sebagian besar senapan otomatis yang juga telah disita, lebih banyak berasal dari luar negeri seperti AS, Argentina, Italia, Jerman, dan Spanyol.²⁶ Senjata yang telah mengalami proses diversifikasi ini –terutama bagi yang berasal dari luar wilayah Brazil- selanjutnya diselundupkan melalui rute darat dan laut. Rute darat misalnya, sebagai salah satu

²⁴ *Ibid*, Hal. 42 – 43.

²⁵ Owen Greene dan Elizabeth Kirkham. 2010. "Preventing Diversion of Small Arms and Light Weapons: Strengthening Border Management Under the UN Programme of Action", (Safer World: Centre for International Co-operation and Security). Hal. 10-11.

²⁶ Pablo Morales. "Colombia and Brazil: Deadly Diversions" diakses dari <https://nacla.org/article/colombia-and-brazil-deadly-diversions>, pada tanggal 1 September 2012.

negara yang berbatasan langsung dengan 10 negara dengan hampir 17 ribu km total perbatasan yang lebih dari setengahnya adalah hutan, menyulitkan aparat keamanan perbatasan untuk melakukan patroli. Sedangkan, pelabuhan yang berada di Santos, Sao Paulo dan Paranagua, Parana adalah 2 tempat penyelundupan yang sering digunakan untuk mengirimkan senjata dikarenakan terlalu renggangnya periode pemeriksaan bagi barang yang masuk ke wilayah tersebut.²⁷

Kolombia menjadi contoh kasus fenomena penyebaran senjata api yang pada mulanya adalah senjata legal kemudian menjadi senjata ilegal karena digunakan oleh pihak pemberontak. Isu penyalahgunaan senjata api dan kekerasan di sana sudah sangat memprihatinkan. Kondisi tersebut adalah akibat dari tingginya tensi politik domestik, ideologi, dan ekonomi. Di negara ini, kekerasan bersenjata sering terjadi dan hal tersebut secara erat terkait dengan kelompok kejahatan terorganisir. Menurut *UNODC*, terdapat 3 bentuk dimensi kekerasan bersenjata di negara ini yang saling memiliki kaitan 1 sama lain. Dimensi-dimensi seperti konflik bersenjata, dinamika kejahatan terorganisir, dan konflik komunal/sosial yang dilandasi oleh konflik antarkelas yaitu pemerintah dengan kelompok pemberontak yang berjuang untuk mendapatkan kemenangan mutlak atas revolusi sosial.²⁸ Dengan bentuk dimensi tersebut, membuat Kolombia memiliki karakteristik kekerasan bersenjata yang tengah terjadi berbeda dengan fenomena sejenisnya di kawasan Amerika lainnya. Seperti contoh, di sub-kawasan Amerika Utara dan Tengah, penyalahgunaan senjata api pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan eksistensi individu ataupun kelompok seperti kelompok geng dan pedagang narkoba.

UNIDIR memaparkan bahwa keterhubungan antara narkoba dan penyelundupan senjata di Kolombia terbagi menjadi beberapa tahap yang dimulai ketika tahap awal proses produksi narkoba hingga tahap konsumsi. Melalui beberapa bentuk tahap aktivitas ilegal yang melibatkan banyak aktor, memungkinkan mereka, dengan beragam alasan tentunya memiliki senjata ilegal. Hal tersebut dapat ditunjukkan bahwa senjata adalah instrumen yang mesti dimiliki oleh setiap aktor yang terlibat. Senjata tersebut berfungsi untuk melindungi rantai aktivitasnya masing-masing. Petani *cocain* misalnya, menggunakan senjata untuk melindungi perkebunan mereka atas dasar pertahanan diri. Sedangkan para kartel pada tahap distribusi *cocain* juga menggunakan senjata api untuk menjaga mereka dari ancaman pihak keamanan dan para pesaing mereka dalam hal ini

²⁷ Hannah Stone. 2011. "Brazil Police Say Sea is New Arms Trafficking Frontier" diakses dari <http://www.insightcrime.org/insight-latest-news/item/1242-brazil-police-say-sea-is-new-arms-trafficking-frontier>, pada tanggal 3 September.

²⁸ Sandro Calvani, *et al.* "Violence, Crime and Illegal Arms Trafficking in Colombia", (United Nations Office on Drugs and Crime). Hal. 15-16.

adalah kartel kompetitor.²⁹ Penyelundupan narkoba dan senjata api memang tidak dapat dipisahkan, karena pada umumnya mereka menggunakan jalur penyelundupan yang sama. Masalah semakin kompleks karena pelakunya melibatkan warga sipil dan para pemberontak. Oleh karena itu, sangatlah sulit bagi aparat keamanan memberantas kegiatan ilegal ini, apalagi jika hanya dilakukan dengan tindakan pencegahan salah satu rantai pihak saja.

Di Kolombia terdapat beberapa organisasi kriminal dan pemberontak yang memenuhi dinamika konflik antarkelas di antaranya ialah 2 kelompok pemberontak sayap kiri yang keberadaannya sangat mengkhawatirkan keamanan nasional Kolombia. Mereka adalah *Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)* dan *Ejército de Liberación Nacional (ELN)* atau *National Liberation Army*. *FARC* adalah kelompok pemberontak yang memiliki struktur organisasi yang rumit dan terkesan militeristik. Organisasi ini merupakan organisasi pemberontak yang menguasai bagian selatan Kolombia dengan beranggotakan sekitar 15 – 17 ribu prajurit dengan pendapatan pertahun mencapai ratusan juta dolar yang diperoleh dari pengolahan *cocain*. Sedangkan *ELN*, dengan basis Marxist-Leninist sebagai ideologi perjuangan mereka, merupakan kelompok pemberontak yang memiliki target asing seperti *transnational corporations* yang berinvestasi di Kolombia terutama pada bidang energi.³⁰

Selain itu, juga terdapat kelompok paramiliter seperti *Auto defensas Unidas de Colombia (AUC)* atau *United Self-Defense Forces of Colombia*. Kelompok ini beroperasi di seluruh wilayah Kolombia yang juga aktif melakukan tindakan kriminal seperti terlibat langsung dalam proses produksi narkoba dan pemungutan pajak bagi pemilik lahan sebagai bagian untuk perlindungan dari pemberontak. *AUC* dalam operasionalisasinya juga memerangi kelompok pemberontak *FARC* khususnya di wilayah yang tidak tercakup oleh pasukan militer Kolombia.³¹ Dalam modus operandinya, *AUC*, dengan jumlah prajurit mencapai lebih dari 30 ribu pada skala nasional, membentuk kelompok-kelompok kecil untuk menghindari deteksi agar mereka dapat dengan mudah menyisihkan pihak musuh melalui strategi yang sistematis. Kelompok para militer ini sedianya bekerja sama dengan para penyelundup narkoba agar operasi mereka berjalan secara aman tanpa gangguan dari pihak luar seperti kelompok pemberontak. Fenomena semacam ini dapat dilihat

²⁹ Daniel Ávila Camacho. 1998. "Interrelationship between Drug Trafficking and the Illicit Arms Trade in Central America and Northern South America", dalam Péricles Gasparini Alves dan Daiana Belinda Cipollone (Eds), *Curbing Illicit Trafficking in Small Arms and Sensitive Technologies: An Action-Oriented Agenda*, (New York: UNIDIR). Hal. 52-53.

³⁰ Kim Cragin & Bruce Hoffman. 2003. "Arms Trafficking and Colombia", (National Defense Research Institute). Hal. 4-6.

³¹ *Ibid*,

khususnya di Magdalena Medio region di Kolombia Tengah, sebelah timur laut bagian Antioquia, dan bagian wilayah Cordoba dan Meta.³²

Ada beberapa rute penyelundupan yang SALW ke wilayah Kolombia:

Pertama, sub-region Amerika Tengah yang menjadi sumber terbesar penyelundupan SALW ilegal bagi kelompok bersenjata yang masuk ke wilayah Kolombia. Perbatasan Kolombia-Panama menjadi titik utama persenjataan yang berasal dari negara-negara sub-region Amerika Utara dan Tengah serta dari Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Senjata yang masuk ke Kolombia sendiri merupakan senjata sisa konflik yang pernah terjadi di negara seperti El Salvador, Honduras, dan Nikaragua.;

Kedua, perbatasan Kolombia dan Ekuador tempat area ini memfasilitasi penyelundupan barang-barang ilegal yang berbahaya seperti bahan peledak juga jenis AK-47, AKM rifles, granat tangan, dan lain lain;

Ketiga, perbatasan antara Kolombia dan Venezuela. Di sini, para penyelundup memanfaatkan wilayah Vichada dan Guainia yang karakteristik wilayahnya dipenuhi oleh hutan hujan yang lemah akan kontrol perbatasan oleh pihak otoritas perbatasan;³³

Keempat, perbatasan Kolombia dan Brazil. Modus operandi penyelundupan di area ini banyak menggunakan metode pengiriman melalui udara dan sungai berhubung tidak adanya akses darat yang menghubungkan kedua negara tersebut. Dalam kasus ini, penting untuk menyebutkan negara seperti Suriname dan negara-negara yang masuk ke kategori *Triple Border Area* (Brazil, Paraguay, dan Argentina) karena aktivitas penyelundupan yang terjadi memiliki keterkaitan yang erat dengan organisasi kriminal seperti perdagangan narkoba dan pencucian uang di kawasan;³⁴

Terakhir, perbatasan antara Peru dan Kolombia, meskipun intensitas penyelundupan senjata di wilayah ini tidak sebesar apabila dibandingkan dengan perbatasan yang telah disebutkan di atas, bagaimanapun, berdasarkan jumlah senjata seperti HK-G3, FN MAG kaliber 7.62, dan bahan peledak yang telah disita oleh otoritas setempat tetap menjadikan wilayah ini sebagai wilayah yang rawan akan penyelundupan senjata ilegal ke wilayah Kolombia.

Tidak hanya mengalami penyelundupan senjata api dari luar teritorial, Kolombia juga mengalami penyelundupan senjata secara internal. Hal ini dapat terjadi pada beberapa faktor seperti pengguna senjata api pada level individual yang tidak termonitor secara baik oleh aparat keamanan. Faktor tersebut membuka peluang bagi mereka untuk melakukan bisnis jual-beli senjata api di pasar gelap secara mudah. Lemahnya sistem

³² "AUC", diakses dari <http://www.insightcrime.org/criminal-groups/colombia/auc/item/974-auc>, pada tanggal 4 September 2012.

³³ *Op Cit*, Sandro Calvani, et al. Hal. 33-38.

³⁴ Horacio Calderon. 2007. "Organized-Crime and Terrorism in the Triple Border Area" (Artikel)

manajemen keamanan gudang persenjataan di Kolombia juga membuat pasukan keamanan negara yang bersimpati kepada para pemberontak bersedia menyokong mereka persediaan senjata dan amunisi.³⁵ Ada 3 rute yang dapat diidentifikasi sebagai rute penyelundupan senjata api secara internal di Kolombia. Pertama adalah area perbatasan Venezuela yaitu El Tarra dan Convención ke Ocaña atau melalui Cúcuta ke Pamplona yang setiap rute ini membawa mereka ke Bucaramanga dan ke Barrancabermeja. Rute yang kedua dimulai dari Teluk Urabá menuju ke Dabeiba. Dari sana senjata hasil selundupan dibawa ke Medellín untuk proses distribusi ke pemberontak *AUC* ataupun *FARC*. Ketiga adalah rute di dalam kota Bogotá melalui jaringan penyelundupan senjata yang dikuasai sepenuhnya oleh *FARC*. Penyelundup senjata di Bogotá pada dasarnya beraksi dalam skala kecil, mereka secara terpisah berbagi tugas dari proses pemesanan sampai pada pengiriman senjata.³⁶

Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa kawasan Amerika memang menghadapi masalah serius berkaitan dengan kasus peredaran dan penyalahgunaan *SALW* ilegal di kawasan Amerika terutama di Kolombia. Negara-negara di kawasan Amerika rata-rata memiliki hukum nasional yang mengizinkan kepemilikan senjata api oleh pihak sipil. Hal yang memperburuk keadaan adalah ketidakmampuan pemerintah dalam mengawasi dan mengendalikan senjata yang beredar di masyarakat. Penyebaran senjata-senjata tersebut berasal dari negara eksportir terbesar di kawasan dan ada juga yang berasal dari luar kawasan Amerika. Masifnya senjata yang beredar di kawasan Amerika, mendorong banyaknya senjata yang tidak terpakai dan membuat senjata tadi rawan untuk dicuri oleh pihak yang berkepentingan. Selain dilekatkan dengan isu-isu kejahatan transnasional lainnya, terutama narkoba, kawasan Amerika juga perlu mewaspadaai penggunaan senjata-senjata legal yang digunakan secara ilegal oleh kelompok-kelompok pemberontak.

Surplus produksi senjata yang mengalami proses diversifikasi dan maraknya kegiatan kriminal serta pemberontakan adalah faktor utama yang membuat konteks isu ini semakin sulit untuk ditangani. Dengan alasan demikian, membuat tingkat penyalahgunaan senjata api untuk tindakan kriminal di kawasan Amerika sangat tinggi dan berdampak langsung pada keamanan regional secara lebih luasnya.

³⁵ *Op Cit*, Kim Cragin & Bruce Hoffman. Hal. 43 – 46.

³⁶ *Ibid*, Hal. 47 – 49.

Daftar Pustaka

- Bourne, Mike & Ilhan Berkol. 2006. *Deadly Diversions: Illicit Transfer of Ammunition for Small Arms and Light Weapons*, dalam Stephanie Pezard dan Holgar Ander (eds), *Targeting Ammunition: A Primer*, (Geneva: Small Arms Survey).
- Calvani, Sandro *et al.* *Violence, Crime and Illegal Arms Trafficking in Colombia*. (United Nations Office on Drugs and Crime).
- Camacho, Daniel Ávila. 1998. *Interrelationship between Drug Trafficking and the Illicit Arms Trade in Central America and Northern South America*. dalam Péricles Gasparini Alves dan Daiana Belinda Cipollone (Eds), *Curbing Illicit Trafficking in Small Arms and Sensitive Technologies: An Action-Oriented Agenda*, (New York: UNIDIR).
- Cook, Philip J. *et al.* 2009. *The Illicit Firearms Trade in North America*. (Graduate Institute of International and Development Studies : Switzerland).
- Cragin, Kim & Bruce Hoffman. 2003. *Arms Trafficking and Colombia*. (National Defense Research Institute).
- Dreyfus, Pablo *et al.* 2010. *Small Arms in Brazil: Production, Trade, and Holdings*. Special Report. (Geneva: Small Arms Survey).
- Finlay, Brian. 2005. *WMD, Drugs, and Criminal Gangs in Central America: Leveraging Nonproliferation Assistance to Address Security/Development Needs with UN Security Council Resolution 1540*. (The Stimson Center and Stanley Foundation).
- Gabelnick, Tamar *et al.* 2006. *A Guide to the US Small Arms Market, Industry and Exports, 1998 – 2004*. (Geneva: Small Arms Survey).
- Godnick, William *et al.* 2002. *Stray Bullets: The Impact of Small Arms Misuse in Central America*. Occasional Paper No. 5. (Geneva: Small Arms Survey).
- Greene, Owen dan Elizabeth Kirkham. 2010. *Preventing Diversion of Small Arms and Light Weapons: Strengthening Border Management Under the UN Programme of Action*. (Safer World: Centre for International Co-operation and Security).
- Karp, Aaron. 2009. *Surplus Arms in South America; A Survey*. Working Paper No. 7 (Geneva: Small Arms Survey).
- Morales, Pablo. *Colombia and Brazil: Deadly Diversions*. diakses dari <https://nacla.org/article/colombia-and-brazil-deadly-diversions>.
- Olson, Eric L. 2011. *Challenges and Opportunities for the U.S. and Mexico to Disrupt Firearms Trafficking to Mexico*. (Woodrow Wilson International Center for Scholar Latin American Program – Mexico Institute).

Pastrana, Daniela. 2012. *Mexican and U.S. Activists Join Forces Against Arms Smuggling*. Diakses dari <http://www.ipsnews.net/2012/06/mexican-and-u-s-activists-join-forces-against-arms-smuggling/>, pada tanggal 26 Agustus 2012.

Payan, Tony. 2006. *The Three U.S.-Mexico Border Wars: Drugs, Immigration, and Homeland Security*. (Westport: Praeger Security International).

Richardson, Lydia & Adele Kirsten. 2005. *Armed Violence and Poverty in Brazil: A Case Study of Rio de Janeiro and Assessment of VivaRio for the Armed Violence and Poverty Initiative*. (Centre for International Cooperation and Security).

Secretary-General's report on small arms (S/2008/258)

Stone, Hannah. 2011. *Brazil Police Say Sea is New Arms Trafficking Frontier*. diakses dari <http://www.insightcrime.org/insight-latest-news/item/1242-brazil-police-say-sea-is-new-arms-trafficking-frontier>, pada tanggal 3 September.

KEBERHASILAN KOREA SELATAN MEMPERTAHANKAN POSISINYA SEBAGAI “MACAN ASIA”¹

Ani Khoirunnisa, Tuswoyo, Ahmad Hidayat²
ani.khoirunnisa@uta45jakarta.ac.id

Abstract

Dependency of South Korea for the economic development to industrial countries, such as The United States, Western Europe and Japan, has affected by the financial crisis of industrialized countries, even from other countries. At least for 30 years, South Korea was increasing rapidly from an agriculture country to become an industrial and trading nations. South Korea was considered as an economic model followed by the other countries. By the entrepreneur who become the driver of economy, supported by the government policy specially in the development manufacturing industry, and capital, the Chaebol were able to compete in the global and become the economic foundation of South Korea.

Keywords: *dependency, economic development, government policy*

Latar Belakang

Krisis ekonomi merupakan fenomena yang senantiasa hadir dalam perkembangan masyarakat dunia, meskipun sebab dan akibatnya tidak selalu sama bagi setiap negara. Penyebabnya bisa terkait dengan kondisi-kondisi internal negara tersebut, seperti dalam krisis 2008 yang terjadi di Amerika Serikat, juga bisa dampak dari pengaruh eksternal seperti dalam krisis 1998 terhadap beberapa negara di Asia Tenggara dan Asia Timur. Akibat yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi tersebut semakin menguat seiring perubahan pola hubungan antar negara dari pola ketergantungan ke saling ketergantungan.³ Apalagi terhadap negara-negara yang mengandalkan pendapatan nasionalnya dari ekspor, seperti negara-negara industri baru yang sebagian besar berada di wilayah Asia Timur.

Bagi negara-negara tersebut, tidak akan mungkin dapat menghindar dari krisis ekonomi, karena krisis ekonomi yang terjadi di negara-negara tujuan ekspor, seperti pada krisis finansial 2008 akan mengurangi permintaan barang yang *notabene* menjadi andalan bagi negara-negara pengekspor tersebut. Oleh karena itu, bagi negara-negara di kawasan Asia Timur, seperti Korea Selatan (Korsel), persoalannya bukan bagaimana strategi menghindar dari krisis, tetapi bagaimana strategi mengatasi atau keluar dari krisis.

¹ Hasil Penelitian Kelompok

² Ketiganya merupakan Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Jakarta

³ Tom Houston, *The Greatest Need in the in The World Today, Together*, Juli-September, 1988, hal 2.

Sejak tahun 1950, Korea Selatan telah mampu memposisikan dirinya sebagai Macan Asia Timur bersama-sama Hongkong, Taiwan. Tetapi kemudian pada tahun 1998, beberapa negara macan Asia tersebut dihepas badai krisis ekonomi yang begitu dahsyat, yang bermula dari krisis finansial di Thailand, yang kemudian berimbas ke Hongkong, Taiwan dan Korea Selatan. Kemudian pada tahun 2008, sekali lagi negara-negara macan Asia Timur tersebut juga terkena krisis yang juga tidak kurang dahsyatnya dengan badai krisis finansial 1998, meskipun sebabnya berbeda dengan krisis finansial sebelumnya.⁴

Pada krisis finansial 1998, keberhasilan Korsel keluar dari kubangan krisis tersebut dikaitkan dengan kepemimpinan nasional yang dianggap mampu menciptakan stabilitas ekonomi dan kesanggupan para pemimpin Korea Selatan meletakkan dasar-dasar fundamental ekonomi yang kuat, sehingga negara tersebut dapat segera bangkit dari krisis ekonomi. Ketergantungan Korea Selatan terhadap perkembangan ekonomi negara-negara industri maju seperti Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Jepang telah menjadikan negara tersebut terkena dampak krisis finansial dari negara-negara industri besar tersebut lebih parah dibanding dengan negara-negara lain yang tingkat ketergantungannya lebih rendah seperti Indonesia. Menariknya Korea Selatan dan beberapa negara macan Asia Timur lainnya, mampu lebih cepat *recovery* atau memperbaiki ekonominya. Permasalahannya mengapa Korea Selatan lebih cepat *recovery* dari pada negara-negara di kawasan lainnya ? Itulah yang akan menjadi fokus dari tulisan ini, yang juga merupakan hasil penelitian tim kami.

Kerangka Teori

Studi ekonomi politik terdapat berbagai penjelasan tentang model pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara, mulai dari model merkantilisme klasik, liberal klasik, Keynesian, neo-klasik, neoliberal, neo-Keynesian atau neo-merkantilisme.⁵ Kalau disederhanakan, sebenarnya terdapat polarisasi yang membelah pemikiran ekonomi politik yang ada, yaitu maksimalisasi peran negara dan minimalisasi peran negara. Didik J Rachbini mengatakan, terdapat dua model ekonomi politik yang saling berpengaruh yaitu model sosialis dan model liberal.⁶ Merkantilisme, Keynesian, dan neo-merkantilisme merupakan model pemikiran yang merekomendasikan peran negara lebih besar dalam mengendalikan pasar yang diperlukan bagi penciptaan kesejahteraan ekonomi. Sebaliknya, liberal klasik, neo-klasik, neoliberal merupakan model pemikiran yang mengedepankan peran pasar dalam perekonomian. Pemikiran ekonomi politik yang

⁴Dampak krisis finansial 2008 begitu luar biasa, seperti dilaporkan *Korea Times*, telah terjadi banyak peristiwa bunuh diri, dan gila akibat anjloknya pasar bursa saham, Selasa, 28 Oktober 2008 | 13:21 WIB.

⁵ Caporaso A. James, David P. Levine, *Theory of Political Economy*, New York: Cambridge, 1997.

⁶Didik J. Rachbini, *Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik*, edisi kedua, Bogor, Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 10.

merekomendasikan peran negara yang lebih besar dibanding peran pasar dalam mengatur interaksi ekonomi, menerima kebijakan proteksi dalam perdagangan serta merekomendasikan kebijakan peningkatan ekspor dan membatasi import sebagai sebuah strategi untuk menciptakan kesejahteraan nasional.⁷ Model ini dikenal pula dengan istilah *economic nationalists*.⁸

Pada pandangan liberal, peran negara dalam ekonomi akan membuat perekonomian tidak efisien. Oleh karena itu, peran negara perlu dibatasi bahkan jika mungkin dihilangkan sama sekali dalam campur tangannya terhadap ekonomi.⁹ Mengingat, intervensi negara dianggap sebagai tindakan yang dapat mendistorsi pasar. Dengan demikian, melalui liberalisme ekonomi (tanpa intervensi negara) dapat dijamin "adanya kebebasan bagi semua insan ekonomi untuk menentukan sendiri apa yang akan dikonsumsi, apa yang akan diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk memperdagangkannya."¹⁰

Neoliberal merupakan produk pemikiran ekonomi politik yang muncul pada akhir-abad kedua puluh, yang pada dasarnya merupakan kelanjutan dari liberalisme klasik yang dipengaruhi oleh teori perekonomian neoklasik, yang intinya mengurangi atau menolak terjadinya hambatan yang dilakukan pemerintah dalam ekonomi domestik karena akan mengarah pada munculnya distorsi dan *high cost economy* yang kemudian akan berujung pada tindakan koruptif. Neoklasik itu sendiri adalah aliran pemikiran yang mencoba menjabarkan pembentukan harga, produksi, dan distribusi pendapatan melalui mekanisme permintaan dan penawaran pada suatu pasar.

Menurut Deliarnov, kalau dibandingkan dengan Neoklasik, pandangan Neoliberal ini sudah mengakomodasi kritik-kritik yang dilancarkan pakar-pakar Sosialis/Marxis terhadap Liberal Klasik.¹¹ Perbedaan mendasar antara kubu Liberal Klasik dengan Neoliberal, terletak pada perbedaan dalam memanfaatkan peran pasar. Kalau Liberal Klasik menjadikan pasar untuk mengatur jalannya perekonomian, Neoliberal lebih dari itu

⁷ Charles W. Kegley, Jr. & Eugene R. Wittkopf (1999) *World Politics, Trends and Transformation*, New York :Worth Publishers, Inc, hlm 208-209.

⁸ Ibid, hal 212-213.

⁹ Budi Winarno, *Pertarungan Negara vs Pasar*, (Yogyakarta: MedPress, 2002), hal.163-164.

¹⁰ Hadi Soesastro, "AFTA dan Proses Liberalisasi di Indonesia", dalam Mohamad Ikhsan, Chris Manning, (ed.), *80 tahun Mohamad Sadli : Ekonomi Indonesia di Era Orde Baru*, (Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2002), hal. 338.

¹¹ Lihat, Deliarnov, *Ekonomi Politik: Mencakup Berbagai Teori dan Konsep yang Komprehensif*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2002), . 136. Salah satunya yang dikemukakan V.I.Lenin dalam teori imperialismenya, yang menyatakan bahwa kapitalisme yang pada awalnya mengandalkan "pasar bebas" akan menjadi kapitalisme yang monopolistik mengendalikan pasar, itulah kemudian muncul gagasan yang mengatur monopoli dan oligopoly yang di Amerika Serikat dikenal dengan Undang-Undang AntiTrust.

menjadikan pasar sebagai satu satunya tolok ukur untuk menilai kegagalan dan keberhasilan semua kebijakan pemerintah.¹²

Elizabeth Martinez dan Arnaldo Garcia, mengemukakan beberapa indikator dari kebijakan neoliberal yaitu; kebijakan lebih mengandalkan pada kekuasaan pasar, deregulasi adalah cara terbaik meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memangkas pembelajaan publik untuk layanan sosial seperti pendidikan dan layanan kesehatan, mengurangi jaringan pengamanan bagi kaum miskin, dan bahkan biaya perawatan jalanan, jembatan, persediaan air, menjual perusahaan-perusahaan, barang-barang, dan jasa milik negara kepada investor swasta, menghapus konsep “barang publik” atau “komunitas” dan menggantikannya dengan “tanggung-jawab individu.

Pemikiran-pemikiran ekonomi politik tersebut berakar pada faham negara liberal atau liberalisme yang menyangkal tujuan negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Tugas negara terbatas pada pemeliharaan keteraturan kehidupan, perlindungan hukum dan pembelaan acaman dari luar. Kesejahteraan rakyat menjadi tanggungjawab rakyat itu sendiri.¹³ Berbeda dengan negara-negara sosialis yang menempatkan peran negara dalam mensejahterakan rakyat.

Perbedaan mazhab ekonomi memang sangat dipengaruhi oleh ideologi yang dijadikan *platform* partai politik. Secara teoritik partai politik yang berorientasi kerakyatan akan mendukung mazhab intervensi negara, karena negara harus berpihak pada rakyat dalam proses persaingan pasar. Negara tidak boleh membiarkan kompetisi di pasar berjalan secara bebas, karena yang demikian itu akan menyengsarakan rakyat yang kalah dalam persaingan bebas tersebut. Negara dituntut perannya untuk mensejahterakan masyarakat, tidak menyerahkan masalah kesejahteraan rakyat pada tanggung jawab rakyat itu sendiri.

Mazhab intervensi negara ini, dalam praktiknya memang tidak tunggal terdapat komunitas pendukung yang berbeda-beda, ada yang menekankan pada peran negara untuk meningkatkan kesejahteraan yang kemudian dikenal sebagai konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari ideologi Partai Sosial Demokrat yang berkembang di Eropa Barat. Kemudian ada model neo merkantilisme gaya Jepang, atau ada yang menyebut negara kesejahteraan ala Jepang. Ada juga model “populis” ala RRC dan Uni Soviet atau negara komunis lainnya, yang juga

¹² Ibid, hal.166.

¹³ Lihat, Franz Magnis-Suseno, *EtikaPolitik: Prinsip-prinsip Moral DasarKenegaraan Modern*, (Jakarta: PT.GramediaPustakaUtama, 1994), hal. 319.

menekankan pada peran negara dalam merencanakan, dan melaksanakan aktivitas perekonomian.¹⁴

Kalau para pendukung ekonomi intervensi negara memperoleh pijakan ideologisnya pada facisme dengan konsep ekonomi merkantilisme, yang menekankan pada perdagangan internasional dan peran negara,¹⁵ serta pemikiran demokrasi sosial dengan konsep ekonomi negara kesejahteraan (*welfare state*), yang bersumber dari pemikiran Keynesian. Para pendukung ekonomi pasar bebas memperoleh pijakan ideologis dari pemikiran kapitalisme-liberal yang kemudian berkembang dari liberalisme klasik, neo-klasik dan neo-liberalisme.¹⁶ Mazhab neoliberal muncul sebagai kritik atas mazhab Keynesian yang dianggap tidak sanggup menghadapi krisis dunia akibat *oil boom*, dan inefisiensi negara. Negara menjadi begitu lemah, karena adanya beban-beban sosial yang tidak perlu. Itulah sebabnya muncul berbagai kebijakan yang menekankan pada deregulasi dan debirokratisasi yang tujuannya adalah mengurangi beban negara dari beban-beban sosial yang tidak perlu.¹⁷

Mazhab intervensi negara mengintrodusir peran negara dalam perekonomian, di mana para pengusaha diharapkan dapat mengikuti dan melaksanakan program pemerintah, sebagaimana yang dijalankan di Jepang maupun Korea Selatan.¹⁸ Sebuah model pembangunan ekonomi "negara kemakmuran" ala Jepang dengan ciri-cirinya antara lain; negara menjadi sentral dalam penentuan keputusan jangka panjang, kemitraaan birokrasi dan kaum wiraswasta, sistem subsidi untuk kebutuhan pokok, dsb.¹⁹ Dilakukan pengintegrasian proses produksi dan distribusi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengintegrasian secara vertikal maupun horizontal dalam dunia bisnis, industrial dan perbankan yang telah terbukti berhasil di Jepang dicoba untuk diadopsi. Di samping untuk mencegah munculnya kesenjangan sosial-ekonomi yang lebih parah, juga untuk menghadapi persaingan global yang membutuhkan sinergi dari kekuatan-kekuatan ekonomi yang tersebar di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan Panglaykim, keberhasilan

¹⁴ Mengenai ciri-cirinya masing-masing, lihat, Didin S. Damanhuri, "Model-Model Pembangunan Pilihan Indonesia" dalam Didin S. Damanhuri, *Ekonomi Politik Alternatif : Agenda Reformasi Abad 21*, (Jakarta: Pustakan Sinar Harapan, 1996), hal 32-34.

¹⁵ Deliarnov, *Ekonomi Politik: Mencakup Berbagai Teori dan Konsep yang Komprehenship*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hal 23.

¹⁶ James A.Caporaso, David P.Levine, *Theories of Political Economy*, (New York: Cambridge University Press, 1992), hal 79-100. Lihat, Deliarnov,*op.cit*, hal 21-66.

¹⁷ *Ibid*, hal 173.

¹⁸ Lihat, J.Panglaykim, "Strategi, Tingkat Pertumbuhan/Perkembangan dan Keberhasilan Suatu Ekonomi", dalam *Analisa, Penyesuaian Kebijakan Ekonomi*, 1986-7, Tahun XV, No 7, Juli 186, hal 523-543.

¹⁹ Ciri-ciri selengkapnya lihat, Didin S. Damanhuri, "Model-Model Pembangunan Pilihan Indonesia" dalam Didin S. Damanhuri, *Ekonomi Politik Alternatif : Agenda Reformasi Abad 21*, (Jakarta : Pustakan Sinar Harapan, 1996), hal 33. Lihat juga, M Dawam Rahardjo, "Asumsi-asumsi Ideologis dari Model-model Pembangunan Ekonomi", dalam M Dawam Rahardjo, *Esei-esei Ekonomi Politik*, (Jakarta :LP3ES, 1985), hal 58-77.

Jepang terletak pada penciptaan suatu sistem terintegrasi, hubungan terpadu antara pebisnis, politisi, elite birokrasi, senantiasa mampu menciptakan suatu suasana bahwa pemerintah berperan sebagai inisiator, inovator, dan pendukung, yang beriringan dengan sektor bisnis, industrial, dan perbankan.²⁰

Di Amerika Serikat polarisasi ideologi nampak dalam perbedaan orientasi kebijakan dari Partai Republik yang cenderung menekankan pada gagasan-gagasan ekonomi liberal, sementara Partai Demokrat cenderung menekankan pada gagasan-gagasan ekonomi campuran (Keynesian).²¹ Depresi ekonomi tahun 1930an pada dasarnya merupakan implikasi dari beroperasinya sistem ekonomi liberal yang menekankan pada liberalisasi pasar dan minimalisasi peran negara.²² Melalui *New Deal*, Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt (Partai Demokrat) mendorong agar negara berupaya membuat regulasi yang sifatnya melindungi rakyat, seperti pemberian subsidi, tunjangan sosial, jaminan sosial tenaga kerja, perlindungan terhadap buruh, serta berbagai regulasi yang cenderung bersifat protektif, seperti lisensi import. Artinya Partai Demokrat menjadikan konsep intervensi negara sebagai acuan untuk menjalankan perekonomiannya. Itulah sebabnya Presiden Barack Obama, sebagai presiden yang berasal dari Partai Demokrat tetap bersikeras memperjuangkan Asuransi Kesehatan bagi kelompok bawah meskipun kemudian ditentang Partai Republik yang kemudian berakibar pada *policy deadlock*, atau yang dikenal dengan *Shutdown*.

Sebaliknya Partai Republik lebih menekankan pada kebijakan liberal dengan mempertahankan kebijakan yang mengurangi semaksimal mungkin intervensi negara. Kebijakan yang menekankan pada peran minimal negara tersebut, pada tahun 1980-an nampak dalam berbagai kebijakan Ronald Reagan dan Margaret Thatcher dari Partai Konservatif, berupa pengurangan subsidi, jaminan sosial, deregulasi, debirokratisasi, yang kemudian dikenal dengan model perekonomian *Reaganomic* dan *Thatchernomic*. Kedua pemimpin negara adidaya tersebut dikenal sebagai pendukung ekonomi neoliberal, yang lebih mengedepankan pengurangan peran negara dalam mempengaruhi berjalannya mekanisme pasar. Dalam perkembangannya, sebagaimana dikemas dalam

²⁰ Lihat, Bob Widya hartono, "Gaya Manajemen Jepang" dalam Mengapa Jepang, Prisma No 5, Mei 1983, Tahun XII, Jakarta, LP3ES, hal 38.

²¹ Pemikiran Keynes telah mempengaruhi Franklin D. Roosevelt yang memunculkan *New Deal*, dan kebijakan baru tersebut menjadi program Partai Demokrat yang di dalamnya mencirikan negara kesejahteraan di Amerika Serikat pasca depresi tahun 1930an.

²² Sebagaimana dijelaskan David Harvey, pada tahun 1930an terjadi suatu *slump* berskala dunia ketika pendayagunaan kapasitas menjadi rendah, surplus komoditi tak bisa dijual, dan pengangguran yang terus meningkat, yang implikasinya pada terdevaluasinya dan dalam beberapa kasus hancurnya surplus-surplus kapital dan berkurangnya surplus-surplus tenaga kerjasampai pada tingkat yang menyedihkan. Lihat, David Harvey, *Imperialisme Baru : Genealogi dan Logika Kapitalisme Kontemporer*, (Jakarta : Resist Book, 2010), hal. 98.

paket Konsensus Washington, peran negara dalam neoliberalisme ditekankan untuk melakukan empat, sebagai berikut: (1) pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi; (2) liberalisasi sektor keuangan; (3) liberalisasi perdagangan; dan (4) pelaksanaan privatisasi BUMN.

Perkembangan Korea Selatan: Suatu Tinjauan Historis

Cikal bakal negara Korea Selatan berasal dari kerajaan kuno, Choson, yang sudah ada sejak 2.333 tahun sebelum Masehi. Pada sekitar abad tersebut bangsa Cina mendirikan koloni di daerah kerajaan tersebut, kemudian pada 1910-1945, Korea berada dalam kekuasaan Jepang. Setelah serangan yang gagal dari Jepang pada tahun 1592 – 1598, Korea jatuh di bawah kekuasaan Manchu dari utara. Beberapa abad berikutnya, Korea mengisolasi diri dari pergaulan internasional. Proses isolasi ini memungkinkan terjadinya integrasi sosial, ekonomi, dan kebudayaan, sehingga di masa depan persoalan disintegrasi yang terkait dengan ketiga hal tersebut dapat dihindari, di samping memperkuat persatuan sebagai entitas bangsa. Nilai-nilai dan etos kerja dari bangsa Korea terbentuk bersamaan dengan isolasi tersebut. Hal ini mengingatkan kita pada fenomena serupa yang terjadi di Jepang, sebelum dilakukan meiji restorasi.

Pada awal tahun 1870-an, Jepang kembali berupaya merebut Korea yang berada dalam pengaruh Cina, yang berakibat pada terbunuhnya Ratu Myeongseong oleh mata-mata Jepang pada 1895. Kemudian pada tahun 1905, Jepang memaksa Korea untuk menandatangani Perjanjian Eulsa yang menjadikan Korea sebagai protektorat Jepang, dan mulai tahun 1910 Jepang secara efektif menguasai Korea. Melalui penjajahan tersebut, Jepang berusaha keras untuk mengintegrasikan Korea ke dalam wilayah Jepang, dengan melarang penggunaan bahasa Korea dan nama Korea. Motif pengembangan wilayah ke Korea bagi Jepang tidak lain untuk mengembangkan industrialisasinya yang mulai berkembang, terutama industri pertanian, sehingga Korea menjadi negara agroindustri dengan sistem tuan tanah.

Melalui berbagai cara sistem industri pertanian tersebut berada di tangan orang Jepang. Di daerah-daerah yang subur di bagian selatan dikendalikan langsung oleh pemerintah pendudukan, Jepang.²³ (Budiman, 1991:74). Pola ini mengingatkan kita pada penguasaan tanah-tanah di Jawa oleh penjajah Belanda, yang dikenal dengan *direct rule* dan *indirect rule*, ketika penguasaan tanah menandai awal atau sebagai bagian dari sistem kolonialisme.

Meskipun pada umumnya penjajahan selalu bermakna negatif, karena di dalamnya terdapat eksploitasi, tetapi melalui penjajahan tersebut pemerintah Korsel pasca

²³Lihat Arief Budiman, 1991, hlm.74.

kemerdekaan, memperoleh berbagai warisan yang menguntungkan, seperti pengembangan industri pertanian pasca kemerdekaan yang diwariskan dari penjajah Jepang, industri manufaktur yang dulu dikembangkan Jepang dan setelah kemerdekaan dipaksa oleh Amerika Serikat untuk diserahkan ke Korea Selatan.

Ketika negara-negara berkembang pada umumnya menghadapi persoalan alih teknologi, Korea Selatan diuntungkan oleh pengembangan industri yang dilakukan penjajah Jepang. Penjajah Jepang berupaya menekan agar dalam proses industrialisasi dan pengembangan ekonomi wilayah jajahannya tidak memunculkan industri-industri lokal dengan modal pribumi, tetapi membiarkan munculnya burjuasi pribumi tumbuh untuk menghadapi buruh. Pemerintah Jepang tidak ingin para penguasanya berhadapan langsung dengan buruh pribumi untuk menghindari konflik yang tidak diinginkan.²⁴ (Budiman, 1991:75).

Sisi positif dari proses ini adalah munculnya enterpreneur-enterpreneur yang kelak menjadi tulang punggung perekonomian Korsel, *Chaebol*. Para enterpreneur tersebut menjadi motor penggerak perekonomian, dengan didukung melalui kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri manufaktur, dan permodalan, para *Chaebol* tersebut mampu berkompetisi di tingkat global. Kebangkitan para *Chaebol* tersebut baru terasa setelah pemerintahan Park Chung Hee berkuasa.

Kekalahan Jepang ini berakibat pada penyerahan semenanjung Korea kepada Sekutu, dalam hal ini Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai pemenang Perang Dunia ke II, bukan kepada kemerdekaan bangsa Korea, seperti yang terjadi dengan Indonesia. Pada akhirnya pemenang Perang Dunia II tersebut berusaha membelah Korea sejajar dengan garis lintang 38°, di mana tentara Uni Soviet menduduki bagian utara Korea sedangkan tentara Amerika di bagian selatan. Korea memprotes keputusan internasional tersebut, karena hanya memberikan harapan semu pada rakyat Korea yang menginginkan pembentukan pemerintahan yang berdaulat. Tekad untuk melawan dan menentang dominasi asing tidak peduli apapun bentuknya telah memperkuat patriotisme bangsa Korea. Pasukan Amerika Serikat dan pasukan Uni Soviet mendirikan pemerintahan militer di bagian selatan dan di bagian utara semenanjung Korea, seraya menaburkan benih perpecahan Korea. Pada saat yang bersamaan konflik ideologi antara pendukung komunis dan pendukung nasionalis mulai tumbuh semakin menguat. Kelompok masyarakat pendukung Komunis kemudian berpaling dan memperoleh dukungan Uni Soviet, sementara kelompok pendukung nasionalis memperoleh dukungan Amerika Serikat.

²⁴Arief Budiman, 1991, hlm. 75.

Fakta historis ini bukan tidak bermakna bagi bangsa Korea, dengan kebencian yang amat mendalam terhadap sikap Amerika Serikat dan Uni Soviet yang telah menunda kemerdekaannya, telah memunculkan sikap patriotik bagi bangsa Korea untuk tidak begitu saja menerima uluran tangan dari pihak asing meskipun diperlukan. Sebut saja misalnya terhadap bantuan *IMF* pada krisis finansial 1997 yang disertai dengan sejumlah kesepakatan untuk liberalisasi ekonomi. Pemerintah Korea Selatan, menerima bantuan ekonomi dari *IMF* tetapi dengan tetap menjalankan kebijakan yang mereka yakini meskipun bertentangan dengan saran *IMF*. Artinya uluran tangan diterima dengan sikap kritis terhadap ketentuan yang menyertainya. Ini dapat dilihat sebagai pengaruh positif dari pengalaman bangsa Korea ketika berhubungan dengan Barat, khususnya Amerika Serikat dan Uni Soviet menjelang kemerdekaan Korea. Perpecahan dua Korea tak terelakkan dan semakin akut ketika kedua Adikuasa tersebut larut dalam Perang Dingin, bahwa Korea Selatan dijadikan *buffer state* bagi Amerika Serikat dan Korea Utara dijadikan batu pijakan dalam rangka politik domino bagi Uni Soviet.

Dengan dukungan Uni Soviet, terbentuk pemerintahan komunis di Korea Utara yaitu Republik Demokratik Rakyat Komunis. Dengan arahan dari tentara pendudukan Amerika Serikat, Korea Selatan mengadakan pemilihan umum untuk memilih Presiden. Artinya di semenanjung Korea sebelah Selatan terbentuk pemerintahan demokrasi, sebagai rival dari sistem komunis yang dikembangkan di Utara.

Pemilu tersebut mengantarkan Syngmen Rhee, menjadi presiden Korea Selatan pertama pada tanggal 15 Agustus 1948. Hal ini juga menandakan berakhirnya kepemimpinan sementara Amerika Serikat atas Korea Selatan. Melalui peristiwa inilah, Korea Selatan akhirnya memiliki hak penuh dalam menjalankan pemerintahan sendiri setelah sekian lama berada di bawah kolonial Jepang yaitu selama 35 tahun lamanya (1910–1945). Meskipun demikian, karena posisinya sebagai *buffer state* dalam konstelasi dan konstatasi global pada era perang dingin pada waktu itu, pemerintah baru Korea Selatan tetap berada di bawah payung Amerika Serikat. Inilah salah faktor yang memberi kontribusi bagi penyaluran bantuan luar negeri Amerika Serikat ke Korea Selatan secara besar-besaran. Dalam hal ini, Amerika Serikat tidak ingin pemerintah Korea Selatan jatuh ke tangan komunis, lantaran gagal dalam pembangunan ekonominya. Rupanya besarnya bantuan yang diberikan pemerintah Amerika Serikat tidak sebanding dengan kebocoran yang terjadi dalam pemerintahan Syngmen Rhee. Pemerintahan baru Korsel ini dikenal korup, sehingga pada suatu kali pemerintah Amerika Serikat berpikir untuk menghentikan bantuannya terhadap pemerintah Syngmen Rhee.

Perbedaan ideologi dan suasana internasional pada tahun 1950-an, *cold war* telah memengaruhi hubungan kedua negara. Ketegangan hubungan antarkedua negara tak

terelakkan, dan pada tanggal 25 Juni 1950, tentara Korea Utara menyerang Korea Selatan. Sejak itulah kedua Korea tersebut mengalami perang saudara, dari tahun 1950 hingga tahun 1953. Perang Korea dapat dilihat sebagai uji coba persenjataan konvensional Amerika Serikat dan Uni Soviet, dan dapat pula dilihat sebagai perang dengan perantara (*war by proxy*) antara kedua adikuasa tersebut. Sebuah gambaran yang merepresentasikan kondisi dan situasi Perang Dingin antara kedua adikuasa di berbagai belahan dunia.

Strategi dan dukungan Uni Soviet terhadap persenjataan Korea Utara, menjadi penyebab bagi kekalahan di pihak Korea Selatan, akan tetapi Amerika Serikat dapat menggunakan bantuan PBB untuk menyelamatkan Korea Selatan dari kekalahan total, dan perangpun dapat diakhiri dengan gencatan senjata pada Juli 1953. Upaya penyatuan Korea dan ketegangan dalam hubungan kedua negara menjadi fenomena yang tidak pernah berakhir sejak gencatan senjata tersebut. Boleh jadi ketegangan tersebut merupakan kondisi yang kurang menyenangkan bagi rakyat dan pemimpin kedua negara, tetapi dapat pula dilihat sebagai “magma” yang senantiasa memacu adrenalin untuk menjadi yang terbaik dalam pengelolaan negara. Itulah salah satu faktor yang ditengarai memberi kontribusi bagi semangat rakyat Korea Selatan untuk hidup lebih baik dengan etos kerja yang berakar pada nilai budaya bangsanya.

Upaya rekonsiliasi yang belum memenuhi titik terang, pada akhirnya membawa kedua negara yang satu bangsa tersebut berkompetisi untuk menjadi negara yang lebih unggul. Korea Selatan dengan keberhasilan ekonominya lebih unggul dalam pencapaian kesejahteraan rakyat, sebaliknya dengan program pengembangan nuklirnya Korea Utara unggul dalam persenjataan.

Namun demikian, sejak Syngman Ree berkuasa, Korea Selatan belum dapat mencapai keunggulan yang diharapkan, karena Ree gagal menyelesaikan persoalan kesejahteraan rakyat. Dalam masa kekuasaannya, Rhee lebih menitikberatkan pada persoalan politik dari pada ekonomi, ia melakukan kampanye menghapus komunisme sekaligus melancarkan strategi untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Ia memenangkan kursi Majelis Pertama Korea Selatan pada 10 Mei 1948 melalui pemilihan parlemen setelah partai sayap kiri memboikot pemilu. Setelah terpilih sebagai pembicara dari Majelis Konstituante pada 31 Mei, Rhee terpilih sebagai presiden pertama Korea Selatan dengan dukungan dari Amerika Serikat, mengalahkan Kim Koo.²⁵ Pada tanggal 15 Agustus 1948, ia secara resmi mengambil alih kekuasaan militer Amerika Serikat dan kedaulatan *de jure* atas rakyat Korea Selatan dari Pemerintahan Provisional.

²⁵Kim Koo, Presiden terakhir dari Pemerintahan Sementara dengan hitungan 182-13 pada tanggal 20 Juli 1948. Perlu dicatat bahwa Kim Koo tidak menyadari pencalonannya sebagai presiden; nominasi ini adalah upaya untuk mendiskreditkannya dan kelompok nasionalis lainnya.

Menurut Byung-Nak Song:

"President Syngman Rhee's main interest was in politics, and in directing the attention of the Korean people to issues such as unification of the country. Economic growth was given a very low priority throughout his era (1948-1961). Growth of industries and thereby the economy as a whole then was based upon import substitution, foreign assistance, and over-valued exchange rates. Access to foreign exchange, the securing from the government of subsidies of various types, and quantitative restrictions on imports were the key determinants of business success during President Rhee's tenure" (Kepentingan utama Presiden Syngman Rhee adalah pada politik dan dalam mengarahkan perhatian rakyat Korea Selatan pada isu-isu seperti penyatuan negara. Pada masa pemerintahannya, pertumbuhan ekonomi sangat tidak diprioritaskan. Pertumbuhan industri dan demikian perekonomian secara keseluruhan didasarkan pada substitusi impor, bantuan asing, dan nilai tukar yang *overvalued*. Akses ke valuta asing, subsidi pemerintah dalam berbagai jenis, dan pembatasan impor kuantitatif merupakan faktor utama keberhasilan bisnis selama Rhee menjadi presiden). (Song, 1997:84)

Sebagai presiden, Rhee dikenal memerintah dengan diktator, memerintahkan tentara sekuritas internalnya (dikepalai tangan kanannya, Kim Chang-ryong) untuk menangkap dan menyiksa agen yang diduga komunis dari Korea Utara. Pemerintahannya juga pernah melakukan beberapa pembantaian, yang paling besar salah satunya adalah pembantaian di Pulau Jeju dikarenakan pemberontakan oleh golongan sayap kiri. Dengan cara diktator tersebut Rhee mempertahankan kekuasaan, sehingga meskipun reputasinya kurang baik tetap dapat memenangkan pemilu ke pemilu.

Meskipun Rhee memperoleh dukungan Amerika Serikat, tetapi bantuan dari negara Adikuasa tersebut tidak kunjung mampu mengatasi perekonomian rakyatnya, yang kian hari kian terpuruk. Baru setelah tahun 1960-an, ketika Korea Selatan mampu melewati masa kekacauan, di bawah pemerintahan Park Chung Hee berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Keberhasilan tersebut melekatkan julukan terhadap Korea Selatan sebagai 'Keajaiban Sungai Han' pada tahun 1970-an. Keajaiban ekonomi yang dicapai pemerintah Korea Selatan tersebut, terkait dengan berbagai hal, di antaranya sistem pemerintahan yang relatif stabil, dukungan politik dan ekonomi Amerika Serikat dan Jepang, serta kebijakan pemerintah dan dukungan masyarakat Korea Selatan.

Perkembangan ekonomi Korea Selatan kontemporer tidak dapat dipisahkan dari peran Park Chung Hee sebagai peletak dasar perekonomian negara. Meskipun keberhasilan Park Chung Hee telah menjadi bagian dari sejarah Korea Selatan, tetapi peletakan dasar perekonomian yang dilakukan Park menjadi sangat penting bagi perkembangan perekonomian Korea Selatan pada fase berikutnya. Bersamaan dengan proses pembangunan ekonomi yang dilakukan Park, ternyata semakin kuat pertumbuhan kelas pedagang dan industriawan pribumi. Mereka pada umumnya terlibat dalam

perdagangan gandum, peminjaman uang dan industri-industri tradisional yang tidak membutuhkan modal yang besar. Arief Budiman.²⁶ (1991:75). Sebelum Pemerintahan Park Chung Hee, kondisi perekonomian Korea Selatan belum dapat dikatakan berkembang, karena pemerintahan baru hasil pemilu pasca kemerdekaan justru mengalami kemunduran. Korupsi, kolusi dan nepotisme ditengarai menjadi biang keladi dari kemunduran perekonomian pemerintahan baru tersebut.

Fundamental Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Pada bagian ini akan dibahas tiga hal utama yaitu: Kebijakan Ekonomi yang diletakkan dasar-dasarnya oleh Park Chung Hee, yang kemudian menjadi signifikan bagi peletakan dasar fundamental ekonomi Korea Selatan, kemudian tentang Strategi Kebijakan Ekonomi Korea Selatan dalam mengatasi kesenjangan sosial ekonomi. Kedua hal tersebut kemudian bermuara pada kesejahteraan rakyat Korea Selatan yang dinikmati rakyat Korea Selatan.

A. Park Chung Hee: Peletak Dasar Kebijakan Ekonomi

Sejak Korea Selatan memulai pembangunan ekonomi pada tahun 1962, yaitu setelah presiden dijabat oleh Park Chung Hee, ekonomi Korea Selatan telah tumbuh menjadi salah satu yang tercepat di dunia. Dalam waktu kurang dari 30 tahun Korea Selatan maju pesat dari sebuah negara pertanian menjadi negara industri dan perdagangan. Korea Selatan saat itu dianggap sebagai model ekonomi yang layak diikuti oleh negara-negara lain.

Rezim militer yang berhasil membangun kesejahteraan ekonomi di Korsel tersebut, lahir setelah terjadinya kudeta militer oleh Mayor Jenderal Park Chung Hee dibantu rekannya Kolonel Kim Jong Pil pada tanggal 16 Mei 1961. Park berhasil menggulingkan pemerintahan sipil Yun Po Son yang juga telah bersama-sama militer menjatuhkan pemerintahan Syngman Rhee yang terkenal korup dan otoriter.

Amerika Serikat cenderung tidak melakukan intervensi politik atas jatuhnya Korea Selatan di bawah rezim militer, karena sudah banyak dikecewakan oleh pemerintahan Presiden Syngman Rhee yang korup. Banyak bantuan ekonomi AS bagi pembangunan industri yang diselewengkan untuk kegiatan politik. Sikap diam Amerika Serikat ini sering dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi pemerintah Amerika Serikat yang mulai khawatir terhadap sekutu dekatnya dalam menghadapi Korea Utara yang didukung Uni Soviet dalam konstelasi perang dingin (*cold war*). Kegagalan pembangunan ekonomi yang dilajalkan Syngman Rhee, akan berakibat bagi akutnya kemiskinan di Korsel,

²⁶Arief Budiman, op.cit, hlm. 75.

yang menjadi pintu masuk bagi proliferasi komunisme. Posisi sebagai *buffer state*, memang telah mendorong Amerika Serikat untuk membantu Korsel agar mampu keluar dari kemiskinan, tetapi wabah korupsi yang akut pada Rezim Ree, memaksa Amerika Serikat untuk mencari alternatif agar bantuannya tidak sia-sia.

Setelah kudeta, sebagai bagian dari konsolidasi kekuatan politiknya, Park mengkonsentrasikan semua kekuatan sosial, politik, dan ekonominya di bawah komandonya. Sebagaimana dalam pemerintahan militer, prioritas Presiden Park adalah menciptakan stabilitas politik guna mendukung membangun perekonomian, dan memperkuat pertahanan nasional. Ia cenderung mengesampingkan prinsip-prinsip demokrasi atau cara hidup demokrasi. Menurutnya demokrasi dapat memperlambat kemajuan ekonomi dan memicu konflik sosial yang dampaknya pada melemahnya pertahanan nasional. Park memberlakukan demokrasi terbatas, yaitu dengan membatasi kebebasan sipil, pers dan menyatakan pendapat.

Park Chung Hee membuat pemerintahannya bertumpu pada kekuatan yang berasal dari militer, birokrat, dan teknokrat. Oleh karena itu, rezim Korea Selatan di bawah Park Chung Hee disebut Rezim Otoriter Birokratis. Presiden Park termasuk salah seorang peletak dasar *strong military-dominated government* di Asia. Model otoriter birokratik, dengan berbagai kelemahannya, memang telah menjadi unsur penting dalam penciptaan stabilitas, sehingga ekonomi dapat bertumbuh cepat tanpa terdistorsi oleh konflik-konflik sosial yang kurang produktif. Sebut saja misalnya Brazil yang dikenal sebagai penganut model otoriter birokratik, mampu memacu pertumbuhan ekonominya sampai dengan tingkat yang begitu tinggi, mencapai 10 per tahun. Sebuah capaian yang luar biasa, meskipun dari sisi pemerataan menjadi persoalan tatkala partisipasi rakyat dalam turut serta memperebutkan sumber-sumber ekonomi yang penting bagi kehidupannya menjadi sangat terbatas. (Karl W. Deutsch, 1981).

Park Chung Hee melakukan amandemen konstitusi guna memperkuat posisi politiknya. Melalui konstitusi baru, kediktatoran Park Chung Hee semakin kokoh. Melalui sistem ini presiden dipilih secara tidak langsung oleh Dewan Unifikasi Nasional yang dibentuk secara manipulatif dan khusus bertugas untuk memilih presiden. Presiden juga diberi wewenang untuk menunjuk 1/3 anggota DPR yang memungkinkan presiden untuk mengontrol lembaga legislatif secara langsung. Otoritarianisme Park Chung Hee mendapat dukungan dari kalangan birokrasi, militer, dan polisi. Pola ini tidak berbeda dengan upaya Presiden Soeharto pada era Orde Baru, yang berusaha melakukan rekayasa kelembagaan parlemen sehingga dapat mengurangi peran kontrol terhadap kekuasaannya. Pemerintah dapat secara leluasa, mengambil keputusan untuk melancarkan program-program pembangunan ekonominya.

Kebijakan pembangunan ekonomi yang dijalankan bersifat *top down*, karena dalam perencanaannya dan strategi pelaksanaannya tidak melibatkan partisipasi masyarakat, rakyat diposisikan sebagai obyek pembangunan, sehingga dominasi negara begitu kuat dalam menata perekonomian maupun dalam menata hubungan industrial yang di dalamnya merupakan interaksi *triparted* antara penguasa, pengusaha dan buruh. Bersamaan dengan semakin membaiknya perekonomian, kesadaran politik pun semakin menguat, sebagai akibatnya tututan ke arah partisipasi politik yang lebih tinggi pun tak terelakkan, tetapi justru semakin menguatnya tuntutan partisipasi tersebut, telah berakibat pada semakin menguatnya tekanan politik terhadap masyarakat. Demi tetap terjaganya stabilitas politik yang diharapkan, Park Chung Hee memilih garis politik represif, dengan membungkam seluruh potensi oposisi. Pada tanggal 6 Desember 1971 dengan dalih mengamankan negara dari demonstrasi-demonstrasi, presiden dengan dukungan militer mengumumkan negara dalam keadaan darurat perang, membubarkan Majelis Nasional, menutup semua universitas yang menjadi basis demonstrasi, melarang semua kegiatan politik, dan pada bulan Oktober 1972 mengeluarkan dekrit presiden yang kemudian dikenal sebagai Konstitusi Yushin.

Upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonominya, Park selalu menjaga hubungan dengan Amerika Serikat, di samping untuk memperoleh bantuan ekonomi, juga untuk memperoleh bantuan dan dukungan militer. Dalam mengendalikan rakyatnya Pemerintahan Park membangun jaringan inteligen. Pada Juni 1961, Dewan Tertinggi Pembangunan Nasional membentuk Badan Intelejen Pusat Korea dengan Kim Jong Pil sebagai ketuanya. Hanya dengan waktu tiga tahun, badan intelejen ini mampu membangun jaringan yang sangat erat dengan berbagai badan, baik yang ada di Korea Selatan maupun di luar negeri.

Modal stabilitas melalui model otoriter birokratik, dan amandemen konstirusi tersebut, Park mulai menata kehidupan perekonomiannya. Dalam strategi industrinya, sebagaimana dikemukakan Wee Chow Hou (1984), Korsel, Taiwan, dan Hongkong menerapkan sistem yang terintegrasi, sebagaimana dipelajarinya dari Jepang yang telah dianggap berhasil menerapkan konsep *Japan Incorporated*. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh Wee Chow Hou, bahwa sistem terpadu, memungkinkan perusahaan-perusahaan Jepang bertindak lebih agresif dalam rangka modernisasi, perluasan, pengambilan resiko, dan inovasi.²⁷ Dalam rangka memenuhi tuntutan untuk mengatasi kebutuhan ekonomi yang mendasar dan mendesak, pemerintahan militer di bawah Park Chung Hee mengambil beberapa langkah penting. Pertama, membuka hubungan

²⁷ Wee Chow Hou, "Japanese Management, American Egg, Oriental Bird ?", *Singapore Management Review Magazine*, Volume 6, No, 1, 1984).

diplomasi dengan Jepang untuk mengundang arus PMA dan bantuan ekonomi dari negara tersebut. Kedua, mengambil sikap mengalah terhadap tekanan-tekanan dari AS (terutama untuk mendapatkan dukungan politik dan pengakuannya) serta menerima anjuran dari kelompok teknokrat untuk menggalakkan usaha-usaha ekspor, terutama ekspor hasil-hasil industri manufaktur.

Keberhasilan negara tersebut, lebih disebabkan oleh kuatnya fundamental ekonomi yang diletakkan dasar-dasarnya oleh Park Chung Hee, salah satunya adalah strategi industri yang dicangkok dari Jepang, yang di Korsel dikenal juga dengan istilah *Korea Incorporated*. Beberapa industri besar yang terkena dampak krisis ekonomi 1998, melalui dukungan pemerintah dapat segera bangkit dan merebut pangsa pasar kembali.

Melalui *Korea Incorporated*, pemerintah menjalankan fungsi perencanaan melalui badan yang dikenal dengan *Economic Planning Board (EPB)*. Negara diperankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan mengarahkan dan menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk investasi modal, produksi, dan juga ekspor. Dengan terbentuknya Badan Perencanaan Ekonomi (*EPB*) pada bulan Juni 1961, yang diketuai Wakil Perdana Menteri disusunlah Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Di Korsel, program Repelita disusun dalam empat tahap dimulai pada tahun 1962, yaitu: Tahap pertama dan kedua diarahkan untuk pembangunan industri. Tahap ketiga (1972 – 1976) untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan industri dan pertanian, dan tahap keempat (1977 – 1981) adalah pembangunan ekonomi yang mandiri dan pemerataan hasil pembangunan. Perencanaan, penentuan anggaran dan pelaksanaan rencana-rencana yang dilakukan oleh Kementerian-kementerian Perdagangan dan Industri, Keuangan, Bangunan, Transportasi, Komunikasi, serta Pertanian dan Perikanan berada di bawah pengawasan *EPB. Economic Planning Board*, mencanangkan target-target untuk semua variabel ekonomi terpenting termasuk investasi, konsumsi, tabungan, tingkatan-tingkatan output, impor dan ekspor, serta alokasi-alokasi terinci oleh sektor-sektor industri. *EPB* bersama dengan kementerian-kementerian itu mempunyai wewenang untuk mengubah pajak, tarif, subsidi, tarif keperluan-keperluan umum, mengontrol harga barang-barang tertentu, dan juga mengubah lisensi-lisensi impor, lisensi-lisensi investasi, penggunaan devisa, dan lisensi-lisensi pendirian usaha baru tanpa membutuhkan persetujuan Majelis Nasional.

EPB mempunyai kekuasaan yang sangat besar termasuk menguasai bank-bank komersial. Negara merupakan pemegang saham terbesar sehingga sangat berkuasa dalam menentukan kebijakan-kebijakan perbankan. *EPB* mempunyai kekuasaan untuk memelihara sekaligus menekan kaum borjuis nasional Korea Selatan. *EPB* juga mengorganisir informasi-informasi terinci mengenai pasar internasional dan perubahan-

perubahannya dari laporan-laporan yang diserahkan perusahaan ekspor. EPB mengorganisir informasi-informasi terinci mengenai pasar internasional dan perubahan-perubahannya dari laporan-laporan yang diserahkan perusahaan ekspor (Irwan, 1989:46 – 47).

Badan Perencanaan Ekonomi itulah yang kemudian menyusun Rencana Pembangunan Korsel yang di dalamnya meliputi: 1). Membangun industri energi khususnya kelistrikan; 2). Mengembangkan industri pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani dan menyeimbangkan struktur ekonomi; 3). Membangun industri dasar, seperti pabrik baja, 4). Memanfaatkan sumber daya yang ada, menciptakan lapangan kerja dan pemanfaatan lahan yang tersedia; 5). Meningkatkan keseimbangan pembayaran dengan peningkatan ekspor; 6). Mendukung sektor ipteks.²⁸

Lima aspek rencana pembangunan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Repelitanya Park Chung-Hee, yang pada dasarnya menjadi pijakan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi gaya Park Chung-Hee. Repelita ini menjadi penting artinya bagi peletakan dasar pembangunan ekonomi yang pada waktunya nanti akan menjadi kekuatan dalam menghadapi krisis ekonomi.

Strategi industrialisasi Panglaykim dalam menunjang pembangunan ekonomi yang dijalankan. Bagi Panglaykim, Korsel tidak berbeda dengan Jepang menjalankan strategi industrialisasi yang dikenal dengan *Korean Incorporated*, sebuah strategi industrialisasi yang mengintegrasikan keseluruhan pelaku industri baik secara vertikal maupun horizontal. Pemerintah dan swasta bekerja sama untuk mendukung proses industrialisasi yang berorientasi ekspor tersebut. Industri besar, menengah dan kecil diintegrasikan ke dalam proses industrialisasi yang dikomandoi oleh pemerintah sebagai motor penggerak pembangunannya.²⁹

Berbagai keuntungan yang dapat didapat dari pola industrialisasi yang terintegrasi tersebut, antara lain; mengurangi kesenjangan sosial yang dapat mempengaruhi fundamental ekonomi, memperkuat daya dukung ekspor yang menjadi andalan utama dalam pembangunan ekonomi. Sebagaimana dikemukakan Young Lob Chung, bahwa perkembangan industri swasta dalam ekspor memperoleh atau sangat terkait dengan dukungan pemerintah, yang kemudian dapat semakin meningkatkan kemampuan ekonomi Korea Selatan.³⁰ Dalam hubungannya dengan upaya mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, Park Chung-Hee juga mengupayakan pembangunan industri pertanian dengan tujuan meningkatkan pendapatan petani dan penyeimbangan struktur ekonomi

²⁸Duck Koo Chung dan Barry J. Eichengree, *Korean Economy beyond the Crisis*, Massachuset: Edwar Elgar, 2004, hl. 3-4.

²⁹Richard Robison, 1986 :148-151

³⁰Young Lob Chung, *Korea in The Fast Line: Economic Development and Capital Formation*, New York: Oxford University Press, 2007, hlm.14.

domestik. Menurut Kim Myung Oak dan Sam Jaffe, keberhasilan dalam pembangunan ekonomi Korsel juga dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan yang memberi kontribusi bagi kesuksesan ekonomi Korea Selatan.³¹ Artinya kebijakan yang diambil Park Chung Hee memperlihatkan adanya komitmen Park terhadap kemajuan bangsanya. Dengan kepemimpinan yang kuat Park mengarahkan kebijakannya tidak sekadar untuk mengejar pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri manufaktur di perkotaan, tetapi juga industri pertanian di pedesaan. Meskipun demikian, kebijakan yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh industrialisasi tetap rawan terhadap munculnya kesenjangan sosial.

Korea Selatan yang telah memiliki infrastruktur ekonomi peninggalan Jepang, sehingga memungkinkan bagi terhubungnya perkembangan ekonomi di pusat-pusat perkotaan dengan daerah pedesaan. Sebaliknya bagi pendukung intervensi negara tidak ada cara lain untuk mengatasi kesenjangan ekonomi tersebut, kecuali dengan kebijakan keberpihakan pemerintah terhadap petani di pedesaan, dengan membangun infrastruktur yang memadai guna meningkatnya pembangunan ekonomi pedesaan melalui kucuran dana yang lebih besar.

Pada saat itu di Korea Selatan terjadi kudeta terhadap Park Chung-Hee. Barang kali kudeta ini dapat dilihat sebagai tragedi yang membawa berkah bagi warga Korea Selatan, karena kemudian pemerintah Korea Selatan tidak terjebak ke dalam adagium "*power tend to corrupt, power absolutely corrupt absolutely*". Kekuasaan Park Chung Hee yang pendek tetapi telah berhasil meletakkan dasar-dasar bagi penciptaan fundamental ekonomi tersebut, tidak terganggu oleh intervensi keluarga dan terganggu konflik antarkelompok yang signifikan.

Semangat untuk mengalahkan komunis dengan tidak tanpa menggunakan senjata atau perang, tetapi melalui pembangunan karakter nasional dan keamanan melalui modernisasi ekonomi yang dicanangkan Park Chung Hee, rupanya dilanjutkan oleh para penggantinya. Oleh karena itu, dengan kepemimpinan yang kuat baik dalam visi, misi dan strategi bahkan implementasinya, fundamental ekonomi yang telah diletakkan dasar-dasarnya oleh Park Chung Hee dapat menjadi modal dalam mengatasi krisis-krisis ekonomi yang dihadapi Korea Selatan dari waktu ke waktu.

Suatu hal menarik untuk diperhatikan adalah kebijakan yang berorientasi ekspor, *Export-Oriented Industrialization (EOI)* dengan dukungan pemerintah dan berperannya para *Chaebol* (konglomerat). Sejarah industri di Korea sudah berlangsung sejak masa penjajahan Jepang di Korea. Banyak industri dibangun untuk menopang ekonomi Jepang.

³¹ The New Korea : *An Inside Look for Korea Economic Growth*, New York : Amacom, 2010: hlm.3-5.

Korea Selatan diuntungkan dengan warisan Jepang berupa infrastruktur seperti jalan raya, rel kereta api, listrik, saluran irigasi, tenaga terdidik dalam industri dan manajemen, dan sejumlah pabrik yang mampu menyediakan suatu basis industri ringan meskipun dalam jumlah dan kekuatan terbatas. Korea Selatan sudah memiliki basis sosial dan ekonomi yang cukup kuat dan memadai untuk memulai kembali program-program industrialisasi substitusi impornya.

Salah satu fenomena istimewa Korea yang dibangun oleh pemerintah adalah *chaebol*. *Chaebol* adalah konglomerat-konglomerat raksasa, dikuasai oleh sistem keluarga yang sangat sentralistik yang mendominasi perekonomian. Mereka memiliki koneksi dengan pusat-pusat kekuasaan, dan merekalah yang kelak menjadi cikal-bakal sejumlah konglomerat besar yang menjadi tulang punggung perekonomian Korea Selatan. Beberapa *Chaebol* besar sampai saat ini adalah Hyundai, Samsung, LG, Daewoo, Sunkyong, dan Ssangyong.

Di bawah tekanan kuat AS, pihak Jepang terpaksa menjual pabrik-pabriknya dengan harga yang relatif murah pada para pengusaha Korea. Pada masa pemerintahan Presiden Syngman Rhee proses industrialisasi yang berbasis pada industri substitusi impor mulai bangkit. Pelan-pelan industri tradisional Korea Selatan yang sudah hidup sejak zaman kolonial seperti industri tekstil, penghilangan tepung dan pabrik gula ikut tumbuh. Pada masa ini para *Chaebol* mulai memperoleh modal. Namun pemerintahan Rhee yang korup memporakporandakan ekonomi Korea Selatan.

Kalau dibandingkan dengan Indonesia, para konglomerat Indonesia muncul sejak sebelum kemerdekaan yang diperankan oleh para taipan Cina yang dibawa Belanda untuk menjadi pedagang perantara pada era Kolonial. Kemudian pada era nasionalisasi kebijakan industri berperan sebagai penopang dana bagi pelaku ekonomi yang nota bene pribumi. Istilah yang muncul pada waktu itu, adalah model alibaba, bahwa yang memperoleh lisensi impor adalah pribumi tetapi yang mendanai dan menjalankan bisnis tersebut adalah Cina. Kemudian pada era Orde Baru, dengan keterbukaan ekonomi dan kedekatannya dengan kekuasaan, mereka muncul sebagai kekuatan ekonomi baru layaknya *Chaebol* di Korea Selatan.

Perbedaannya menurut Yoshihara Kunio, terletak pada orientasi bisnis yang dikembangkan. Kalau *Chaebol* lebih memerankan dirinya sebagai industrialis, yang pada waktu nasionalisasi perusahaan Jepang dapat membeli dari Jepang atas dasar desakan dari Amerika Serikat, maka konglomerat Indonesia lebih memerankan dirinya sebagai pedagang perantara, yang menjembatani antara pengusaha dari luar negeri dengan konsumen di dalam negeri. Istilah Kuno, mereka ini adalah para komprador yang menjalankan perannya layaknya seorang “tukang jahit” yang memperoleh *order* dari

tuannya di luar negeri. Artinya peran para taipan tersebut sejak sebelum kemerdekaan sampai dengan sekarang ini masih sama yaitu sebagai komprador. Sebagai akibatnya, pengembangan industri manufaktur di Indonesia tidak sehebat Korea Selatan yang belakang ini mampu menjadi kompetitor Jepang, terutama dalam industri mobil dan pertelevisian.

Pada masa Park pemerintah berperan aktif mengarahkan sektor swasta khususnya *chaebol* untuk mewujudkan agenda pembangunan yang disusun oleh pemerintah berupa pengembangan industri manufaktur seperti elektronik, otomobil, dan semikonduktor. Sebagian produk industri yang didukung pemerintah diarahkan untuk pasaran ekspor karena tidak memiliki pasaran dalam negeri. Pemerintah memberikan berbagai kemudahan dalam hal perkreditan bagi para eksportir.

Pemerintah juga mengatur alokasi kredit yang disesuaikan dengan pertumbuhan sektor-sektor industri dan ekonomi yang pada umumnya lebih diprioritaskan. Pemerintah Korea Selatan yang mendapatkan pinjaman luar negeri baik dari Jepang maupun Amerika Serikat, berupaya memanfaatkan bantuan tersebut untuk mendukung strategi pembangunan yang dijalankan. Sementara itu, di Indonesia bantuan luar negeri telah mengalami kebocoran yang sangat fantastis, yang menurut Prof. Soemitro Djojohadi Koesumo mencapai 30%. Sebuah fenomena yang menggambarkan bahwa komitmen bangsa untuk mewujudkan visi dan misi pembangunannya kurang kuat.

Keberhasilan ekspor Korea Selatan yang pertama terjadi pada ekspor produk industri ringan seperti tekstil dan pakaian jadi, komponen elektronik, *plywood*, wig, serta barang-barang perantara (produk-produk kimia, minyak bumi, kertas, dan baja) yang berlangsung dalam kurun waktu antara tahun 1964 – 1974. Keberhasilan Korea Selatan pada periode tersebut sangat ditunjang oleh perkembangan ekonomi dunia yang tengah mengalami lonjakan pertumbuhan industri yang luar biasa, sehingga Korea Selatan tidak menemui kesulitan yang berarti untuk memasarkan produk-produknya, terlebih Korsel mendapatkan referensi untuk masuk ke pasar domestik Amerika.

Tabel I. Komoditi Ekspor Utama di Korea Selatan pada Tahun 1968

Komoditi	Ekspor (Juta \$ AS)	Persen (%)
Kayu Lapis	65,6	13,1
Rambut Palsu	35,5	7,1
Garmen Pakaian Dalam	28,7	5,7
Garmen Lain	26,8	5,4
Bahan Mentah Sutra	18,0	3,6
Ikan Segar	16,9	3,4
Serat Tenun	16,7	3,3
Rumput Laut Kering	13,7	2,7
Serat Tenun Kapas	13,3	2,7
Serat Tenun Tungsten	11,1	2,2
Lain-lain	254,1	52,0
Jumlah	500,4	100,0

Sumber: Departemen Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan, 1968

Menurut Riedel (1992), ada dua faktor bagi keberhasilan pembangunan ekonomi dan industrialisasi di Korea Selatan, yaitu pertama berupa sumber daya alam, sumber daya eksternal (bantuan luar negeri Amerika Serikat), dan sumber daya manusia, kedua faktor yang berkaitan dengan peran pemerintah dan kebijakan ekonomi yang dijalankan. Rahasia Keberhasilan dan kemajuan perekonomian Korea Selatan salah satunya terletak pada etos atau budaya kerja rakyatnya. Bangsa Korea Selatan berpandangan positif dan selalu berpandangan jauh ke depan. Secara umum bangsa Korea Selatan memiliki ciri-ciri etos kerja seperti kerja keras, disiplin, hemat, gemar menabung dan mengutamakan pendidikan. Kemajuan yang dicapai oleh Korea selatan dicapai karena motivasi tinggi, kedisiplinan, kerja keras dan perjuangan yang dilakukan oleh semua rakyat baik dari kalangan pemerintah, pengusaha dan rakyat umumnya.

Selain itu, kunci sukses pembangunan ekonomi Korea Selatan terletak pada pilihan-pilihan strategi kebijakan ekonomi. Memberikan perhatian besar pada pendidikan, pembangunan sumber daya manusia, serta investasi agresif di kegiatan penelitian dan pengembangan. Sukses Korea Selatan juga ditopang oleh tumbuh suburnya jiwa kewiraswastaan, tenaga kerja yang sangat terlatih, pengelolaan utang luar negeri yang baik, pemerintahan yang relatif bersih, iklim perdagangan dunia yang liberal, makro-ekonomi yang solid, dan kondisi sosial-politik yang relatif bebas dari konflik. Keberhasilan Korea Selatan jelas didukung oleh budaya kerja keras dan etos kerja yang tinggi. Orang Korea Selatan dikenal sebagai pekerja keras, dengan jam kerja jauh lebih panjang dibandingkan negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (*OECD*) lain. Faktor lain adalah adanya kemitraan kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat, serta kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan tantangan baru (Nusantaranews- Informasi, Fakta dan Opini, 2009).

Hal yang perlu diperhatikan adalah dalam kaitannya dengan Kebijakan *Heavy Chemical Industry (HCI)*. Ketika Korea Selatan memasuki tahap pembangunan industri yang disebut sebagai pendalaman (*deepening process*) pada paruh kedua dasawarsa 1970-an. Pada masa ini terjadi perubahan orientasi industri yaitu dari industri ringan ke industri berat. Pada tahun 1973 pemerintah memberikan prioritas pada perkembangan industri berat dan kimia, misalnya pembuatan kapal, industri permesinan, baja, mobil, dan petro kimia. Pertama karena terdapatnya keterbatasan dalam mengekspor hasil industri ringan yang sangat tergantung pada tenaga kerja murah yang semakin sulit didapat. Kedua, terjadi perubahan dalam struktur impor. Pesatnya perkembangan dalam pemakaian bahan penengah impor untuk jadi barang ekspor mempengaruhi *balance of payment*.

Saat ini *Pohang Steel Company* (POSCO) merupakan industri baja terbesar kedua di dunia setelah Nippon Steel dari Jepang. Rencana pembangunan industri berat dan kimia merupakan usaha Korea Selatan untuk membuat kekuatannya lebih mandiri. Rencana besar yang didukung oleh presiden, *Ministry of International Trade and Industry (MITI)*, dan sejumlah perusahaan besar nasional (*chaebol*) dilaksanakan tanpa menghiraukan tantangan kelompok teknokrat. Rencana ini justru mendapatkan dukungan dari militer dan hal ini erat berhubungan dengan sumbangannya untuk industri militer kelak.

Para *Chaebol* mendapat dana pinjaman tanpa bunga untuk mendirikan pabrik untuk kegiatan ekspor. Misalnya Hyundai ditugasi untuk membangun sektor otomotif. Daewoo yang merupakan spesialis di bidang tekstil diperintahkan untuk menangani pembuatan perkakas mesin, membuat kapal dan mobil. Park memaksakan pembangunan sejumlah industri dasar di antaranya industri baja, salah satunya adalah POSCO. Sayangnya kebijakan ini terhambat oleh sejumlah kesulitan eksternal yaitu krisis minyak dan resesi perekonomian dunia.

Di dalam negeri terjadi lonjakan inflasi dan perkembangan ekspor Korea Selatan juga mulai terancam. Namun Korea Selatan masih beruntung sebab sektor-sektor konstruksinya memperoleh peluang bisnis yang sangat besar terutama dengan berlangsungnya pembangunan ekonomi di negara-negara Timur Tengah yang kaya minyak. Kebanyakan industri di Korea Selatan memperoleh manfaat yang sangat besar dari arus PMA dan proses alih teknologi dari Jepang yang mulai digalakkan kembali sejak pembukaan kembali hubungan diplomasi antara kedua negara.

B. Saemaul Undong: Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Pembangunan ekonomi yang tujuannya mengejar pertumbuhan yang tinggi pada akhirnya dapat berakibat pada munculnya kesenjangan sosial. Sebuah fenomena umum yang terjadi di beberapa negara dunia ketiga, termasuk Korea Selatan. Menyadari akan kecenderungan tersebut pemerintah Korsel mencanangkan program Gerakan *Saemaul Undong*.

Gerakan *saemaul* merupakan gerakan yang dimaksudkan untuk mengembangkan dan memodernisasikan daerah pedesaan. Tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat kemerdekaan (*independence*), kemandirian (*self-help*) untuk mewujudkan gerakan desa baru (*new village movement*), dan kerja sama atau sifat gotong royong (*mutual cooperation*) dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.

Konsep ini diperkenalkan pada tahun 1971 ketika Korea Selatan menghadapi permasalahan disparitas pedesaan-perkotaan akibat prioritas pembangunan yang selalu

menekankan industrialisasi berorientasi ekspor. Keberhasilan pembangunan ekonomi Korea Selatan ternyata menimbulkan masalah-masalah sosial. Pada saat itu tingkat pertumbuhan sektor pertanian tertinggal jauh dari sektor industrial. Ketika terjadi pertumbuhan ekonomi, *gap* antara pendapatan rumah tangga petani dengan pendapatan masyarakat *urban* semakin besar. Hal ini mengakibatkan eksodus pemuda desa ke wilayah *urban*, meninggalkan desanya tanpa kemampuan yang memadai dan menciptakan tekanan penduduk di wilayah-wilayah *urban*.

Untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara desa dengan kota, Presiden Park mencanangkan Gerakan Masyarakat Baru dengan tujuannya sebagai pencerahan rakyat pedesaan melalui pendidikan masyarakat baru. Untuk mengubah bentuk pandangan dan tingkah laku ikatan tradisional dan jeratan kemiskinan masyarakat desa, membantu mengembangkan kerajinan dan penghematan, semangat untuk kerja sama dan menolong diri sendiri, dan memodernisasi masyarakat pedesaan.

Selain mencegah kecenderungan tak seimbang antara industri-perkotaan dengan pertanian-pedesaan, konsep ini berupaya memperbesar saluran pembangunan sektor ekonomi pertanian-pedesaan. Gerakan dimulai dengan menginventarisasi aset lokal yang jarang dimanfaatkan dan diolah menjadi sesuatu yang dapat memperbaiki standar hidup setempat dan memperbesar keuntungan yang diperoleh warga. Esensi lain *Saemaul Undong* adalah wujud pembangunan dari bawah berdasarkan inisiatif dan partisipasi lokal. Proyek ini diwujudkan melalui pembentukan koperasi warga setempat yang berpedoman pada inisiatif lokal, pemanfaatan tenaga kerja serta material dan keterampilan mereka.

Saemaul Undong dioperasikan melalui tiga tahapan. Pada tahap awal dilakukan berbagai perbaikan lingkungan hidup pedesaan terutama yang menyangkut fasilitas fisik. Tahap selanjutnya adalah memperbaiki infrastruktur dasar, dan tahap terakhir adalah memperluas kesempatan kerja pertanian dan non-pertanian di samping menggarap aktivitas lain yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan warga setempat.

Pada tahun 1973 pemerintah membuat *Village Cooperative Scheme (VCS)* untuk memperluas cakupan wilayah proyek saemaul. Sebuah desa dapat membentuk kerja sama atau sebuah unit produksi bersama dengan desa tetangga. Proyek-proyek komunitas baru menghasilkan modernisasi perumahan masyarakat desa, pembangunan jalan-jalan dan saluran air, pembangunan sistem sanitasi, dan memberikan pengetahuan ilmu sains dan teknologi bagi masyarakat desa, industri di pedesaan, dan fasilitas pemasaran. Gerakan komunitas baru memberikan hasil-hasil yang menguntungkan bagi wilayah-wilayah pedesaan, juga wilayah-wilayah *urban*. Gerakan nasional ini merupakan cara untuk memelihara semangat kerja sama dan persatuan.

Sejak diperkenalkannya *Saemaul Undong*, pada tahun 1978 terdapat 706 pabrik yang dibangun di kawasan pedesaan yang hampir seluruhnya mendapat insentif pemerintah berupa subsidi. Investasi pemerintah hanya sebagai pelengkap dalam kaitannya dengan organisasi dan mobilisasi sumber. Tahun 1970 – 1979 pendapatan petani mengalami peningkatan sebesar 9,5% per tahun. Gerakan Saemaul mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan investasi di daerah pedesaan. Pada tahun 1960-an laju investasi sebesar 10%, setelah diterapkannya gerakan Saemaul meningkat menjadi 20%.

Hal ini menunjukkan bahwa kesuksesan pembangunan ekonomi Korea Selatan terletak pada kemampuan manusianya, terutama pada pemimpinnya berkaitan dengan strategi kebijakan yang dijalankannya. Pemerintah menyadari pentingnya industri dasar yang akan menjadi katalis bagi berkembangnya industri hilir lainnya. Keajaiban ekonomi Korea Selatan yang telah dicapai sampai saat ini tentu bukan semata-mata pada faktor pemerintahnya saja melainkan juga dukungan masyarakat itu sendiri. Budaya kerja dan etos kerja yang tinggi serta kecintaan terhadap produk-produk dalam negeri menjadikan produk-produk yang dihasilkan Korea Selatan dikonsumsi oleh pasar dalam negeri dan luar negeri. Keberhasilan ini tidak bisa dilepaskan dari ajaran Konfusianisme yang sangat dijunjung tinggi pada dinasti Choson. Hingga saat ini Korea Selatan sendiri memiliki *Korean Employee System* yang mirip dengan di Jepang yang melindungi tradisi Konfusian. Ajaran ini telah mengajarkan harmonisasi alam dan hidup dalam keseimbangan. Konfusianisme yang diajarkan dalam pelajaran sekolah telah tertanam dalam setiap pemikiran masyarakat Korea Selatan. Oleh karena itu tidak sulit bagi Korea Selatan untuk menanamkan kedisiplinan dan rasa kerjasama untuk mencapai harmonisasi manusia maupun alam di dalam bidang industri. Konfusianisme lantas berkontribusi banyak dalam perekonomian Korea Selatan dikarenakan paham ini mampu memberikan dorongan semangat untuk belajar, penghormatan terhadap etika dan moralitas, dan penghormatan akan kejujuran, kesetiaan, dan kebenaran (Kwon, 2002: 56). Dengan fundamental ekonomi yang kuat ternyata Korsel lebih memungkinkan untuk pemulihan ekonominya (*recovery economy*) lebih cepat dibanding negara-negara Asia yang lain termasuk Indonesia.

Daftar Pustaka

- Bob Widayartono, "Gaya Manajemen Jepang" dalam Mengapa Jepang, Prisma No 5, Mei 1983, Tahun XII, Jakarta, Budi Winarno, *Pertarungan Negara vs Pasar*, (Yogyakarta: MedPress, 2002), hal.163-164.LP3ES, hal. 38.
- Ciri-ciri selengkapnya lihat, Didin S. Damanhuri. 1996. *Model-Model Pembangunan Pilihan Indonesia* dalam Didin S. Damanhuri, *Ekonomi Politik Alternatif: Agenda Reformasi Abad 21*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Caporaso A. James, David P.Levine. 1997. *Theory of Political Economy*, New York: Cambridge.
- Charles W. Kegley, Jr.& Eugene R. Wittkopf. 1999. *World Politics, Trends and Transformation*. New York :Worth Publishers, Inc.
- Deliarnov. 2002. *Ekonomi Politik: Mencakup Berbagai Teori dan Konsep yang Komprehensif*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Franz Magnis-Suseno. 1994. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hadi Soesastro. 2002. *AFTA dan Proses Liberalisasi di Indonesia*. dalam Mohamad Ikhsan, Chris Manning, (ed.), *80 tahun Mohamad Sadli: Ekonomi Indonesia di Era Orde Baru*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- James A.Caporaso, David P.Levine. 1992. *Theories of Political Economy*. New York: Cambridge University Press.
- M. Dawam Rahardjo. 1985. *Asumsi-asumsi Ideologis dari Model-model Pembangunan Ekonomi*. dalam M Dawam Rahardjo, *Esei-esei Ekonomi Politik*. Jakarta :LP3ES.
- Penyesuaian Kebijakan Ekonomi, 1986-7, Tahun XV, No 7, Juli 186, hal 523-543.
- David Hervey. 2010. *Imperialisme Baru: Genealogi dan Logika Kapitalisme Kontemporer*. Jakarta: Resist Book.
- James A.Caporaso, David P.Levine, 1992. *Theories of Political Economy*. New York: Cambridge University Press.

MEMBENTUK REZIM TATA PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

Ica Wulansari¹
ica.wulansari3@gmail.com

Abstract

Climate change now is a concern of international forum that has symbolized with the agreement of Kyoto Protocol. Climate change has an impact on security threats in the future. The interaction between climate change and conflict has become real. However, climate change is not yet considered important agenda same with traditional security threats. In international relations study define realists recognize that international anarchy is important. Unfortunately, the linkage between climate change and realist paradigm still in poor debate. Climate change issue has not bring the vulnerable countries have a bargaining power as much as developed countries. Kyoto Protocol and Post-Kyoto Protocol had only accommodated the interest of developed countries. Thus, global climate change order regime should be established to support strategic climate change policies through mitigation and adaptation. Furthermore, global climate change order regime should binding developed countries reducing emissions.

Keywords: *climate change, realist paradigm, security threats, global climate change order regime.*

Pendahuluan

Perubahan iklim merupakan hal serius yang menjadi perhatian dalam agenda internasional. Dampak perubahan iklim menjadi kekhawatiran apabila menyangkut potensi ancaman terhadap keberlangsungan hidup manusia. Selain itu, perubahan iklim berpotensi menimbulkan konflik kekerasan yang menjadi kajian dalam studi hubungan internasional mengenai pergulatan politik dalam keadaan anarki. Maka isu perubahan iklim menjadi perhatian sejumlah lembaga penelitian, lembaga pemerintahan maupun organisasi non pemerintahan yang menghasilkan laporan mengenai perubahan iklim, konflik dan keamanan nasional dengan argumen terjadinya potensi migrasi yang berpotensi menimbulkan konflik kekerasan. Perdebatan ini diterima dengan konsep “pengungsi iklim” yang cukup kontroversial dalam lingkaran akademik dan perumusan kebijakan (Elliott, 2012:1).

Sejumlah penelitian empiris mengenai perubahan iklim berpengaruh terhadap kehidupan manusia, walaupun hal-hal tertentu yang disebutkan bersifat spekulatif berdampak pada: **pertama**, Keamanan pangan: Hasil panen sangat tergantung pada sebagian campuran temperatur, kondisi tanah, dan pola hujan yang terganggu oleh pemanasan global. Pada prinsipnya daerah yang dilewati garis lintang dalam bidang pertanian, kondisinya menjadi tidak menguntungkan. Terjadi pengurangan hasil panen

¹ Dosen Tetap Fikom Universitas Budi Luhur dan Dosen Tetap Hubungan Internasional Universitas Paramadina

daripada hasil yang dibutuhkan, dikombinasikan dengan pertumbuhan populasi dan meningkatnya harga pangan. Hal tersebut secara serius membahayakan keamanan pangan dunia; **kedua**, Dampak regional: Peningkatan suhu panas di kutub utara, merusak daerah yang sedang berkembang dan berdampak meluas. Secara keseluruhan berdampak pada hasil panen akibat efek yang cukup hebat. Secara keseluruhan, sektor ekonomi bergantung pada ekosistem yang tidak terkelola yang tergantung pada hujan atau temperatur yang berdampak hebat akibat perubahan iklim. Gas rumah kaca berdampak hebat terhadap pertanian, kehutanan, pariwisata, dan kegiatan-kegiatan pantai; **ketiga**, Penggunaan lahan dan pemukiman: Peningkatan ketinggian laut mengancam pemukiman di sekitar pantai tempat sebagian manusia hidup. Republik Maldives, Bangladesh, Indonesia, Belanda dan Denmark berada di bawah air. Biaya ekonomi untuk adaptasi sangat besar meliputi relokasi populasi, dan melindungi infrastruktur pantai; **keempat**, Penyediaan air: Pemanasan global mengurangi aliran sungai dan menambah tekanan pada air tanah saat polusi memburuk karena melepaskan ke aliran yang lebih kecil; kelima, Ketidaktentuan perencanaan: Perencanaan perpindahan tempat tinggal, kontrol hujan, merubah pola tanam pertanian sesuai musim. Terjadi perubahan yang terus menerus secara cepat, tidak dapat diprediksi dan terjadi secara berbeda di wilayah yang berbeda pula; **keenam**, Dampak lainnya: Pemanasan global juga berdampak pada risiko kesehatan manusia akibat tekanan panas dan peralihan dahsyat yang memunculkan penyakit tropis tersebar di beberapa wilayah (Harper, 2004: 147 – 148).

Perubahan iklim pertama kali dibahas pada tahun 1979 pada Konferensi Iklim Dunia yang di Badan Meteorologi Dunia (*WMO – World Meteorological Organization*). Pada tahun 1985, *WMO* bersama Program Lingkungan PBB (*UNEP - United Nations Environment Programme*) menyimpulkan bahwa "meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca dipercaya akan menaikkan suhu bumi melebihi peningkatan yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia". Kemudian dalam pertemuan Badan Pengurus *WMO* (*WMO Executive Council*) ke-40 dibentuklah Panel Antar-pemerintah Mengenai Perubahan Iklim (*IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change*). Setelah itu, penandatanganan kesepakatan Montreal Protocol pada tahun 1987 mengenai pengurangan pemakaian gas *chlorofluorocarbon* (*CFCs*). *CFCs* yang biasanya digunakan untuk pendingin lemari es dan *air conditioner* diketahui merusak lapisan ozon dan menyebabkan kanker, meningkatkan radiasi ultraviolet untuk memasuki atmosfer (Stiglitz, 2007: 253 – 254).

Rezim tata perubahan iklim global ditandai dengan adopsi Protokol Kyoto pada tahun 1997 melalui proses perundingan yang cukup alot. Protokol Kyoto terselenggara

dalam *CoP3 (Conference of Parties)*-pertemuan antarpihak) yang menghasilkan suatu konsensus berupa keputusan untuk mengadopsi suatu protokol yang merupakan dasar bagi negara-negara industri untuk mengurangi emisi gas rumah kaca minimal sebanyak lima persen dari tingkat emisi (Mudiyarso, 2005, 6). Protokol Kyoto menekankan *CDM (Clean Development Mechanism)* yang menjadi dikotomi kepentingan negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Hal tersebut akibat keengganan negara-negara maju untuk mengurangi emisi. Dalam berbagai pertemuan antarpihak, upaya ratifikasi terhadap Protokol Kyoto mengalami kendala. Hingga perumusan *Post* Protokol Kyoto (Protokol Kyoto habis masa berlakunya pada tahun 2012) masih terjadi tarik menarik kepentingan antara negara maju dan negara berkembang. Namun negara-negara maju yang memegang kendali dalam perumusan peta jalan *post* Protokol Kyoto. Tulisan ini berupaya membuka diskursus mengenai pembentukan rezim tata perubahan iklim global dengan mengkaji studi-studi yang menjadi hirauan dalam hubungan internasional.

Realis dan Isu Perubahan Iklim

Dalam tataran pembentukan rezim tata perubahan iklim global, maka masih terjadi perdebatan paradigma dalam hubungan internasional. Paradigma realis seringkali diasosiasikan dengan ancaman keamanan tradisional. Namun beberapa referensi merujuk paradigma realis dengan isu perubahan iklim. Dalam kajian ini, penulis berupaya mengemukakan sejumlah pandangan mengenai isu perubahan iklim. Mark J. Lacy dalam bukunya *Security and Climate Change* menyatakan hal berikut: *“the Realist must survey the geopolitical scene to work out what dangers the state should secure itself from, who or what is the clear and present danger to the tame zone”*. Dalam penulisan ini, penulis sengaja tidak menerjemahkan agar diskursus mengenai realis dan isu perubahan iklim dapat dicermati. Lacy dengan sadar menyatakan negara seharusnya melindungi diri dari berbagai ancaman dan paham realis searah dengan implementasi kepentingan nasional.

Dalam bukunya, Mark. J. Lacy pun mengangkat pemikiran John J. Mearsheimer. *“For Mearsheimer an ecological threat such as human-generated climate change would be characterized as (at most) a Second-Order problem: there is very little “evidence” that climate change could threaten a Great Power. With this move Mearsheimer is able to quickly take his discussion away from non-traditional threats to the First-Order concerns of his Realist politics of security”* (Lacy, 2005:23). Dampak perubahan iklim dipandang oleh Mearsheimer sebagai ancaman yang serius terhadap kekuatan besar dunia. Maka diskusi mengenai perubahan iklim tidak hanya diawali dari ancaman dengan kajian keamanan non tradisional namun menuju ke arah keamanan politik realis.

Sementara itu, James R. Lee dalam bukunya berjudul "*Climate Change and Armed Conflict. Hot and Cold Wars*" mendukung argumen Mark J. Lacy. *Mark Lacy sees two approaches to managing conflict that are generally grouped into "realist" and "idealist" archetypes. These categories emanate from roots of a much older distinction between those who see the world as it is versus those who see it as it ought to be. The realist approach centers on the state as the principle actor serving the national interest. The realist assumption is that the quest for national power will remain the paramount driver of the international system. One realist approach to climate change and conflict comes from John J. Mearsheimer, a theorist of international relations. For Mearsheimer, the managers of global security are the Great Powers.* (Lacy, 2009:20). James R. Lee sepaham bahwa kepentingan nasional menjadi hirauan utama dalam menghadapi ancaman perubahan iklim. Lebih lanjut, Lee membagi dua jenis paham realis dalam isu perubahan iklim sebagai tingkatan keamanan yang dibagi dalam permasalahan jangka pendek dan jangka panjang. Pertama, *Offensive Realism* yaitu tatanan kepentingan nasional dan focus terhadap kesempatan untuk meraih *power* dan bereaksi terhadap ancaman tradisional. Kedua, *Defensive Realism* merupakan tatanan kepentingan nasional kedua, pusat dari kemampuan structural dan ancaman non tradisional. Perubahan iklim masuk dalam kategori ini (Lacy, 2009:20).

Robyn Eckersley yang merupakan pegiat kajian studi *Green Politic* dalam bukunya berjudul "*The Green State. Rethinking Democracy and Sovereignty*" melakukan pembedahan teoritis studi hubungan internasional terhadap isu lingkungan hidup. Isu perubahan iklim menjadi bagian dari isu lingkungan hidup yang mendapat perhatian bagi para pengkaji *green politic*. Negara disibukkan dengan isu-isu keamanan yang dapat dipahami melalui paradigma realis yang muncul dari lokasi sistem negara yang anarki. Aktor negara memiliki ketakutan, ketidakpercayaan dan secara berkala bersaing untuk mendapatkan sumber daya dari kelangkaan dengan tujuan pelesetarian ataupun perluasaan kekuasaan (Eckersley, 2004: 21).

Dalam bukunya, Eckersley mengangkat kerangka realis dan neo realis. Bagi realis tradisional seperti Hans Morgenthau, negara terlibat secara terus menerus dalam perjuangan untuk mencapai *power*. Mencapai *power* dengan melakukan perang, perang adalah ancaman terus menerus dan damai dapat dicapai dengan "*balance of power*" di antara negara-negara. Sementara itu, Kenneth Waltz, pegiat paham neorealis melihat tindakan negara-negara dalam hubungan rivalitas yang dihasilkan melalui struktur anarki dari sistem negara meskipun menempatkan "rasionalitas tinggi" dari pilihan pengaturan atau argument, baik pilihan hijau atau tidak. *For neorealists such as Kenneth Waltz, the rivalrous strategic behavior of states is something that is generated by the very anarchic*

structure of the state system despite the putative “higher rationality” of alternative arrangements and arguments, green or otherwise. Kepentingan keamanan dan ekonomi menurut Eckersley merupakan masalah serius dalam politik, perlindungan lingkungan hidup yang dikritisi dalam lingkaran kajian hubungan internasional.

Eckersley berpendapat realis menjadi arah dinamika tingkah laku dari negara-negara yang hidup dengan ancaman konflik militer dan menghadapi masalah lingkungan hidup lintas batas yang dapat menjadi sumber meningkatnya ketidakstabilan dan konflik pada era millennium (terutama terkait dengan kelangkaan sumber air). Selain itu, pengejaran keamanan nasional seharusnya memiliki perhatian terhadap lingkungan hidup. Dalam kehidupan ekologis, maka hak politik dan sipil perlu dibangkitkan agar mencegah kerusakan lingkungan hidup. Eckersley menyoroti latihan militer, produksi, penyimpanan dan pembuangan senjata, hingga konflik bersenjata menunjukkan penyebab utama dari penurunan kualitas ekologi pada abad ini (terutama uji coba senjata nuklir, kimia dan peperangan). (Eckersley, 2004: 25)

Keamanan Non Tradisional

Transformasi isu dalam studi hubungan internasional salah satunya adalah keamanan non-tradisional dengan salah satu tema sentralnya adalah masalah lingkungan hidup. Isu keamanan non-tradisional di luar hirauan tradisional kajian keamanan-seperti misalnya lingkungan hidup sebagai bagian dari studi keamanan. Bob Sugeng Hadiwinata menyatakan *The Copenhagen School* mencoba memperluas obyek rujukan isu keamanan dengan tidak lagi berbicara melulu keamanan “negara”, tetapi juga menyangkut keamanan “manusia”. Namun hingga saat ini, belum ada kesepakatan bagaimana konsep keamanan manusia harus dipahami dan bagaimana pula aplikasi konsep tersebut di dalam politik praktis (Hermawan, 2007:13 – 14).

Ancaman keamanan non tradisional seperti perubahan iklim merupakan ‘tantangan’ agar dapat dilihat dari paradigma realis. Namun isu perubahan iklim seharusnya dapat digolongkan dalam *first-order problem*, apabila realis menjadi pengecualian dalam disiplin hubungan internasional. Maka isu perubahan iklim tidak dapat menjadi realis bila menganggap ancaman-ancaman non tradisional serius dan tidak menjadi realis yang bermakna menjadi utopian, liberal, idealis atau bahkan radikal. Dengan menggunakan ancaman non tradisional maka bagi yang menggunakan pisau analisis ini tidak bersentuhan dengan realitas dari ketidakamanan dan ketidakpastian global. Model berpikir seperti ini tidak khas dalam hubungan internasional. Hubungan internasional berupaya untuk membuat keamanan tradisional menjadi beberapa ruang dalam

masyarakat masa kini, untuk membuat menjadi ancaman non tradisional maka akan menjadi utopian atau ekstremnya dapat dikatakan anti modern (Lacy, 2009: 24).

Bagian dari perkembangan isu keamanan seringkali dimaksud dengan “non tradisional”, “keamanan lingkungan hidup” dan saat ini dikenal dengan “keamanan iklim” yang berupaya menjawab pertanyaan keamanan untuk siapa? Dan seperti apa? (Elliott, 2012:2). Keamanan non tradisional seperti perubahan iklim mensyaratkan aksi keamanan non tradisional. Perubahan iklim rentan dengan ketidakamanan kehidupan manusia yang harus melakukan adaptasi, ketahanan sosial dan manajemen risiko bencana dengan rencana dan strategi pembangunan strategis (Elliott, 2012:9). Masalah lingkungan merupakan cakupan global dan tidak dapat dilepaskan dari negara. Negara seharusnya dipandang untuk melindungi kehidupan dan kebebasan warga dan untuk meningkatkan kehidupan yang layak. Perlindungan terhadap warga oleh negara menjadi tujuan dari keamanan (Alagappa, 1998: 30 – 31). Kasus yang termasuk dalam fokus lingkungan dan masalah ancaman bertahan hidup bagi umat manusia menurut dugaan, meningkat dikarenakan degradasi lingkungan hidup (Alagappa, 1998:43).

Pada prinsipnya terdapat hubungan ancaman terhadap alam semesta sebagai keamanan lingkungan hidup, yaitu meliputi: 1) Ancaman kehidupan manusia dari lingkungan hidup secara alamiah yang tidak disebabkan oleh aktivitas manusia. Contohnya gempa bumi maupun letusan gunung berapi; 2) Ancaman dari aktivitas manusia terhadap sistem alami atau struktur planet tempat perubahan yang ada dapat mengancam bagian dari peradaban. Contohnya pada tingkat global seperti emisi gas rumah kaca, dampak dari CFC`s dan emisi industri terhadap lapisan ozon; 3) Ancaman dari aktivitas manusia terhadap sistem alami atau struktur planet yang tidak nampak sebagai ancaman terhadap peradaban. Contohnya penipisan dari beragam sumber-sumber mineral (Buzan, 1998:79 – 80).

Keamanan iklim menjadi pertimbangan baik statis maupun perubahan iklim adalah bagian dari aspek keamanan lingkungan hidup. Terdapat dua hubungan yaitu hubungan fisik dan dampak ekologis dari perubahan iklim. Perubahan iklim dapat menjadi faktor yang memperburuk atau memperluas permasalahan lingkungan hidup. Meningkatnya gas rumah kaca menjadikan pemanasan global secara antropogenis yang merupakan dampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tekanan populasi. Kelemahan sektor lingkungan hidup menjadi berdampak bagi pembangunan masyarakat, kebudayaan dan peradaban (Mazo, 2010: 36). Keseluruhan dampak akibat perubahan iklim yaitu ketersediaan sumber air yang mengalami situasi kritis di suatu wilayah akibat perubahan musim, kualitas air dan risiko banjir. Berkurangnya ketersediaan air tidak hanya berdampak terhadap ketersediaan air minum, namun berdampak pula terhadap produksi

pangan (Mazo, 2010:96). Perubahan iklim menjadi ancaman terhadap keberlangsungan hidup manusia. Bahkan, James R. Lee menyebutkan perubahan iklim dapat menjadi senjata pemusnah massal (Lee, 2009: 158 – 160).

Pembahasan

Potensi Konflik

Perubahan iklim yang terjadi akan berkontribusi terhadap ketidakstabilan dan konflik kawasan dan memungkinkan meningkatnya kekerasan yang akan berpengaruh tidak hanya antar kawasan, namun juga berpengaruh di luar kawasan (Mazo, 2010:110). Perubahan iklim adalah jenis bencana lingkungan yang terjadi secara perlahan-lahan dan konflik yang diakibatkannya akan terjadi dalam jangka waktu panjang. Terdapat ketidakseimbangan antara kebutuhan dan peningkatan sumber daya maka akan menambah dan memperpanjang potensi konflik (Lee, 2009:24).

Terdapat tiga hal yang menyebabkan perubahan iklim menjadi konflik bersenjata. Pertama, konflik timbul setelah terjadinya pola iklim yang berubah-ubah secara berkelanjutan, masyarakat akan mencoba bertahan dengan menyimpang dari kebiasaan, Dalam jangka pendek perubahan iklim akan berpengaruh terhadap ketersediaan sumber daya yang semakin terbatas. Kedua, perubahan iklim tidak akan menimbulkan konflik, tetapi dalam waktu yang panjang akan berkontribusi dan mempertajam konflik. Kemakmuran sosial akan mengalami penurunan, masyarakat harus bertahan hidup maka memerlukan adaptasi. Namun, adaptasi bukanlah strategi bertahan, tetapi merupakan bagian jaringan yang kompleks dari interaksi sosial. Ketiga, perubahan iklim dapat menciptakan kondisi struktural bagi konflik, menjadi pemicu bentrokan dalam masyarakat. (Lee, 2009:3 – 4)

Lebih lanjut, Lee menyatakan terdapat tiga kemungkinan perilaku yang diakibatkan oleh perubahan iklim diantaranya kelangkaan dan kelimpahan sumber daya hingga isu mengenai kedaulatan. Pertama, perubahan iklim dapat menjadi konflik apabila terjadi kelangkaan. Kondisi kekeringan dan mencairnya gunung es menyebabkan hilangnya lahan subur, menjadikan flora dan fauna mengalami *stress* dan menyebabkan menurunnya persediaan air bersih. Persaingan dan konflik akan penguasaan sumber daya meningkat setelah terjadi kelangkaan. Jenis kelangkaan dapat dibedakan menjadi: Kelangkaan fisik yang umumnya berhubungan dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas; kelangkaan geopolitik yang melibatkan distribusi sumber-sumber daya di antara negara-negara yang mengalami kelangkaan maupun yang mengalami pembaharuan; kelangkaan sosioekonomi akibat perbedaan distribusi di antara negara-negara. Perubahan iklim yang cepat dapat mendorong meningkatnya migrasi penduduk. Kedua,

perubahan iklim akan menjadi konflik di tempat yang memiliki sumber daya yang melimpah. Perebutan sumber daya menjadi hal yang memungkinkan. Ketiga, perubahan iklim akan mengundang kepentingan nasional dan isu mengenai kedaulatan (Lee. 2009:5 – 7).

Potensi konflik akibat perubahan iklim akan mempengaruhi konstelasi politik internasional dan geopolitik. Geopolitik terdahulu yang menitikberatkan pada penguasaan ladang-ladang minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Penggunaan minyak bumi secara meluas menjadi simbol kebangkitan negara-negara industri. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka kebutuhan penggunaan minyak bumi pun semakin tinggi. Dalam hal menguasai sumber minyak bumi, maka konflik pun tidak dapat dihindari terjadi di negara-negara yang kaya akan sumber minyak bumi. Negara maju dengan kepentingan nasionalnya berupaya menjadikan isu penguasaan minyak bumi melalui konstelasi politik internasional. Selain itu, politik internasional dalam ‘kerangka demokrasi’ berupaya meruntuhkan rezim diktator negara-negara yang memiliki ladang minyak bumi, namun upaya menguasai sumber energi menjadi dalih bagi negara-negara maju untuk terlibat melakukan tindakan *pre-emptive strike* hingga peperangan.

Maka, ketika terjadi konflik atau peperangan, harga minyak bumi melambung karena menjadi komoditas politik. Selain itu, dampak lainnya yang tidak dapat dihindarkan adalah tingginya konsumsi penggunaan minyak bumi. Maka penggunaan minyak bumi berpengaruh terhadap meningkatnya pemanasan global akibat tingginya gas karbondioksida sebagai gas buang penggunaan minyak bumi. Belum lagi ancaman kelangkaan terhadap minyak bumi. Di tengah, upaya negara-negara untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi, negara-negara maju sudah mulai mengembangkan energi alternatif. Namun, laju kerusakan lingkungan hidup akibat perubahan iklim tidak dapat dihindari. Maka, isu ancaman perubahan iklim adalah mengenai keberlangsungan hidup manusia dan peradaban manusia di masa depan. Perubahan iklim identik dengan bencana alam, maka selain kerusakan ekologis, hal yang paling serius adalah bagaimana manusia bertahan hidup di tengah sumber daya yang semakin terbatas. Sehingga, perebutan akan sumber energi akan semakin diperparah dengan perebutan sumber daya yang sifatnya vital seperti persediaan air bersih.

Membentuk Rezim Tata Perubahan Iklim Global

Potensi konflik akibat perubahan iklim tentu harus menjadi perhatian bagi pembuat kebijakan. Maka isu perubahan iklim harus mengalami politisasi dan desekuritisasi. Dengan tujuan agar kebijakan tingkat lokal maupun global dapat menangkal ancaman

dampak perubahan iklim di masa depan yang lebih besar. Maka, kemudian politik akan dengan jelas menjadi bagian untuk menciptakan kebijakan-kebijakan untuk menghadapi perubahan iklim. Sedikitnya ada empat cara politik mempengaruhi perilaku dan pilihan-pilihan kebijakan yang akan diikuti oleh negara dengan fokus terhadap keberlangsungan perubahan iklim. Pertama, arah perkiraan perubahan iklim perlu untuk menghadapi dampak akibat perubahan iklim yang lebih meluas. Dengan mengetahui dampak, akan dapat dengan mudah untuk mengetahui gambaran di masa depan dan memperdalam kebijakan untuk menghadapi perubahan iklim baik secara optimis ataupun pesimis. Kedua, akan adanya pertimbangan strategis menghadapi perubahan iklim. Menghentikan perubahan iklim bisa jadi tidak masuk ke dalam kepentingan nasional bagi negara yang memiliki banyak sumber daya. Pilihan ini tergantung dari sudut pandang sebagai realis atau idealis (Lee, 2009: 148).

Perubahan iklim akan menjadi alat politik. Ancaman perubahan iklim akan memperkuat bentuk kebijakan dan perilaku. Resolusi konflik akan membutuhkan tindakan preventif dan reaktif. Untuk menghadapi ancaman perubahan iklim dapat menggunakan sanksi dan instrumen *soft politic* tetapi juga menggunakan instrumen *hard politik* seperti tindakan militer *pre emptive*. Negara-negara akan menjadikan isu perubahan iklim sebagai bagian dari kepentingan nasionalnya sebagaimana isu-isu lainnya. Beberapa negara memiliki prioritas nasional yang berbeda-beda berdasarkan tingkatan pembangunan ekonominya (Lee, 2009:152-153).

Perubahan iklim harus disadari dan diakui merupakan dampak akibat perilaku manusia dengan peradaban modern atau industrialisasi. Penggunaan energi bahan bakar fosil yang tinggi merupakan hasil dari kegiatan industri massif selama beberapa dekade. Maka timbul pertanyaan, apakah perubahan iklim merupakan dampak implementasi kapitalisme? Walaupun belum dapat dibuktikan secara faktual, namun rasionalitas menjawab perubahan iklim akibat eksploitasi lingkungan hidup demi pengejaran pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi, ekonomi bergerak dengan cepat, namun kualitas lingkungan hidup mengalami penurunan karena ketidakseimbangan antara eksploitasi dan upaya pelestarian dan pembaruan terhadap sumber-sumber daya pendukung gerak industri untuk pengejaran pertumbuhan ekonomi.

Isu perubahan iklim merupakan dampak dari kapitalisme. Di satu pihak, pemerintah, lembaga keilmuan global dan organisasi lingkungan hidup menerima pandangan bahwa perubahan iklim akan menjadi proses yang berkembang. Di sisi lain, beberapa perusahaan dan pemerintahan cemas untuk melindungi industrinya untuk periode waktu yang panjang terutama dalam membatasi pertumbuhan (*limit to growth*) yang tidak dapat diraih dan realisasi dari ekonomi bahan bakar fosil global. Dalam waktu bersamaan,

industri-industri ini berupaya mempercepat penggunaan bahan bakar fosil yang meningkatkan permintaan pasar yang berdasarkan teknologi yang diperbaharui. Sesungguhnya, dalam tahap ini ekonomi politik dari kapitalis kontemporer, teknologi 'bersih' yang disusun dari janji kapitalisme di masa depan dimana perilaku bertanggung jawab dari korporasi akan menciptakan ekonomi global yang terkait yaitu 'green' dan kosmopolitan. Namun penggunaan bahan bakar fosil telah menyebabkan meningkatnya ancaman perubahan iklim (Lacy, 2005: 59).

Jika perubahan iklim dapat dikonstruksikan sebagai *first-order problem* dimana energi menjadi bagian keamanan yang harus digerakkan untuk melaksanakan rezim baru penggunaan energi. Dalam situasi ini terdapat aktor plural yaitu IPCC, Greenpeace, Al Gore yang berupaya untuk menjadikan perubahan iklim secara sah menjadi ancaman bagi pihak-pihak yang kehilangan kekuatan ekonomi atau politik di tengah pihak yang tidak sepakat menganggap perubahan iklim sebagai ancaman (Lacy, 2005: 59). Namun upaya menjadikan isu perubahan iklim sebagai ancaman sama halnya dengan ancaman keamanan tradisional tidaklah mudah.

Sesungguhnya, ekologi politik global mendapat penolakan yang dianggap sebagai hal yang statis dalam hubungan internasional dan politik dunia yang secara umum dipahami, tergantung pemahaman negara sebagai aktor dan lembaga di antara banyak aktor dan percaturan lembaga-lembaga global yang menghadapi kerusakan ekologis (Eckersley, 2004: 4).

Ekologi politik cenderung tidak hanya dipandang oleh negara-negara secara skeptik, namun juga bertambah skeptik dari analisa *state-centric* dalam politik dunia secara umum. Analisa teori *green politic* dan aktivis tampaknya mengarahkan arah perlunya bentuk-bentuk alternatif dalam identitas, wewenang politik, dan pemerintahan yang dapat mengubah model tradisional statis menjadi aturan teritorial yang eksklusif (Eckersley, 2004: 5). Maka apabila berbicara konsep ekologi politik, dapat tercermin dari latar belakang politik di balik pemerintahan negara-negara. Baik negara maju maupun negara berkembang belum menjadikan isu lingkungan hidup ataupun perubahan iklim menjadi prioritas. Maka untuk membentuk rezim tata perubahan iklim global pun tidak mudah karena membutuhkan konsensus. Bagaimana konsensus internasional terbentuk apabila politik domestik negara pun tidak memiliki anggapan perubahan iklim harus mengalami penataan sistem secara keseluruhan agar tidak berdampak besar menghancurkan peradaban manusia. Maka, negara-negara yang rawan terkena dampak perubahan iklim perlu untuk mempertajam analisa dan kebijakan strategis untuk mengunggulangnya. Selain itu, perlu memperkuat negosiasi dalam forum internasional agar tidak lagi 'mengalah' terhadap kepentingan negara-negara maju.

Perluasan rezim lingkungan akan mengurangi perdagangan bebas. Hal ini merupakan konsekuensi logis yang akan muncul karena adanya benturan antara kebutuhan dagang dan kebutuhan lingkungan. Kemudian perluasan rezim lingkungan berdampak pada berkurangnya kemampuan pengawasan dan penindakan yang terjadi bukan karena menurunnya kapabilitas untuk melakukan kedua hal tersebut namun karena semakin banyaknya yang harus ditanggapi. Terakhir, adanya benturan lokalitas dan rezim internasional akan membuat perluasan rezim melemahkan perlindungan terhadap lokalitas tersebut. Mekanisme generik merupakan salah satu fokus dalam bangunan rezim lingkungan terutama terkait dengan *compliance* dan imbal-balik. Upaya membangun mekanisme generik tersebut akan membuat berkurangnya atau hilangnya pertimbangan lokal (Wardoyo, 2008:45).

Perjanjian post-Protokol Kyoto menyebutkan perubahan iklim seharusnya menjadi empat elemen kunci dalam pembagiannya. Pertama, seharusnya terdapat target emisi global sementara. Kedua, dengan adanya target global menjadi target nasional tergantung situasi yang berlaku. Ketiga, diperlukan insentif untuk partisipasi secara baik sebagai hukuman bagi negara-negara yang tidak terlibat, seperti sanksi sebagaimana diterapkan WTO. Keempat, perjanjian harus memiliki syarat mekanisme untuk transfer teknologi dan bantuan untuk negara-negara berkembang (Lee, 2009: 153). Protokol Kyoto belum mampu mengikat negara-negara maju dalam sistem Annex 1 untuk mengurangi emisinya. Dalam setiap pertemuan antar pihak dalam KTT perubahan iklim diwarnai dengan perdebatan, namun keputusan yang dihasilkan hanya menguntungkan satu pihak yaitu untuk negara maju.

Negara maju terbukti lebih dominan dalam menyuplai emisi gas rumah kaca. Dalam kerangka ini maka pembahasan masalah REDD (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*) bisa dikembangkan sebagai mekanisme tambahan atau alternatif dengan sifat "sukarela-mengikat". Sukarela dalam artian dilakukan tanpa menghilangkan kewajiban negara-negara Annex I untuk menaati pengurangan emisi berdasarkan Protokol Kyoto. Mengikat dalam artian dilaksanakan dengan kesadaran bahwa usaha ini dilakukan untuk menyelamatkan masa depan bersama (Wardoyo, 2008:47). REDD merupakan kesepakatan dalam pertemuan antarpihak KTT Perubahan Iklim ke-13 (*COP-13*) di Bali. Dalam pertemuan tersebut, REDD dibahas sebagai peta jalan Post Protokol Kyoto. Alasan penerapan REDD karena pasar global memberikan insentif positif terhadap negara-negara pemilik hutan tropis. REDD dinilai sebagai cara yang efektif untuk memberikan dana untuk menahan emisi gas rumah kaca (Wulansari, 2010:55). Post Protocol Kyoto belum berhasil 'memaksa' negara-negara maju untuk mengurangi emisinya, namun negara-negara maju mampu memaksakan mekanisme

REDD sebagai bentuk pengalihan terhadap kewajibannya sebagai bagian dari negara Annex 1. Kekuatan lobi negara-negara maju cukup kuat untuk mengatur kesepakatan mengenai upaya menghadapi laju perubahan iklim. Sehingga terkesan, negara-negara berkembang terutama negara pemilik hutan tropis seolah menjadi penyumbang besar bagi percepatan laju perubahan iklim.

Berharap rezim mitigasi iklim internasional baru akan memimpin lembaga-lembaga baru (seperti *WTO-World Trade Organization*) dan kekuatan-kekuatan baru atau peran-peran dari lembaga-lembaga yang ada yang akan membantu struktur hubungan internasional dalam abad mendatang seperti perjanjian *Bretton Woods* yang tidak dilakukan menjelang peperangan apabila terjadi, namun akibat kegagalan dari konferensi Copenhagen yang tidak dapat mengikat dalam perjanjian global (Mazo, 2010: 130). WTO terbentuk setelah rezim perdagangan bebas disahkan melalui kehadiran *Washington Consensus*. Standar perdagangan telah disusun agar negara-negara anggota WTO meningkatkan daya saing dan terbentuk rezim perdagangan yang adil. Setiap pertemuan WTO pun seringkali dipenuhi perdebatan dan negosiasi mengenai aturan-aturan perdagangan. Namun keunggulan WTO dapat mengikat anggota-anggotanya, walaupun kepentingan negara-negara maju lebih terakomodir dibandingkan kepentingan negara-negara berkembang. Sementara Protokol Kyoto maupun *Post* Protokol Kyoto tidak dapat mengikat negara-negara anggota sehingga pembahasan mengenai isu dan penyelesaian lingkungan hidup maupun isu perubahan iklim belum dapat diselesaikan dengan baik.

Kesimpulan

Kajian *green politic* maupun isu perubahan iklim sebagai ancaman keamanan seharusnya menjadi perhatian bagi pengkaji hubungan internasional kontemporer. Mengingat perkembang jaman maka akan terjadi perubahan dinamisasi suatu isu ataupun wacana. Wacana mengenai perubahan iklim dan dampaknya masih sepi dari perdebatan bagi pengkaji hubungan internasional. Apabila paradigma realis tidak dapat menjadi pisau analisis bagi kajian keterkaitan perubahan iklim dan ancaman keamanan, maka perlu ada diskursi mengenai hal ini. Perubahan iklim merupakan isu yang cukup tepat untuk dibahas bagi pengkaji hubungan internasional mengingat ancaman anarki yang ditimbulkannya. Maka penulis beranggapan sangatlah tepat apabila rezim tata perubahan iklim global seharusnya muncul dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dengan demikian apabila isu ini dihembuskan dalam forum internasional sudah selayaknya negara-negara yang rawan terkena dampak perubahan iklim yang 'memimpin' forum, agar kepentingan negara-negara maju tidak lagi menjadi prioritas.

Upaya untuk menjadikan rezim tata perubahan iklim global dapat terlaksana apabila isu ini disuarakan secara terus menerus. Isu perubahan iklim harus mendapatkan perhatian dari tokoh-tokoh, politisi ataupun pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan yang memiliki pengaruh terhadap massa. Maka dari sekadar isu menjadi wacana yang mendapatkan perhatian besar dari media massa. Tindakan kampanye yang melibatkan masyarakat perlu dilakukan untuk menggugah kesadaran mengenai seriusnya isu perubahan iklim. Kampanye isu perubahan iklim dapat dipermudah dengan kehadiran media sosial. Isu perubahan iklim pun perlu mendapat kajian dan publikasi ilmiah tidak hanya bagi akademisi berbasis pengetahuan alam, namun juga menjadi kajian bagi akademisi ilmu sosial terutama Ilmu Hubungan Internasional. Sehingga ketika isu perubahan iklim masuk dalam ancaman keamanan dengan tujuan bukan untuk ‘menakutkan’ melainkan untuk penerapan strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Semoga diskusi mengenai isu perubahan iklim dengan studi hubungan internasional tidak kering perdebatannya dengan tujuan yang lebih besar yaitu pemikiran untuk meningkatkan kualitas hidup dan menyelamatkan umat manusia akibat bencana yang timbul akibat laju perubahan iklim.

Daftar Pustaka

- Alagappa, Muthiah. 1998. *Asian Security Practice: Material and Ideational Influences*. California: Stanford University Press.
- Buzan, Barry; Ole Waever, and Jaap de Wilde. 1998. *Security A New Framework for Analysis*. London: Lynne Rienner Publisher.
- Eckersley, Robyn. 2004. *The Green State. Rethinking Democracy and Sovereignty*. London: The MIT Press.
- Elliott, Lorraine (editor). 2012. *Climate Change, Migration, and Human Security in Southeast Asia*. RSIS Monograph No. 24. S. Singapore: Rajaratnam School of International Studies. Nanyang Technological University.
- Harper, Charles L. 2004. *Environment and Society. Human Perspectives on Environmental Issues*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Hermawan, Yulius P (editor). 2007. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional. Aktor, Isu dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lacy, Mark J. 2005. *Security and Climate Change*. New York: Routledge.
- Lee, James R. 2009. *Climate Change and Armed Conflict. Hot and Cold Wars*. New York: Routledge.
- Mazo, Jeffrey. 2010. *Climate Conflict. How Global Warming Threatens Security and What to do About It*. New York: Routledge.

Mudiyarso, Daniel. 2005. *Protokol Kyoto. Implikasinya bagi Negara Berkembang*. Jakarta: Kompas.

Stiglitz, Joseph E. 2007. *Making Globalization Work. Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil*. Bandung: Mizan.

Jurnal

Broto Wardoyo. 2008. *Mandat Bali: "Footprint on the Sand"*. Jurnal Global&Strategis Universitas Airlangga. TH. II, No. 1, Januari – Juni 2008. Halaman 38 – 55.

Ica Wulansari. 2010. *Deforestasi di Indonesia dan Mekanisme REDD*. Jurnal Imiah Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan Volume 6 Nomor 2, September 2010. Halaman 54 – 71.

PENULIS

- Jeanie Annissa** Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta.
- Nathania Dea Myrilla** Alumnus Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur Jakarta
- Semmy Tyar Armanda** Alumnus Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur Jakarta. Peneliti di Purusha Research Cooperative dan kandidat Magister Sains Pertahanan Program Studi Ekonomi Pertahanan, Universitas Pertahanan, Sentul, Jawa Barat.
- Arin Fithriana** Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta.
- Muhamad Fauzi Regianto** Alumnus Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur Jakarta.
- Agi Noorman Hafidz** Alumnus Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur Jakarta.
- Ani Khoirunnisa
Tuswoyo
Ahmad Hidayat** Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Jakarta.
- Ica Wulansari** Dosen tidak tetap Fikom Universitas Budi Luhur dan dosen Tidak tetap Hubungan Internasional Universitas Paramadina.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL

1. Artikel harus orisinal tidak pernah dimuat di media lain termasuk *blog*, tidak bersamaan dikirim ke media lain dan merupakan penelitian dalam lingkup kajian Ilmu Hubungan Internasional.
2. Naskah diketik satu kolom menggunakan font Arial 11, 1.5 spasi 3000 – 5000 kata atau setara dengan 10 – 20 halaman.
3. Artikel dapat ditulis dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan format esai.
4. Pengiriman file naskah dapat di-*email* ke alamat: *transnasional_bl@yahoo.co.id*
5. Sistematika artikel adalah: Judul, Nama penulis (tanpa gelar akademik), lembaga/instansi, abstrak (jika naskah berbahasa Indonesia, maka abstrak berbahasa Inggris dan sebaliknya), kata kunci, Pendahuluan (latar belakang masalah, masalah), hasil dan pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, lampiran (jika ada).
6. Judul artikel berupa suatu ungkapan dalam bentuk kalimat pendek mencerminkan isi dari karangan. Nama lembaga/Instansi pengarang harus jelas dicantumkan pada halaman pertama. Bila Penulis terdiri dari empat orang atau lebih, maka hanya penulis utama yang dicantumkan dibawah judul artikel. Nama penulis lainnya dicantumkan pada catatan kaki halaman pertama naskah.
7. Penulis dianjurkan mencantumkan alamat *email* untuk memudahkan komunikasi
8. Sumber rujukan sebaiknya terbitan 10 tahun terakhir.
9. Teknis perujukan dan pengutipan menggunakan catatan perut dan catatan kaki untuk informasi pelengkap, dengan format sebagai berikut: ([nama belakang], [tahun]: [halaman jika ada]). Contoh: (Stiglitz, 2009:28).
10. Tabel dan gambar diberi judul yang singkat dan jelas maksudnya. Judul tabel berada di atas, sedangkan judul pada gambar berada di bawah. Setiap tabel dan gambar diberi nomor urut (1, 2, dst).
11. Penulisan daftar pustaka disusun menurut abjad nama penulis dan diketik 1 spasi untuk setiap pustaka dan berjarak 2 spasi untuk pustaka yang satu dengan yang lain.
12. Semua naskah ditelaah oleh *reviewer* yang ditunjuk oleh penyunting sesuai bidang kompetensinya. Penulis artikel diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan naskah atas rekomendasi dari *reviewer*.
13. Artikel dapat dibatalkan pemuatannya jika diketahui bermasalah. Kepastian pemuatan dan penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis atau melalui *email* kepada penulis.
14. Segala sesuatu yang menyangkut perijinan atau pengutipan dari berbagai sumber untuk pembuatan naskah yang dilakukan oleh penulis, menjadi tanggung jawab penulis yang bersangkutan berikut konsekuensi yang timbul karenanya.